

KEBERPIHAKAN MEDIA MASSA DALAM PENYAJIAN BERITA

(Analisis Isi Berita Perseteruan Gubernur Vs DPRD DKI Jakarta

di Surat Kabar Harian Kompas Periode 1 – 31 Maret 2015)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi

Disusun Oleh :

Bram Wasni Putra

NIM. 11730036

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2015



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DSH/PP.00.9/1216 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **KEBERPIHAKAN MEDIA MASSA DALAM
PENYAJIAN BERITA (Analisis Isi erita perseteruan
Gubernur Vs DPRD DKI Jakarta di Suarat Kabar Harian
Kompas Periode 1 - 31 Maret 2015)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

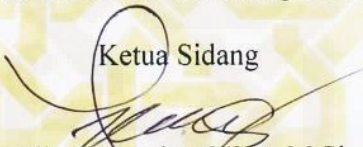
Nama : Bram Wasni Putra
NIM : 11730036

Telah dimunaqosyahkan pada : Rabu, tanggal: 23 September 2015
dengan nilai : 88,33 (A/B)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

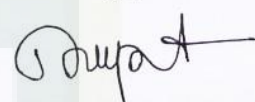
Ketua Sidang


Alip Kunandar, S.Sos.,M.Si
NIP. 19760626 200901 1 010

Penguji I



Mohammad Mahfud, S.Sos.I.,M.Si
NIP.19770713 200604 1 002

Penguji II


Diah Ajeng Purwani, S.Sos.,M.Si
NIP. 19790720 200912 2 001

Yogyakarta,
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
DEKAN




Dr. H. Kamsi, MA
NIP. 19570207 198703 1 003



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Mahasiswa : Bram Wasni Putra
Nomor Induk : 11730036
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : *Advertising*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya/ penelitian sendiri dan bukan dari karya / penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 10 September 2015

Yang Menyatakan,



Bram Wasni Putra
NIM. 11730036



NOTA DINAS PEMBIMBING

UIN.02/KP 073/ PP. 09/29 /2015

Hal : Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum, Wr. Wb

Setelah memeriksa, mengarahkan, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : **BRAM WASNI PUTRA**

NIM : **11730036**

Prodi : **ILMU KOMUNIKASI**

Judul :

**KEBERPIHAKAN MEDIA MASSA
DALAM PENYAJIAN BERITA**

*(Analisis Isi Berita Perseteruan Gubernur Vs DPRD DKI Jakarta
di Surat Kabar Harian Kompas Periode 1 – 31 Maret 2015)*

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi.

Harapan saya semoga saudara segera dipanggil untuk mempertanggung-jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatian Bapak, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 September 2015
Pembimbing

Alip Kunandar, M. Si
NIP. 19760626 200901 1 10

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

Keluarga Besar & Almamater Tercinta

Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



HALAMAN MOTTO

The
Best
by any
test



KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa keimanan, kekuatan, kesabaran, kelancaran serta keselamatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya.

Skripsi ini tersusun sebagai salah satu langkah dalam menyelesaikan studi jenjang Strata Satu yang ada dalam prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Skripsi merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi.

Selama menyusun penelitian ini telah banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Kamsi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Bono Setyo, M.Si selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Alip Kunandar, M.Si, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan sebagian waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk peneliti.
4. Ibu Diah Ajeng Purwani, S.Sos., M.Si, selaku pembimbing akademik, yang telah memberikan saran dan masukan berharga.

6. Keluarga terutama kedua orang tua, yang selalu memberikan semangat, dukungan dan segala yang dibutuhkan demi kelancaran dan kesuksesan.
7. Teman-teman Ilmu Komunikasi angkatan 2011, terimakasih atas segala informasi dan bantuan yang telah diberikan.
8. Dua pengkoder dan juga teman sejurusan seangkatan (Shaum Akbar R & Restu Basuki) yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mendukung peneliti.
9. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya.

Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penyusun sendiri dan pembaca sekalian. Amin Ya Robbal ‘Alamin

Yogyakarta,
Penyusun

Bram Wasni Putra
NIM. 11730036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9

F. Kerangka Teori	
1. Keberpahaman media massa	14
2. Berita.....	15
3. Nilai Berita.....	16
4. Penempatan Berita.....	18
5. Narasumber Berita.....	18
6. Asal berita.....	20
7. Analisi Isi.....	21
G. Hipotesis Penelitian	22
H. Metodologi Penelitian	
1. Jenis Penelitian	23
2. Metode Pengumpulan Data	24
a. Jenis Data	24
b. Teknik Pengumpulan Data	24
c. Unit Analisis dan Kategorisasi	25
d. Definisi Operasional	28
3. Metode Analisis Data	30
I. Kerangka Pemikiran Penelitian	32

BAB II: GAMBARAN UMUM

J. Surat Kabar Kompas	
1. Sejarah Singkat	33
2. Perkembangan.....	32

3. Visi dan Misi.....	39
4. Sasaran Operasional.....	41
5. Penyajian Halaman dan Rubrikasi.....	41
6. Sasaran Operasional.....	41
7. Struktur Organisasi.....	43
K. Persetujuan Gubernur VS DPRD DKI Jakarta.....	45
1. Gambaran.....	45
2. Berita.....	48
 BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Reliabilitas Antar <i>Coder</i>	50
B. Temuan Data	55
1. Frekuensi Unit Analisis 1 (Topik Berita)	56
2. Frekuensi Unit Analisis 2 (Sumber Berita).....	58
3. Frekuensi Unit Analisis 3 (Penempatan Berita)	59
4. Frekuensi Unit Analisis 4 (Asal Berita)	60
5. Frekuensi Unit Analisis 5 (Penggambaran Gubernur DKI)	62
6. Frekuensi Unit Analisis 6 (Penggambaran DPRD DKI Jakarta).....	63
7. Frekuensi Unit Analisis 7 (Pemilihan Dana Siluman)	65
C. Analisis Data	66
1. Analisis Topik Berita	67
2. Analisis Sumber Berita.....	70
3. Analisis Penempatan Berita	73

4. Analisis Asal Berita	77
5. Analisis Penggambaran Gubernur DKI	79
6. Analisis Penggambaran DPRD DKI Jakarta.....	82
7. Analisis Penggambaran Dana Siluman	84
D. Pengujian Hipotesis	87
BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Unit analisis dan kategorisasi analisis isi.....	26
Tabel 2 : Frekuensi Penyajian Berita.....	48
Tabel 3 : Frekuensi Unit Analisis 1 (Topik Berita)	56
Tabel 4 : Frekuensi Unit Analisis 2 (Sumber Berita).....	58
Tabel 5 : Frekuensi Unit Analisis 3 (Penempatan Berita)	59
Tabel 6 : Frekuensi Unit Analisis 4 (Asal Berita)	61
Tabel 7 : Frekuensi Unit Analisis 5 (Penggambaran Gubernur DKI)	62
Tabel 8 : Frekuensi Unit Analisis 6 (Penggambaran DPRD DKI Jakarta)	64
Tabel 9 : Frekuensi Unit Analisis 7 (Pemilihan Dana Siluman)	65

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Kerangka Pemikiran Penelitian.....	32
Bagan 1: Struktur Organisasi Surat Kabar Kompas.....	26



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 : Frekuensi Unit Analisis 1 (Topik Berita)	67
Grafik 2 : Frekuensi Unit Analisis 2 (Sumber Berita).....	70
Grafik 3 : Frekuensi Unit Analisis 3 (Penempatan Berita)	74
Grafik 4 : Frekuensi Unit Analisis 4 (Asal Berita)	78
Grafik 5 : Frekuensi Unit Analisis 5 (Penggambaran Gubernur DKI)	81
Grafik 6 : Frekuensi Unit Analisis 6 (Penggambaran DPRD DKI Jakarta)	82
Grafik 7 : Frekuensi Unit Analisis 7 (Pemilihan Dana Siluman)	85

ABSTRACT

Neutrality of a mass media is one of the main functions that must be met in order to gain public confidence. However, along with the diversity of the media, many of them override the main functions, so in the presentation has a tendency regardless the quality of the presentation of news.

This research is titled "Mass Media Alignments In Presentation of News" is performed to determine how the alignments and tendency of Kompas newspaper presenting feud Governor with DPRD DKI Jakarta in Kompas newspaper in the time period of March 2015. The research method used is quantitative content analysis. Data obtained by observation and documentation during that time period.

The research results showed that the chi squared calculation shows that χ^2 has a value of 0,14286. So, Hypothesis Ho (news in Kompas daily newspapers tend to support DPRD DKI) rejected and H1 (news in Kompas daily newspapers tend to favor Governor of DKI) accepted. It means the news in Kompas daily newspapers tend to support the Governor of DKI Jakarta (Ahok). The alignments realized in seven units of analysis, they are: Topic of News, Source of News, Placement of News, Home of News, Governor's Depiction, DPRD's Depiction, and Dana Siluman APBD DKI's Depiction. Those seven of unit analysis have adequate reliability figures with the lowest value stands at 0,7647 and the highest value reached 0.9411.

Keyword : Mass Media, Kompas, News

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu peran penting media massa adalah menyampaikan segala informasi dan pesan yang dibutuhkan kepada masyarakat. Berbagai macam informasi dan pesan yang disampaikan dapat diterima secara langsung atau tidak langsung yang bisa melalui surat kabar, majalah, radio, televisi dan berbagai media lainnya. Suatu informasi dan pesan yang disampaikan oleh media massa dapat dipilih dan diterima sesuai dengan selera atau kepercayaan masyarakat dan menjadi pilihan dalam kebutuhan informasi berita.

Banyaknya media yang menjamur saat ini membuat berbagai media massa berlomba lomba menunjukkan sifat, karakteristik dan keunggulannya untuk menyajikan informasi dan pesan kepada masyarakat dengan strategi yang berbeda pula tanpa mengesampingkan fungsi pokok sebuah media. Dalam situasi persaingan antar media massa yang ada di Indonesia, surat kabar atau biasa disebut pula koran dapat dikatakan sebagai salah satu media massa yang sampai saat ini masih diminati dan mampu menyaingi media-media lainnya. Menurut kamus Bahasa Indonesia pengertian media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah *Mass Media* yang merupakan singkatan yang berasal dari Media Komunikasi Massa dalam bahasa Inggris *Mass Communication Media*, yang berarti media

massa yaitu sarana penyampaian pesan-pesan, aspirasi masyarakat, sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ataupun pesan kepada masyarakat langsung secara luas. Menurut Rakhmat (2011), definisi yang paling sederhana tentang komunikasi massa dirumuskan Bittner (1980:10) yaitu, “*Mass communication is messages communicated through a mass medium to a large number of people*” (Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang).

Tujuan penggunaan media massa adalah agar membantu dalam memberikan informasi secara cepat dan tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Melalui media massa, suatu informasi dan pesan dapat secara terbaru. Dalam Surat Al-Ahzab ayat 70 diterangkan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

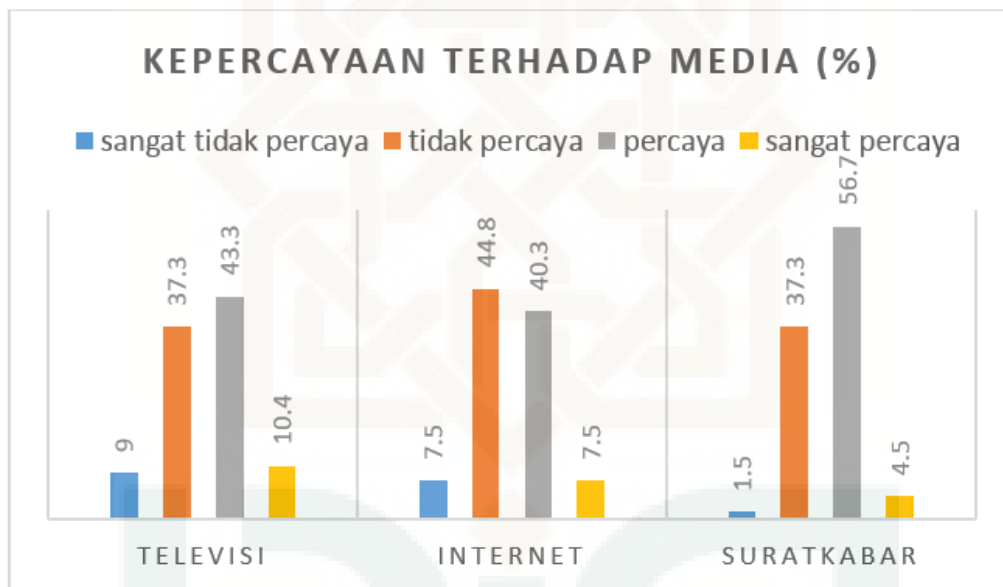
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.

Makna ayat tersebut adalah anjuran dan perintah dari Allah SWT bahwa hendaknya kaum muslimin senantiasa mengatakan sesuatu secara jujur. Kewajiban mengatakan kebenaran walau terasa pahit dan hanya berkata tentang suatu kebenaran. Tidak mengatakan sesuatu yang tidak berdasar apalagi berbohong, itu merupakan perbuatan yang mungkar. Makna dari ayat tersebut juga berlaku pada penggunaan media massa oleh Instansi Perusahaan, bahwa setiap informasi atau pesan yang disampaikan melalui media massa

hendaknya adalah informasi yang sebenar-benarnya agar tidak menjadi isu dan bisa berguna atau bermanfaat bagi masyarakat luas.

Secara umum, media yang mendapat kepercayaan tertinggi dari masyarakat adalah surat kabar. Surat Kabar atau media cetak merupakan tolok ukur pemberitaan yang berkualitas.

Grafik 1:
Kepercayaan Media di Indonesia.



Sumber : Pindai.org

Dari beberapa surat kabar di Indonesia banyak sekali yang tujuannya adalah menjadi sumber informasi dan berita untuk menyampaikan secara cepat kepada masyarakat. Sebuah berita yang dihasilkan oleh surat kabar merupakan suatu bentuk komunikasi massa yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Salah satu pemberitaan yang sedang hangat dan sedang menjadi pemberitaan *headline* di berbagai media adalah berita Gubernur DKI Jakarta atau biasa disebut Ahok vs DPRD dalam Kasus Anggaran Siluman APBD

DKI Jakarta. Berita ini mulai hangat diperbincangkan pada awal bulan Maret sejak kejadian adanya penerimaan tentang pengajuan anggaran Rp 8,8 triliun dari Bappeda DKI dari Usulan DPRD oleh Gubernur DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki atau Ahok yang menganggap bahwa Dana Anggaran APBD yang diajukan DPRD DKI Jakarta tidak jelas dan dinilai akan tidak tepat sasaran.

Hal ini mengakibatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2015 tak kunjung cair dan dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang disebabkan adanya ketidaksepakatan antara pihak Pemprov DKI dan DPRD DKI dalam penyerahan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) ke Kemendagri. Pemberitaan tentang pemberitaan Ahok Vs DPRD dalam Kisruh Anggaran Siluman APBD DKI Jakarta ini mendapat respon dari masyarakat maupun media, Masyarakat dan media menanggapi kasus ini sebagai bentuk kecenderungan dukungan yang berbeda-beda, ada yang mendukung Gubernur DKI atau juga DPRD DKI Jakarta.

Persaingan antar media yang semakin luas ditambah jumlah media yang sedemikian banyak, menjadikan pemberitaan sejumlah media lebih bervariasi dan kadang keluar dari konsep awal bahwa media juga memiliki fungsi sosial. Banyak pemberitaan media yang lebih mengedepankan sensasi, bombastis dan mendramatisir realitas atau isu yang diliput semata karena orientasi untuk memenangkan pasar. Dengan orientasi nilai seperti itu, terkait dengan liputan di media massa, masing-masing media memiliki perbedaan.

Perbedaan dalam merespon realita sempiris menjadi realitas media menjadi sebuah fenomena yang lazim dalam setiap institusi media cetak atau pers.

Berdasarkan uraian diatas tentu suatu realitas yang ditampilkan mencerminkan realitas yang sesungguhnya sangat tergantung pada kebijakan redaksional masing-masing media yang bersangkutan. Adanya keterbatasan pers yang tidak mampu menjaga independensi atau kecenderungannya pada pemilik modal sering terjadi pada persindustrial. Dalam pers secara struktural bidang redaksional tidak lepas dari pemilik modal. Sadar atau tidak sadar pemilik modal sering mencampuri bidang redaksional. Bahkan tidak jarang pemilik modalah yang mengatur redaksionalnya (Abrar,1995:65).

Tidak setiap peristiwa dapat dimuat menjadi sebuah berita, tetapi harus melalui proses seleksi yang didalamnya melibatkan berbagai pihak dan kepentingan. Sehingga dalam penampilan sebuah peristiwa antara surat kabar satu dengan yang lainnya bisa saja berbeda. Maka suatu kejadian yang sama, ketika dilaporkan sebagai berita oleh surat kabar, dapat berbeda kelengkapan isi, susunan, semangat, dan bentuknya. Perbedaan tersebut bisa disebabkan banyak hal, seperti daya tangkap dan daya tanggap, perbedaan tafsir dan selera tentang apa yang dipandanginya sebagai penting atau pokok dalam kejadian tersebut. Perbedaan juga disebabkan oleh visi pandangan media yang bersangkutan tentang permasalahan masyarakat. Visi itu dijabarkan menjadi kebijakan editorial dan kebijakan redaksional yang sekaligus menjadi kerangka acuan surat kabar yang bersangkutan (Oetama, 2001: 145). Seperti yang diberitakan oleh surat kabar Kompas berikut ini:

Gambar 1:
Pemberitaan di Surat Kabar Kompas.



Sumber : Epaper Kompas.com

Pengamatan singkat pada berita-berita Kompas yang menunjukkan adanya perbedaan isi dan kecenderungan tentang pemberitaan Ahok Vs DPRD dalam Kisruh Anggaran Siluman APBDDKI Jakarta. suatu pemberitaan tergantung pada kepentingan media atau tergantung pada faktor seperti politik dan ekonomi dari pemilik media itu sendiri. Dengan kata lain, pemberitaan media akan sangat dipengaruhi oleh ideologi yang melekat pada media tersebut.

Pemilihan surat kabar dalam penelitian ini dikarenakan surat kabar harian Kompas merupakan contoh media cetak yang menarik perhatian dalam fokus berita pembentukan Ahok Vs DPRD ini terbukti dari penerbitan berita terkait Kisruh Anggaran Siluman APBDDKI Jakarta mendapat porsi yang cukup besar. Namun meskipun dibandingkan dengan media massa lainnya, surat kabar tersebut sama-sama menyajikan berita seputar Ahok Vs DPRD akan tetapi dalam isi maupun bentuk penyajian berita tentulah memiliki perbedaan, selain itu bagaimana surat kabar ini memandang tingkat *news value*

juga berbeda. Suatu berita bisa saja ditempatkan pada halaman depan oleh harian Kompas atau ditempatkan pada halaman belakang atau begitu pula sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya perbedaan latar belakang visi maupun misi surat kabar tersebut, karena suatu media mempunyai subjektivitas tersendiri dalam menerbitkan sebuah berita. Dalam penelitian ini, juga akan menunjukkan bahwa suatu media yang mempunyai kecenderungan dalam pemberitaannya suatu kasus.

Oleh karenanya, persoalan ini menarik dan perlu untuk dikaji lebih lanjut tentang pemberitaan Ahok Vs DPRD dalam Kisruh Anggaran Siluman APBD DKI Jakarta dibedah mengenai analisis isi yang ada didalamnya. Pemberitaan ini layak untuk dikaji karena ada permasalahan hukum dan sosial yaitu tentang stigmatisasi masyarakat terhadap Kasus Perseteruan Ahok Vs DPRD DKI Jakarta. Menilik kondisi di Jakarta sebagai ibukota Indonesia yang setiap tahun anggaran naik dengan tidak diikuti perkembangan dan kemajuan secara signifikan. Sehingga pemberitaan Ahok Vs DPRD menjadi sesuatu yang harus lebih serius didiskusikan, dalam hal ini menjadi sebuah wacana di masyarakat dalam melihat pemberitaan kasus Kisruh Anggaran Siluman APBD DKI Jakarta.

Pertimbangan di atas menjadi dasar penulis untuk menjadikan berita Ahok Vs DPRD dalam Kisruh Anggaran Siluman APBD DKI Jakarta pada media cetak surat kabar Kompas menjadi obyek kajian penelitian analisis isi. Surat kabar harian Kompas menyajikan berita terkait Ahok Vs DPRD, kecenderungannya baru akan terlihat bila dicermati lebih lanjut. Untuk itu

kemudian peneliti hendak melihat bagaimana penyajian berita Ahok Vs DPRD dalam Kisruh Anggaran Siluman APBD DKI Jakarta ditampilkan dalam surat kabar Kompas untuk kemudian hendak mengetahui adanya kecenderungan dalam penyajian berita tersebut dengan menggunakan metode analisis isi. Untuk itu peneliti memberikan kategorisasi isi penelitian menjadi 5 kategori yakni frekuensi berita, ragam isi penyajian atau topik berita, narasumber penyajian berita, asal berita, penggambaran berita dan penempatan halaman.

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Maret 2015 karena pemberitaan terkait Ahok Vs DPRD dalam Kisruh Anggaran Siluman APBD DKI Jakarta mulai muncul ke publik pada awal bulan Maret sampai menjelang akhir Maret tahun 2015. Ketertarikan publik terhadap masalah ini menjadi semakin tinggi sehingga pemberitaan terkait perseteruan ini mempunyai nilai berita untuk diangkat kedalam surat kabar, yaitu pada surat kabar harian Kompas. Pada akhir bulan Maret pemberitaan ini tidak hangat lagi dibicarakan dilihat dari menurunnya kuantitas pemberitaan. Untuk itu pengambilan waktu penelitian hanya pada periode tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada ulasan latar belakang permasalahan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Apakah terdapat kecenderungan penyajian berita Gubernur (Ahok) Vs DPRD dalam Kisruh Anggaran Siluman APBD DKI Jakarta di surat kabar harian Kompas periode 1-31Maret 2015?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kecenderungan penyajian berita Gubernur(Ahok) Vs DPRD dalam Kisruh Anggaran Siluman APBD DKI Jakarta di surat kabar harian Kompas selama bulan Maret tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis.

Penelitian ini diharapkan mampu menambah kajian pada bidang komunikasi massa dan analisis media massa (terutama Analisis isi)

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan pengetahuan tentang perbedaan sifat media massa yang terkait dengan kepentingan dan ideologi tertentu dan juga menjadi sumber referensi dan informasi.

E. Telaah Pustaka

Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk mengetahui hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya serta memastikan bahwa masalah yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh pihak manapun. Penelitian mengenai Analisis isi banyak dilakukan pada media-media massa Beberapa penelitian yang dilakukan oleh banyak pihak antara lain:

Pertama, pustaka yang digunakan adalah skripsi yang disusun oleh Irma Suryani mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan

Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014 dengan judul NILAI PROFETIK DALAM MEDIA MASSA (Analisis Isi Opini Harian Republika Periode Ramadhan 1434 H). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode desain analisis isi kuantitatif, dengan menggunakan analisis isi model Eriyanto yang menjelaskan bahwa penelitian menggunakan metode ini hanya memfokuskan pada bahan yang tersurat saja. Peneliti hanya meng-*coding* (memberi tanda) apa yang dilihat.

Salah satu kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian tersebut bahwa melalui pendeskripsian dan penafsiran hasil penelitian serta perhitungan *chi kuadrat* diperoleh hasil bahwa terdapat nilai-nilai profetik dalam opini harian Republika selama bulan Ramadhan 1434 H (periode 8 Juli-7 Agustus 2013). Dengan demikian, hipotesis H_0 (tidak ada nilai profetik dalam opini harian Republika selama bulan Ramadhan 1434 H) ditolak dan H_1 (ada nilai profetik yang terdapat dalam opini harian Republika periode bulan Ramadhan 1434 H) diterima. Perhitungan ini memperoleh hasil bahwa terdapat satu buah unit analisis yang tidak memenuhi syarat minimal (0,7 atau 70 %) yakni dengan jumlah opini yang mempunyai nilai atau pesan yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist hanyasebanyak 49 % (tidak mencapai 70 %). Sementara keenam unit analisis laintetap mempunyai nilai profetik lebih dari 70 % sesuai yang diharapkan Ilmu Sosial Profetik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai profetik dalam opini harian Republika selama bulan Ramadhan 1434 H (periode 8 Juli – 7 Agustus 2013). Penelitian ini sama-sama menggunakan

analisis isi model Eriyanto, tetapi terdapat perbedaan pada subjek dan objek penelitiannya.

Kedua, penelitian yang dibuat oleh Maya Kusuma W Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2013 yang berjudul OBJEKTIVITAS KORAN LOKAL DALAM LIPUTAN BERITA PEMILUKADA (Analisis Isi Berita Kampanye Pemilu DKI Jakarta pada Surat Kabar Harian Pos Kota dan Warta Kota Periode 24 Juni – 7 Juli 2012). Penelitian ini menggunakan analisis berita dengan menggunakan teori obyektivitas yang dikemukakan oleh Westerstahl. Populasi dari penelitian ini adalah semua berita mengenai pemilu yang terdapat di *Pos Kota* dan *Warta Kota*. Penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sample*, yakni menggunakan teknik *sensus*. Sedangkan, obyek penelitian ini adalah Berita Kampanye Pemilu DKI Jakarta pada Surat Kabar Harian Pos Kota dan Warta Kota Periode 24 Juni – 7 Juli 2012. Persamaan penelitian pada pengambilan media massa. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian tersebut adalah :

1. Tingkat obyektivitas yang dimiliki oleh koran *Pos Kota* masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai obyektivitas *Pos Kota* yang hanya 6.9. Aspek yang perlu untuk diperhatikan dari pemberitaan di *Pos Kota* adalah aspek keseimbangan berita yang hanya mendapatkan nilai sebesar 0.3.
2. Pasangan Fauzi Bowo dan Nacrowi Ramli cenderung “difavoritkan” oleh surat kabar *Pos Kota*. Hal ini terlihat dengan seringnya pasangan ini

diberitakan pada bagian headline Pos Kota dan dicitrakan positif dalam berita

3. Tingkat obyektivitas yang terdapat di koran Warta Kota juga rendah dengan mendapat nilai obyektivitas sebesar 6.9. Aspek yang perlu mendapatkan perhatian dari harian Warta Kota adalah aspek keseimbangan berita..
4. Harian Warta Kota juga cenderung memfavoritkan pasangan Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli. Kecenderungan ini terlihat dari seringnya pasangan ini diangkat dan dicitrkan positif dalam berita.

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dalam segi teori dan salah satu subjeknya. Objek atau unit analisisnya adalah berita mengenai pemilukada yang terdapat di Pos Kota dan Warta Kota.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Febri Kurniasih Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2010 dengan judul MEDIA DAN PENYAJIAN BERITA PEMBENTUKAN KABINET (Studi Analisis Isi Penyajian Berita Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II di Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode 11-31 Oktober 2009). Objek penelitian ini adalah Berita Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II. Sedangkan teori yang digunakan adalah analisis isidari Berelson dan Krippendorf. Dari hasil analisis isi pada Penyajian Berita Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II di Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode 11-31 Oktober 2009 maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada kategori frekuensi penyajian berita Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II berita surat kabar harian Kompas memberikan porsi yang lebih besar dari pada Republika, pada surat kabar harian Kompas terdapat 66 berita sedangkan Republika hanya terdapat 43 berita.
2. Untuk kategori topik berita /ragam isi penyajian berita Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II antara surat kabar Kompas dan Republika tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam penyajiannya sebab $X^2 < \text{nilai kritis}$ ($8,5 < 9,49$). Dari hal ini bisa dikatakan bahwa dalam menyusun dan menyajikan berita Kompas dan Republika masih berpihak pada suatu kepentingan yang dalam hal ini adalah kepentingan masyarakat. Betapapun idealnya sebuah penerbitan pers, tidak dapat hidup tanpa ditentukan oleh "hukum
3. Pada kategori sumber penyajian berita kedua surat kabar Kompas dan Republika mempunyai perbedaan yang signifikan. Untuk kategori sumber berita nilai $X^2 > \text{nilai kritis}$ ($8,41 > 7,82$).
4. Terdapat perbedaan yang signifikan terkait penempatan halaman berita. Pada kategori ini nilai $X^2 >$ dari nilai kritis ($4,31 > 3,84$). Dari hal ini terlihat bahwa Kompas dan Republika memandang bahwa berita Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II mempunyai nilai berita yang berbeda.

Pada penelitian ini sama-sama menggunakan surat kabar yaitu Kompas dan Republika akan tetapi terdapat perbedaan pada obyek dan pengambilan dua media massa Kompas dan Republika dan analisis isi yaitu dari Berelson dan Krippendorff.

F. Kerangka Teori

Suatu penelitian tentu memerlukan kejelasan landasan berpikir dalam memecahkan atau menganalisa suatu masalah. Untuk itu, perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah penelitian akan dianalisa. Peneliti akan menjabarkan teori antara lain Keberpihakan Media, Berita, dan Analisis Isi. Berikut penjabaran dari masing-masing teori yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini.

1. Keberpihakan Media

Keberpihakan media dalam memberitakan suatu kasus yang mencerminkan konflik merupakan hal yang perlu dihindari. Keberpihakan yang paling mendasar terhadap suatu objek adalah :

1. Perasaan mendukung (*favourable*) ataupun perasaan tidak mendukung (*unfavourable*) seperti yang diungkapkan Berkowitz (Rahayu, 2006:134). Lebih spesifik lagi adalah sikap berpihak sebagai derajat afeksi positif atau afeksi negatif terhadap objek psikologis (Rahayu,2006:134)
2. Dalam kegiatan jurnalistik keberpihakan media akan tampak untuk berpihak pada kecenderungan berafeksi positif, netral, dan negatif (Rahayu,2006:134). Keberpihakan positif berarti media memilih sikap mendukung (*favourable*). Sedangkan sikap negatif mencerminkan sikap tidak mendukung (*unfavourable*).
3. Berdasarkan gagasan jurnalisme profesional dalam pemberitaan konflik, media dituntut berada dalam situasi tengah antara pihak-pihak terlibat

konflik. Jelasnya, media dalam menjalankan peran idealnya terutama jurnalis dalam memberitakan konflik harus menjalankan tugas sesuai dengan pedoman profesional. Seperti yang diungkap Burns (Rahayu,2006:132) yaitu agar dapat menjaga sikap objektif, berimbang, akurat, dan benar sehingga dalam posisi independen.

Media massa sebagai penyampai pesan-pesan komunikasi biasa disebut dengan pers. Pers dalam arti sempit yaitu kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas adalah kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik. (Kusumaningrat, 2006:17).

Semua peristiwa dan permasalahan dapat menjadi berita setelah berita tersebut diangkat, diolah dan disajikan sebagai berita dalam media. Sedangkan berita dalam arti teknis jurnalistik adalah: “laporan tentang fakta atau ide yang termasa, yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca, entah karena ia luar biasa,entah karena pentingnya, atau akibatnya, entah pula karena ia mencakup segi-segi *human interest* seperti humor, emosi, dan ketegangan (Assegaf, 1982:24).

2. Berita

1. Definisi Berita

Berita berasal dari bahasa Sangsekerta, yakni Vrit yang dalam bahasa Inggris disebut *Write*, arti sebenarnya ialah ada atau terjadi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, “berita” berarti kabar atau warta,

sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia diperjelas menjadi “laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat”. Jadi berita dapat dikaitkan dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi.

Definisi berita menurut *The New Grolier Webster International Dictionary* yang dikutip kembali oleh Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat dalam buku ”Jurnalistik teori dan Praktek” menyebutkan bahwa berita adalah :

”(1) *Current information about something that has taken place, or about something not known before;* (2) *News is information as presented by a news media such as paper, radio, or television;* (3) *News is anything or anyone regarded by a news media as a subject worthy of treatment.* ((1) Informasi hangat tentang sesuatu yang telah terjadi, atau tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya; (2) Berita adalah informasi seperti yang disajikan oleh media semisal surat kabar, radio, atau televisi; (3) Berita adalah sesuatu atau seseorang yang dipandang oleh media merupakan subjek yang layak untuk diberitakan.” (Kusumaningrat, 2006:39).

Tidak semua peristiwa layak dijadikan berita atau layak untuk di jadikan sebuah konsumsi publik ada indikator-indikator dimana sebuah peristiwa layak untuk di beritakan, kelayakan sebuah peristiwa menjadi sebuah berita disebut (*news worthiness*). Sedangkan indikator-indikator untuk mengukur kelayakan sebuah peristiwa menjadi sebuah berita disebut nilai berita (*news value*).

2. Nilai Berita

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat dalam buku ”Jurnalistik teori dan Praktek” menyebutkan bahwa nilai berita antara lain :

1. Aktualitas (Timeliness). Semakin aktual berita, artinya semakin baru peristiwanya terjadi, semakin tinggi nilai beritanya. Tetapi adakalanya juga penemuan suatu peristiwa penting atau menarik yang usianya sudah bertahun-tahun dapat langsung menjadi berita utama. Dalam hal seperti ini kecepatan adalah dalam hal penyingkapannya.
2. Kedekatan (Proximity). Peristiwa yang mengandung unsur kedekatan dengan pembaca, akan menarik perhatian. Kian dekat dengan pembaca, kian menarik berita itu.
3. Keterkenalan (Prominence). Kejadian yang menyangkut tokoh terkenal akan menarik banyak pembaca. Nama-nama terkenal ini tidak harus diartikan orang saja. Tempat-tempat terkenal dan situasi-situasi terkenal juga memiliki nilai berita yang tinggi.
4. Dampak (Consequence). Peristiwa yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat, misalnya pengumuman kenaikan harga BBM atau ilmuwan yang mengembangkan suatu vaksin baru, memiliki nilai berita tinggi.
5. Human Interest. Berita yang memiliki daya tarik secara universal yang menarik minat orang memiliki nilai berita tinggi. Beberapa unsur human interest misalnya ketegangan, ketidaklaziman, minat pribadi, konflik, simpati, kemajuan, seks, usia, hewan, dan humor.

3. Penempatan Berita

Penempatan berita menurut Eriyanto (2013: 226), didefinisikan sebagai dimana letak berita dalam halaman surat kabar yaitu:

1. *Headline*/Berita Utama. Posisi atau letak berita berada di halaman depan dan berada di posisi utama (headline). Headline umumnya ditulis dengan huruf lebih besar di bagian depan surat kabar dan panjang berita lebih besar.
2. Halaman Depan, tidak headline. Posisi atau letak berita di halaman depan tetapi tidak berada di posisi berita utama (headline)
3. Halaman Belakang. Berita ditempatkan di halaman belakang surat kabar. Misalnya, jika surat kabar terdiri dari 24 halaman, beita ditempatkan di halaman 24
4. Halaman Dalam. Posisi/letak berita di halaman dalam surat surat kabar (di luar halaman 1 dan halaman belakang surat kabar)
5. Halaman Khusus (Suplemen). Posisi/letak berita di halaman khusus (Suplemen) surat kabar. Ini adalah halaman khusus yang disediakan oleh surat kabar dalam liputan.

4. Narasumber Berita

Bagian terpenting dari wawancara adalah narasumber. Narasumber yang paling baik adalah seorang yang

berpengetahuan dalam sesuatu bidang dan yang mengetahui apa yang sedang terjadi sebenarnya. Macam-macam narasumber menurut (Kusumaningrat, 2006: 250) yaitu :

1. Ilmuwan. Ilmuwan dianggap sebagai narasumber paling sensitif diantara narasumber lainnya dalam hal memberikan keterangan kepada pihak-pihak lain di luar disiplin ilmunya. Para ilmuwan, sama seperti juga wartawan, sama mengejar kebenaran. Ilmuwan mengejar kebenaran baru, yang belum ditemukan, dan mempunyai kepentingan dalam menyampaikan kebenaran baru yang ditemukan dengan sikap sangat saksama dan korek.
2. Birokrat. Dari sudut pandang wartawan, seorang birokrat adalah orang yang untuk melaksanakan tugas-tugasnya harus memperoleh kerjasama dari publik dalam hal ini memperoleh kerjasama dari publik dan dalam hal ini memperoleh kerjasama melalui media. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang menjadi bagian sebuah institusi dan memiliki kompetensi untuk menjelaskan apa yang tengah terjadi terkait hal yang dinaungi oleh institusi tersebut seperti Dinas Pendapatan Pajak untuk soal pajak, atau pemerintah daerah dalam soal pemilihan kepala daerah.
3. Politisi. Politisi memiliki motivasi yang sedikit berbeda dalam mencari perhatian publik melalui media. Seorang politisi adalah seorang yang berusaha meniti tangga kepemimpinan institusi sosial atau mengubah institusi. Politisi berusaha “menggerakkan” segala

sesuatu (birokrat berusaha melaksanakan sesuatu yang sudah tetap).

4. Anggota yang tidak puas. Anggota yang tidak puas dalam sebuah organisasi merupakan narasumber yang seringkali digunakan dalam reportase investigatif. Tetapi, sumber-sumber semacam itu penting juga dalam reportase interpretatif karena mereka memberikan pandangan tentang kelemahan-kelemahan institusi yang tidak mungkin diperoleh dengan cara lain.
5. Pengejar Publisitas. Ementara narasumber juga bisa jadi merupakan pengejar publisitas – *publicity seeker*. Mereka seringkali memburu ruangan-ruangan redaksi surat kabar. Mereka jarang memberikan sumbangan pada interpretasi yang tajam tentang suatu isu, tetapi informasinya bermanfaat.
6. Pejabat Humas. Bagi seorang wartawan interpretatif, sumber resmi yang bernama pejabat humas (hubungan masyarakat) amat penting. Pejabat humas merupakan narasumber yang dapat membawa kenarasumber-narasumber lain. Ia juga dapat memberikan informasi serta merespon interpretasi tentang isu-isu tertentu dengan pemahaman mendalam.

5. Asal Berita

Asal berita menurut Eriyanto (2013: 226), merujuk kepada dari mana berita ini didapat oleh wartawan, apakah dari liputan langsung ataukah dari sumber lain. Penjelasannya sebagai berikut :

1. Liputan wartawan surat kabar. Berita didapatkan dari liputan langsung wartawan (liputan, wawancara)
2. Kantor berita Indonesia. Berita didapatkan dari Kantor berita Indonesia.
3. Kantor berita Asing. Berita didapatkan dari kantor berita luar negeri.
4. Mengutip media dari Indonesia. Berita mengutip dari berita lain, baik surat kabar, radio, televisi ataupun dotcom.
5. Mengutip media Asing. Berita mengutip berita dari media lain, baik surat kabar, radio, televise ataupun dotcom.
6. Lainnya. Asal berita tidak dapat diidentifikasi secara jelas, atau diluar yang telah disebut diatas.

3. Analisis Isi

Menurut Eriyanto (2013: 15) Analisis isi didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi, serta ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak.

Menurut Holsti (dalam Eriyanto,2013: 33) terdapat 4 (empat) desain analisis isi yang umumnya dipakai untuk **:Pertama**, analisis isi yang dipakai untuk menggambarkan pesan dari sumber yang sama tetapi dalam waktu yang berbeda. Biasanya dipakai untuk mengetahui kecenderungan tren dari suatu pesan komunikasi dengan

perbandingan waktu. Contoh, mengetahui tren iklan di televisi anak-anak dari decade ke decade, seperti yang dilakukan Alexander *et al* (1998).

Kedua, analisis isi dipakai untuk melihat pesan pada situasi yang berbeda. Situasi yang berbeda dapat diartikan sebagai perbedaan konteks budaya, sosial dan politik. Secara singkat, Analisis isi yang mendapat sumber data (pesan) yang sama, akan tetapi dalam konteks yang berbeda. Dalam karakteristik kali ini, penelitian biasanya melakukan perbandingan isi pesan dari konteks-konteks tersebut. Contoh, penelitian dari Ji and McNeal (2001) tentang iklan anak-anak di Amerika dan Cina.

Ketiga, analisis Isi dipakai untuk melihat pesan pada khalayak yang berbeda. Pengertian khalayak di sini dapat diartikan sebagai pembaca atau penonton media yang mempunyai karakter berbeda. Desain memasukan pesan dari sumber yang sama (satu), akan tetapi untuk pemirsa yang berbeda. Contoh, penelitian Kolbe dan Albanese (1996) tentang bagaimana tampilan iklan laki-laki dalam majalah dengan segmen yang berbeda.

Keempat, analisis isi dipakai untuk melihat pesan dari komunikator yang berbeda. Penelitian disain ini ingin melihat kasus yang sama dan bagaimana komunikator yang berbeda akan menghasilkan isi (konten) yang berbeda dari kasus yang sama akan tetapi hal yang paling penting dalam analisis isi adalah mengetahui pendekatan yang digunakan.

G. Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian menggunakan metode analisis isi kuantitatif, selalu dibutuhkan hipotesis penelitian yang akan dibuktikan

melalui analisis data nantinya. Hipotesis yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah :

Kecenderungan Penyajian Berita

Ho : Berita di surat kabar Kompas cenderung memihak DPRD DKI Jakarta.

H1 : Berita di surat kabar Kompas cenderung memihak Gubernur DKI Jakarta (Ahok).

H. Metodologi Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau tata cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Mengacu pada penjelasan tersebut maka, metodologi dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang paradigma penelitian hingga analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis isi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis isi kuantitatif adalah analisis yang dipakai untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari berita yang dilakukan peneliti secara kuantitatif. Prosedurnya yaitu dengan jalan mengukur atau menghitung aspek dari berita itu dan menyajikannya secara kuantitatif (Eriyanto, 2011:412). Peneliti ingin mengetahui apakah ada kecenderungan penyajian berita Ahok Vs DPRD dalam Kisruh Anggaran Siluman APBD DKI Jakarta di surat kabar harian Kompas periode 1-30Maret 2015. Eriyanto (2011:412) menjelaskan bahwa penelitian

menggunakan metode ini hanya memfokuskan pada bahan yang tersurat saja. Peneliti hanya meng-*coding* (memberi tanda) apa yang dilihat.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam analisis penelitian kali ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder merupakan informasi yang telah dikumpulkan pihak lain. Data primer didapat dari Observasi dan Dokumentasi berita Ahok Vs DPRD dalam Kisruh Anggaran Siluman APBD DKI Jakarta di surat kabar harian Kompas periode 1-30 Maret 2015. Sedangkan data sekunder didapat dari Sumber-sumber lain yang menjadi referensi sekunder bagi penelitian ini antara lain buku referensi, surat kabar, laporan atau jurnal yang dinilai relevan dengan objek kajian yang akan diangkat oleh peneliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Metode ini adalah instrumen pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data.

1. Observasi data, dengan melihat pemberitaan yang dikaji dengan cermat dan teliti.

2. Dokumentasi mengambil gambar-gambar atau bentuk dan isi berita yang dirasa perlu. Karena objek dari penelitian kali ini adalah berita di media massa (cetak), maka beberapa berita digunakan sebagai data utama.

3. Unit Analisis

Unit analisis didefinisikan sebagai apa yang diobservasi, dicatat, dan dianggap sebagai data, memisahkan menurut batas-batasnya dan mengidentifikasi untuk analisis berikutnya (Krippendorff dalam Eriyanto, 2011:59). Secara sederhana menurut Eriyanto (2011:59), unit analisis dapat digambarkan sebagai bagian apa dari isi yang kita teliti dan kita pakai untuk menyimpulkan isi dari suatu teks. Bagian dari isi ini dapat berupa kata, kalimat, foto, *scene* (potongan adegan), paragraf.

Unit analisis yang dipakai dalam penelitian ini dibuat berdasarkan panduan dari buku Analisis Isi milik Eriyanto (2011). Peneliti memilih menggunakan teknik unit analisis isi tersebut karena mempunyai kelebihan selain merupakan unit analisis yang paling umum dipakai, juga keduanya mempunyai tingkat produktivitas (analisis yang dapat menjawab tujuan dan punya potensi menghasilkan temuan menarik) yang tinggi (Eriyanto, 2011:99). Sedangkan kelemahannya adalah, keduanya mempunyai tingkat reliabilitas yang rendah, yakni kemungkinan perbedaan pemahaman antara peneliti dengan peng-coder cukup tinggi sehingga diperlukan pembuatan unit

analisis yang cermat dan terperinci. Kelemahan inidapat diatasi dengan pembuatan unit analisis dengan terperinci sehingga lembar coding yang digunakan mempunyai reliabilitas tinggi. Untuk membuktikan reliabilitas tersebut dilakukan menggunakan uji reliabilitas menggunakan rumus statistik.

Unit analisis dan kategorisasi diturunkan dari landasan teori yang dipakai. Landasan teori yang mendasari pembentukan unit analisis ini adalah analisis isi berita surat kabar dari Eriyanto. Berikut ini adalah unit analisis dan kategorisasi yang peneliti susun untuk penelitian ini :

Tabel 1:
Unit analisis dan kategorisasi analisis isi.

Unit Analisis	Kategorisasi
Topik Berita	Pengadaan alat UPS
	Pengadaan trilogy buku Ahok
	Pengadaan Elektronik (E-Budgeting)
	Pengadaan AC Blok B BLUD RS Tarakan
	Kegiatan Baru berdasarkan sekretariat DPRD
	Anggara pemakaman Jaktim
	Anggaran rehab Sekolah
	Anggaran rehab kantor lurah Jaktim
	Komentar/tanggapan
	Lainya
Sumber Berita	DPRD DKI Jakarta

	Pemerintah DKI Jakarta
	Masyarakat
	Politisi
	Penegak Hukum
	Mahasiswa/Intelektual
Penempatan Berita	<i>Headline</i>
	Halaman depan, tidak <i>headline</i>
	Halaman belakang
	Halaman dalam
	Halaman Khusus (Suplemen)
Asal Berita	Keterangan Pers
	Liputan Langsung
	Mengutip media lain
	Lainnya
Penggambaran Berita	
Unit Analisis	Kategorisasi
Penggambaran Ahok	Positif
	Negatif
	Netral
	Tidak ada
Penggambaran DPRD	Positif
	Negatif
	Netral
	Tidak ada
Penggambaran Dana Siluman APBD DKI Jakarta	Positif
	Negatif
	Netral
	Tidak ada

(Sumber : olahan peneliti)

4. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan cara mengukur variabel. Dengan kata lain adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur variabel. Perincian kategori dan variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ragam isi penyajian/ topik berita dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Pengadaan alat UPS.
 - b. Pengadaan trilogy buku Ahok
 - c. Pengadaan Elektronik (E-Budgeting)
 - d. Pengadaan AC Blok B BLUD RS Tarakan
 - e. Kegiatan Baru berdasarkan sekretariat DPRD
 - f. Anggaran pemakaman Jaktim
 - g. Anggaran rehab kantor lurah Kayu Manis Jaktim
 - h. Anggaran rehab kantor lurah kelurahan Lubang Buaya kecamatan Cipayung Jaktim
- b. Sumber Penyajian Berita :

Sumber berita adalah sesuatu yang melahirkan berita. Sesuatu itu bisamanusia, tempat. Pihak atau orang yang dijadikan nama sumber dalam sebuah berita, terbagi dalam kategori:

- a. Birokrat adalah pegawai pemerintah. Yang termasuk dalam kategori ini misalnya adalah Pemerintah DKI Jakarta dan penegak hukum.
- b. Politisi adalah kelompok sosial yang mempunyai kemampuan dalam mempengaruhi pengambilan kebijaksanaan negara seperti DPRD, PARPOL
- c. Masyarakat/Intelektual adalah warga negara yang punya pengetahuan secara akademis atau non akademis seperti LSM, akademis, aktivis, sejarawan, tokoh agama, peneliti.
- d. Penempatan halaman.

Penempatan berita oleh surat kabar bisa menjadi indikator terhadap nilai suatu berita dan juga faktor pendukung penting tidaknya berita itu bagi khalayak pembaca. Dalam penelitian ini penempatan berita dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. Halaman depan (*headline*/tidak *headline*).

Jika obyek beritanya diletakkan pada halaman muka/halaman utama yang memiliki nilai dan kapasitas yang lebih tinggi di bandingkan halaman lainnya.

- b. Halaman dalam.

Jika berita diletakkan pada halaman dalam dan halaman khusus

- c. Halaman belakang.

Berita diletakkan pada bagian belakang atau halaman terakhir

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Sebelum analisis dilakukan, data yang sudah terkumpul dalam bentuk lembar coding (*coding sheet*) harus direkap untuk memudahkan pembacaan data dan analisisnya. Rekapitulasi data tersebut diinput kedalam software SPSS (*Statistical Package for Social Science*) ataupun diinput dalam format *Microsoft Word dan Excell*. Pertama, peneliti akan melakukan uji reliabilitas dengan rumus yang dipopulerkan oleh R. Holsti (1969). Reliabilitas ditunjukkan dalam persentase persetujuan berapa besar presentase persamaan antar-coder ketika menilai suatu isi (Holsti dalam Eriyanto, 2011:290). Rumusnya adalah :

$$\text{Reliabilitas Antar - Coder} = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Dimana M adalah jumlah *coding* yang sama (disetujui oleh masing-masing *coder*), N1 adalah jumlah *coding* yang dibuat oleh *coder* 1, N2 adalah jumlah *coding* yang dibuat oleh *coder* 2. Eriyanto(2011 : 290) menambahkan bahwa reliabilitas bergerak antara 0–1. Dalam formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70 %. Jika hasil perhitungan menunjukkan angka reliabilitas diatas 0,7, berarti alat ukur ini benar-benar reliabel. Tetapi, jika dibawah 0,7, berarti *coding sheet* (alat ukur) belum reliabel.

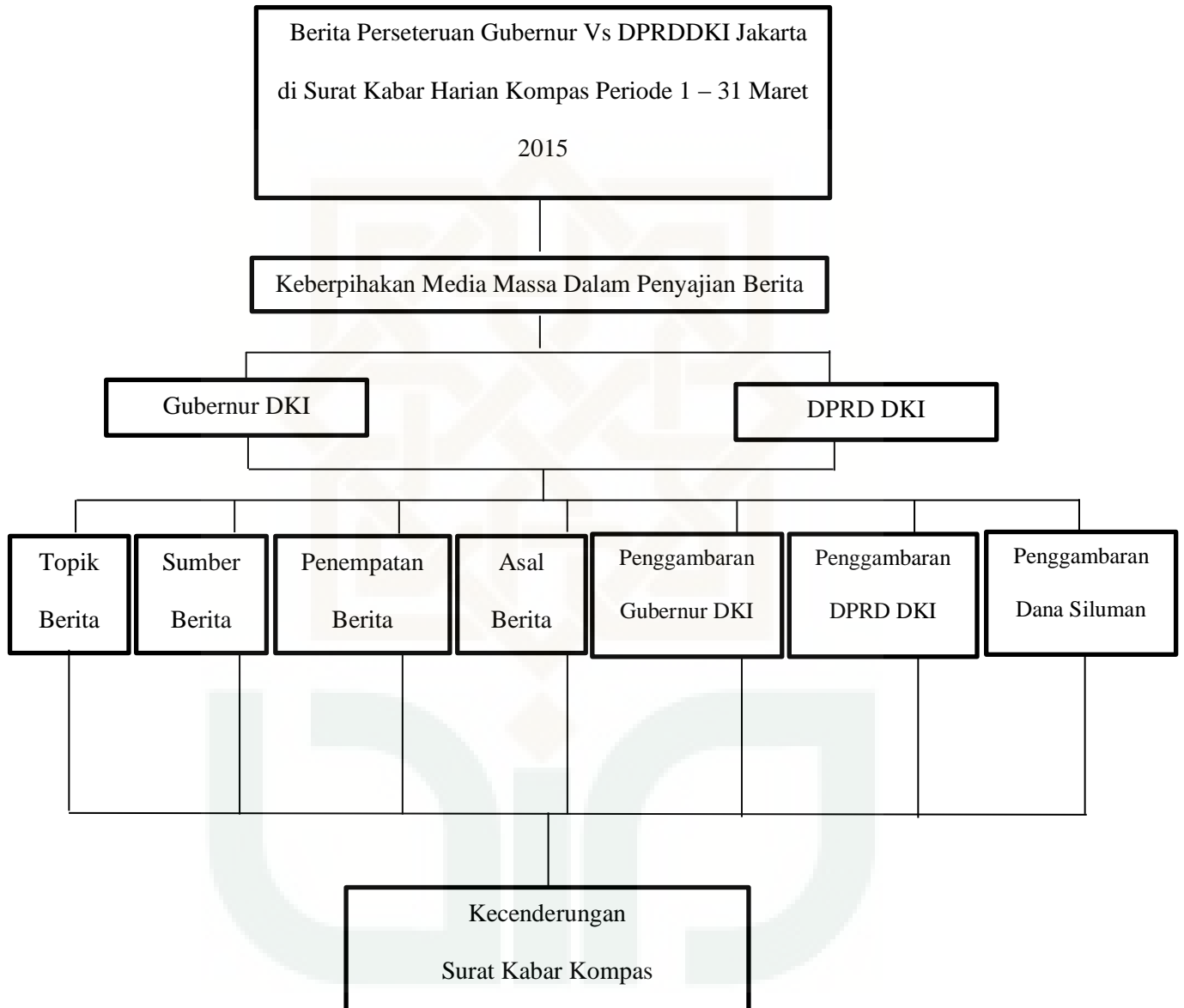
Tahap awal analisis data adalah mendeskripsikan temuan menggunakan statistik deskriptif. Disebut statistik deskriptif karena statistik ini bertujuan mendeskripsikan dan menjabarkan temuan dan data yang didapat dari analisis isi (Eriyanto, 2011:306). Kemudian, data yang ada dibuat menjadi bentuk tabel frekuensi. Peneliti menggunakan tabel frekuensi biasa untuk memaparkan hasil datanya. Masing-masing unit analisis mempunyai satu tabel frekuensi yang dibuat visualisasinya dalam bentuk grafik. Peneliti menggunakan jenis grafik batang dan diagram lingkaran.

Selanjutnya, data yang sudah tersaji akan dihitung kembali untuk menguji hipotesis H_0 dan H_1 . Peneliti akan menggunakan teknik perhitungan *Chi Square* (Chi Kuadrat). Rumusnya adalah :

$$X^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

Dimana X^2 adalah *chi square*, O adalah frekuensi observasi, dan E adalah frekuensi harapan. Perhitungan ini bisa dilakukan secara manual, namun jauh lebih mudah menggunakan program computer SPSS yang banyak beredar di Indonesia. Jika hasil perhitungan $> 0,05$, maka H_0 ditolak, sementara jika $< 0,05$, maka H_1 yang ditolak

I. Kerangka Pemikiran Penelitian



(Sumber : Olahan Peneliti)

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Melalui penggambaran dan pendeskripsian penelitian serta perhitungan *chi kuadrat* diperoleh hasil bahwa :

1. Berita di surat kabar harian Kompas cenderung memihak Gubernur DKI Jakarta (Ahok) dalam kasus Anggaran Siluman selama periode 1 – 31 maret 2015. Dengan demikian, hipotesis H_0 (Berita di surat kabar harian Kompas cenderung memihak DPRD DKI) ditolak dan H_1 (Berita di surat kabar harian Kompas cenderung memihak Gubernur DKI) diterima. Keberpilihan Surat Kabar Kompas (memihak Gubernur DKI) tersebut terwujud dalam tujuh unit yang terdapat dalam berita, antara lain : ‘Topik Berita’, ‘Sumber Berita’, ‘Penempatan Berita’, ‘Asal Berita’, ‘Penggambaran Ahok’, ‘Penggambaran DPRD’, dan ‘Penggambaran Dana Siluman APBD DKI Jakarta’. Keseluruhan unit analisis tersebut mempunyai angka reliabilitas yang memadai dengan nilai paling rendah berada pada angka 0,7647 dan nilai paling tinggi mencapai angka 0,9411.
2. Dari ketujuh unit analisis yang digunakan, terdapat 6 (enam) unit analisis yang memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai obyektifikasi dari Keberpilihan penyajian berita, yakni, *pertama*, ‘Topik Berita’ dengan perolehan angka yang paling tinggi ada pada kategorisasi satu (Pengadaan alat UPS) sebanyak 34 %, kemudian disusul komentar/tanggapan sebanyak

22 %, kemudian topik mengenai kegiatan baru berdasarkan sekretariat DPRD 19 %, kemudian topik berita mengenai pengadaan elektronik (e-budgeting) 6 %, kemudian topik berita mengenai anggaran rehab sekolah dengan jumlah 6 % dan urutan terakhir topik berita (lainnya) sebesar 3 %.

Kedua, adalah unit analisis ‘Sumber Berita’ dari perolehan jumlah sumber tertinggi yaitu dari ‘Pemerintah DKI Jakarta’ dengan persentase 22 %. Disusul kemudian sumber dari ‘Mahasiswa atau intelektual’ sebesar 19 %, lalu diikuti oleh sumber – sumber berita dari ‘Politisi’ sebanyak 18 %, disusul oleh sumber berita dari ‘masyarakat’ dan sumber dari ‘Penegak Hukum’ dengan perolehan hasil yang sama yaitu dengan persentase 14 %.

Ketiga, unit analisis ‘Penempatan Berita’ sebagian besar ada di halaman belakang dengan perolehan angka 75 %. Sedangkan pada halaman depan tidak *headline* mendapat jumlah sebesar 23 %, disusul kemudian penempatan berita di halaman depan (*headline*) ada 4 % dari keseluruhan berita yang berjumlah 34 berita.

Keempat, unit analisis ‘Penggambaran Gubernur DKI Jakarta’, dengan kategorisasi positif memperoleh persentase tertinggi sebesar 52 %, kemudian kategorisasi negatif sebesar 5 % dan disusul oleh penggambaran ntral dan penggambaran tidak ada dengan perolehan jumlah yang sama yaitu sebesar 22 %.

Kelima, unit analisis ‘Penggambaran DPRD DKI Jakarta’ dengan penggambaran positif sebesar 11%. Kemudian penggambaran negatif dengan perolehan jumlah terbesar dengan 38 %, selanjutnya penggambaran netral dengan persentase sebesar 20 %, lalu yang terakhir penggambaran tidak ada mendapat 32%. Dan

keenam, unit analisis ‘Penggambaran Dana Siluman’ dengan tidak ada penggambaran positif 0 %, kemudian penggambaran negatif sebesar 70 %, penggambaran netral sebanyak 8 %, yang terakhir penggambaran tidak ada dengan jumlah 24%.

3. Sedangkan unit analisis ‘Asal Berita’ dari keterangan pers memperoleh jumlah 15 poin (15 %), liputan langsung menduduki angka paling banyak 78 poin (76%), mengutip media lainya mendapat 36 poin (6 %) dan kategorisasi keempat yakni asal berita dari lainnya mendapat porsi terendah yakni 3 poin (4 %). Perhitungan ini memperoleh hasil bahwa tidak terdapat kecenderungan pemberitaan surat kabar Kompas dalam hal asal berita. Surat Kabar Kompas sebagian besar berita berasal dari liputan langsung oleh wartawan, artinya surat kabar Kompas dalam penyusunan berita ini selalu menerbitkan langsung wartawanya ke lapangan. Peneliti dan pengcoder mengamati bahwa asal berita dari liputan langsung tidak menunjukkan kecenderungan dalam hal pemberitaan. Dalam kategorisasi Keterangan pers, liputan langsung, mengutip media lainya tidak ada berita (kutipan berita) yang menunjukkan kecenderungan. Peneliti melihat bahwa dalam hal ini (asal berita) surat kabar Kompas dalam pemberitaan persetujuan gubernur dengan DPRD DKI Jakarta menunjukkan ketidak kecenderungan (netral).

B. SARAN

Setelah melalui hasil perhitungan dan proses pendeskripsian yang terperinci, peneliti menemukan hal – hal yang patut digaris bawahi, antara lain :

1. Dari hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa surat kabar Kompas harus dapat menjaga netralitas dalam pemberitaannya. Dalam hal ini, dalam melakukan peliputan berita dengan mencoba untuk tidak berpihak dan cenderung kepada pihak tertentu. *Check and recheck* serta menggali sisi – sisi lain dari sebuah berita seharusnya menjadi prioritas utama dari sebuah media.
2. Bagi pengelola surat kabar Kompas harus lebih memperhatikan mengenai kualitas berita yang mereka terbitkan. Hal ini khususnya terkait dengan masalah netralitas berita yang masih perlu lebih ditingkatkan lagi. Netralitas atau keseimbangan berita ini penting agar media tidak digunakan sebagai salah satu “corong” dari pihak tertentu untuk mempengaruhi masyarakat yang pada akhirnya malah akan merugikan media yang bersangkutan dan tentunya masyarakat karena tidak mendapatkan informasi yang relevan.
3. Pemerintah juga harus lebih mampu memberikan pengawasan dan tindakan hukum yang tegas terhadap media massa yang ada di Indonesia. Adanya hukum dan sanksi yang sesuai akan memberikan jaminan kepada media maupun masyarakat sehingga akan dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Al-Quran Digital Versi 2. 2004.

Buku

Abrar A Nadya. 1992. *Berjuang Menghadapi Perkembangan Massa*, Yogyakarta: Liberty.

_____. 2005. *Penulisan Berita*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.

Assegaf, Djafar. *Jurnalistik Massa Kini Pengantar Kewartawanan*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.

Eriyanto. 2011. *Analisis Isi : Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu – Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

_____. 2013. *Analisis Isi, Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta :Lkis

Hamad, Ibnu (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa (Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik)*. Jakarta: Granit.

Harris, Julian; Leiter, B.Kelly & Johnson, Stanley. 1985. *The Complete Reporter*. London: Macmillan Publishing Company.

Kusumaningrat, Hikmat & Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik: Teori dan Praktek*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.

Oetama, Jakob (2001). *Pers Indonesia (Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus)*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Reah, Danuta. 1993. *The Language of Newspaper*. London: Routledge.

Rahayu. 2006. Potret Pofesionalisme dan Kualitas Pemberitaan Surat Kabar Indonesia. dalam Rahayu (ed.). *Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia*. Pusat Kajian Media dan Budaya Populer, Dewan Pers dan Departemen Komunikasi dan Informasi.

Rakhmat, Jalaluddin. 2011. *Psikologi Komunikasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Skripsi

Suryani, Irma. 2014. *Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nilai Profetik Dalam Media Massa (Analisis Isi Opini Harian Republika Periode Ramadhan 1434 H)*

Kusuma W, Maya. 2013. *Skripsi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Objektivitas Koran Lokal Dalam Liputan Berita Pemilukada (Analisis Isi Berita Kampanye Pemilukada DKI Jakarta pada Surat Kabar Harian Pos Kota dan Warta Kota Periode 24 Juni – 7 Juli 2012).*

Kurniasih, Febri. 2010. *Skripsi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta. Media Dan Penyajian Berita Pembentukan Kabinet (Studi Analisis Isi Penyajian Berita Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II di Surat Kabar Harian Kompas dan Republika Periode 11-31 Oktober 2009)*

Website :

<http://pindai.org>,(diakses tanggal 10 April 2015, pukul 19.20)

<http://epaper.kompas.com> (diakses pada 1 - 31 Maret 2015, pukul 09.00 WIB).



LAMPIRAN

LEMBAR CODING

KEBERPIHAKAN MEDIA MASSA DALAM PENYAJIAN BERITA

(Analisis Isi Berita Persetujuan Gubernur Vs DPRD DKI Jakarta

di Surat Kabar Harian Kompas Periode 1 – 31 Maret 2015)

Nomor Coding :

Nomor Identitas Coder :

Edisi / Hari / Tanggal :

Halaman :

Judul Berita :

1. Penempatan Berita

1 = Headline

4 = Halaman Dalam

2 = Halaman Depan, Tidak Headline
(Suplemen)

5 = Halaman Khusus

3 = Halaman Belakang

2. Asal Berita

1 = Keterangan Pers

3 = Mengutip Media Lain

2 = Liputan Langsung

4 = Lainnya

3. Topik Berita

1 = Pengadaan Alat UPS

2 = Pengadaan Trilogy Buku Ahok

3 = Pengadaan Elektronik (E-Budgeting)

4 = Pengadaan AC Blok Blok B BLUD RS Tarakan

5 = Kegiatan Baru berdasarkan sekretariat DPRD

6 = Anggaran pemakaman Jaktim

7 = Anggaran rehab kantor lurah Kayu Manis Jaktim

8 = Anggaran rehab kantor lurah kelurahan Lubang Buaya

9 = Komentar/tanggapan

10 = Lainnya

4. Sumber Berita

1 = DPRD DKI Jakarta

2 = Pemerintah DKI Jakarta

3 = Masyarakat

4 = Politisi

5 = Penegak Hukum

6 = Mahasiswa/Intelektual

5. Penggambaran Ahok

1 = Positif

3 = Positif dan Negatif

2 = Negatif

4 = Tidak ada

6. Penggambaran DPRD DKI

1 = Positif

3 = Positif dan Negatif

2 = Negatif

4 = Tidak ada

7. Penggambaran Dana Siluman APBD DKI

1 = Positif

3 = Positif dan Negatif

2 = Negatif

4 = Tidak ada

HASIL CODING

Unit Analisis 1. Topik Berita

No.	Tanggal / Berita	Peneliti	N1	N2
1.	(1 Maret 2015) Basuki Tidak Bisa Dimakzulkan Jika Benar	1	1	1
2.	(2 Maret 2015) Dugaan Anggaran Menguat	1	1	1
3.	(3 Maret 2015) Anggaran Untuk Pemindai di Sekolah Rp 3 Miliar	1	1	1
4.	(4 Maret 2015) Evaluasi APBD DKI Sudah Tuntas	5	5	3
5.	(4 Maret 2015) Anggaran Dinas Pendidikan Paling Rawan	9	9	9
6.	(5 Maret 2015) Mendagri Segera tetapkan APBD DKI	1	1	1
7.	(6 Maret 2015) Badai Kisruh Belum Berlalu	3	1	3
8.	(6 Maret 2015) Rehab Sekolah Masih Terhambat	7	7	7
9.	(7 Maret 2015) Program Tersendat, Persiapan Ujian Terusik	1	1	1
10.	(8 Maret 2015) Kedepankan Kepentingan Rakyat Jakarta	3	3	3
11.	(10 Maret 2015) Hak Publik Untuk Tahu dan Ikut Andil Perangi Penyelewengan	5	5	5
12.	(10 Maret 2015) ICW Temukan 454 Paket Kegiatan Mencurigakan	1	1	1
13.	(11 Maret 2015) Indikasi Penggelembungan Anggaran Ditemukan	9	9	9
14.	(12 Maret 2015) Beberapa Mata Anggaran Dikoreksi	3	3	3
15.	(13 Maret 2015) Manfaatkan Tenggat Tujuh Hari	1	1	1
16.	(16 Maret 2015) Kasus UPS “Menyetrum” Begal Anggaran di Jakarta	1	1	1
17.	(17 Maret 2015) Oknum PNS Diyakini Susupkan Anggaran	9	9	9
18.	(18 Maret 2015) Kisruh UPS	9	1	9
19.	(18 Maret 2015) Rapat Tertunda, Waktu Kian Sempit	5	5	5

20.	(19 Maret 2015) Langkah Maju Pembahasan Anggaran	1	1	3
21.	(19 Maret 2015) Energi Untuk Mengawal Anggaran Publik	5	5	3
22.	(20 Maret 2015) Kepercayaan Publik Terhadap Gubernur Lebih Besar	10	10	9
23.	(20 Maret 2015) Tim Anggaran Kejar Target	3	3	3
24.	(20 Maret 2015) Guru Terpaksa Talangi Operasional	7	7	7
25.	(23 Maret 2015) Tim Anggaran Siapkan Pergub	5	5	5
26.	(24 Maret 2015) Mediasi Buntu, APBD Mengacu Tahun 2014	5	5	5
27.	(25 Maret 2015) Dewan Lanjutkan Hak Angket	5	5	5
28.	(25 Maret 2015) Kesempatan Terakhir pun Kandas	9	9	9
29.	(26 Maret 2015) Pesan dibalik Kisruh APBD	9	9	10
30.	(27 Maret 2015) ICW Laporkan Kasus UPS 2014 ke KPK	1	1	1
31.	(28 Maret 2015) Basuki : Sejak Lama Anggaran DKI Dicuri	9	9	9
32.	(30 Maret 2015) APBD DKI Diharapkan Selesai Dua Pekan Lagi	3	3	3
33.	(31 Maret 2015) AU – ZS Diduga Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	1	1	1
34.	(31 Maret 2015) DKI Jamin Bantuan ke Wilayah Sekitar	9	9	9

$$CR1 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.32}{34 + 34}$$

$$= \frac{64}{68} = 0,9411$$

$$CR2 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.30}{34 + 34}$$

$$= \frac{60}{68} = 0,8823$$

Unit Analisis 2. Sumber Berita

No.	Tanggal / Berita	Peneliti	N1	N2
1.	(1 Maret 2015) Basuki Tidak Bisa Dimakzulkan Jika Benar	2	2	3
2.	(2 Maret 2015) Dugaan Anggaran Menguat	3	3	3
3.	(3 Maret 2015) Anggaran Untuk Pemindai di Sekolah Rp 3 Miliar	5	5	5
4.	(4 Maret 2015) Evaluasi APBD DKI Sudah Tuntas	6	6	6
5.	(4 Maret 2015) Anggaran Dinas Pendidikan Paling Rawan	6	4	6
6.	(5 Maret 2015) Mendagri Segera tetapkan APBD DKI	2	2	2
7.	(6 Maret 2015) Badai Kisruh Belum Berlalu	4	4	4
8.	(6 Maret 2015) Rehab Sekolah Masih Terhambat	6	6	6
9.	(7 Maret 2015) Program Tersendat, Persiapan Ujian Terusik	6	6	6
10.	(8 Maret 2015) Kedepankan Kepentingan Rakyat Jakarta	1	1	1
11.	(10 Maret 2015) Hak Publik Untuk Tahu dan Ikut Andil Perangi Penyelewengan	4	4	4
12.	(10 Maret 2015) ICW Temukan 454 Paket Kegiatan Mencurigakan	6	6	3
13.	(11 Maret 2015) Indikasi Penggelembungan Anggaran Ditemukan	5	5	5
14.	(12 Maret 2015) Beberapa Mata Anggaran Dikoreksi	6	6	6
15.	(13 Maret 2015) Manfaatkan Tenggat Tujuh Hari	2	2	2
16.	(16 Maret 2015) Kasus UPS “Menyetrum” Begal Anggaran di Jakarta	5	5	5
17.	(17 Maret 2015) Oknum PNS Diyakini Susupkan Anggaran	5	5	5
18.	(18 Maret 2015) Kisruh UPS	3	3	3
19.	(18 Maret 2015) Rapat Tertunda, Waktu Kian Sempit	2	2	2
20.	(19 Maret 2015) Langkah Maju Pembahasan Anggaran	1	1	1

21.	(19 Maret 2015) Energi Untuk Mengawal Anggaran Publik	2	2	2
22.	(20 Maret 2015) Kepercayaan Publik Terhadap Gubernur Lebih Besar	3	3	3
23.	(20 Maret 2015) Tim Anggaran Kejar Target	1	1	1
24.	(20 Maret 2015) Guru Terpaksa Talangi Operasional	6	6	6
25.	(23 Maret 2015) Tim Anggaran Siapkan Pergub	4	4	4
26.	(24 Maret 2015) Mediasi Buntu, APBD Mengacu Tahun 2014	4	4	4
27.	(25 Maret 2015) Dewan Lanjutkan Hak Angket	1	1	1
28.	(25 Maret 2015) Kesempatan Terakhir pun Kandas	4	4	1
29.	(26 Maret 2015) Pesan dibalik Kisruh APBD	2	4	4
30.	(27 Maret 2015) ICW Laporkan Kasus UPS 2014 ke KPK	3	3	3
31.	(28 Maret 2015) Basuki : Sejak Lama Anggaran DKI Dicuri	2	2	2
32.	(30 Maret 2015) APBD DKI Diharapkan Selesai Dua Pekan Lagi	2	4	2
33.	(31 Maret 2015) AU – ZS Diduga Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	5	5	5
34.	(31 Maret 2015) DKI Jamin Bantuan ke Wilayah Sekitar	2	2	3

$$CR1 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.31}{34 + 34}$$

$$= \frac{62}{68} = 0,9117$$

$$CR2 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.30}{34 + 34}$$

$$= \frac{60}{68} = 0,8823$$

Unit Analisis 3. Penempatan Berita

No.	Tanggal / Berita	Peneliti	N1	N2
1.	(1 Maret 2015) Basuki Tidak Bisa Dimakzulkan Jika Benar	2	2	2
2.	(2 Maret 2015) Dugaan Anggaran Menguat	1	2	2
3.	(3 Maret 2015) Anggaran Untuk Pemindai di Sekolah Rp 3 Miliar	2	2	2
4.	(4 Maret 2015) Evaluasi APBD DKI Sudah Tuntas	2	2	2
5.	(4 Maret 2015) Anggaran Dinas Pendidikan Paling Rawan	4	2	2
6.	(5 Maret 2015) Mendagri Segera tetapkan APBD DKI	1	1	1
7.	(6 Maret 2015) Badai Kisruh Belum Berlalu	4	4	4
8.	(6 Maret 2015) Rehab Sekolah Masih Terhambat	4	4	4
9.	(7 Maret 2015) Program Tersendat, Persiapan Ujian Terusik	2	2	2
10.	(8 Maret 2015) Kedepankan Kepentingan Rakyat Jakarta	4	4	2
11.	(10 Maret 2015) Hak Publik Untuk Tahu dan Ikut Andil Perangi Penyelewengan	4	4	4
12.	(10 Maret 2015) ICW Temukan 454 Paket Kegiatan Mencurigakan	4	4	4
13.	(11 Maret 2015) Indikasi Penggelembungan Anggaran Ditemukan	4	4	4
14.	(12 Maret 2015) Beberapa Mata Anggaran Dikoreksi	4	4	4
15.	(13 Maret 2015) Manfaatkan Tenggat Tujuh Hari	4	4	4
16.	(16 Maret 2015) Kasus UPS “Menyetrum” Begal Anggaran di Jakarta	4	4	4
17.	(17 Maret 2015) Oknum PNS Diyakini Susupkan Anggaran	4	4	4
18.	(18 Maret 2015) Kisruh UPS	4	4	4
19.	(18 Maret 2015) Rapat Tertunda, Waktu Kian Sempit	4	4	4
20.	(19 Maret 2015) Langkah Maju Pembahasan Anggaran	4	4	4

21.	(19 Maret 2015) Energi Untuk Mengawal Anggaran Publik	4	4	4
22.	(20 Maret 2015) Kepercayaan Publik Terhadap Gubernur Lebih Besar	4	4	4
23.	(20 Maret 2015) Tim Anggaran Kejar Target	4	4	4
24.	(20 Maret 2015) Guru Terpaksa Talangi Operasional	4	4	4
25.	(23 Maret 2015) Tim Anggaran Siapkan Pergub	4	4	4
26.	(24 Maret 2015) Mediasi Buntu, APBD Mengacu Tahun 2014	2	2	2
27.	(25 Maret 2015) Dewan Lanjutkan Hak Angket	4	4	4
28.	(25 Maret 2015) Kesempatan Terakhir pun Kandas	4	4	4
29.	(26 Maret 2015) Pesan dibalik Kisruh APBD	4	4	4
30.	(27 Maret 2015) ICW Laporkan Kasus UPS 2014 ke KPK	4	4	4
31.	(28 Maret 2015) Basuki : Sejak Lama Anggaran DKI Dicuri	4	4	4
32.	(30 Maret 2015) APBD DKI Diharapkan Selesai Dua Pekan Lagi	4	4	4
33.	(31 Maret 2015) AU – ZS Diduga Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	4	4	4
34.	(31 Maret 2015) DKI Jamin Bantuan ke Wilayah Sekitar	4	4	4

$$CR1 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.32}{34 + 34}$$

$$= \frac{64}{68} = 0,9411$$

$$CR2 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.31}{34 + 34}$$

$$= \frac{62}{68} = 0,9117$$

Unit Analisis 4. Asal Berita

No.	Tanggal / Berita	Peneliti	N1	N2
1.	(1 Maret 2015) Basuki Tidak Bisa Dimakzulkan Jika Benar	2	2	2
2.	(2 Maret 2015) Dugaan Anggaran Menguat	2	2	2
3.	(3 Maret 2015) Anggaran Untuk Pemindai di Sekolah Rp 3 Miliar	1	2	1
4.	(4 Maret 2015) Evaluasi APBD DKI Sudah Tuntas	2	2	2
5.	(4 Maret 2015) Anggaran Dinas Pendidikan Paling Rawan	1	2	2
6.	(5 Maret 2015) Mendagri Segera tetapkan APBD DKI	2	2	2
7.	(6 Maret 2015) Badai Kisruh Belum Berlalu	1	1	1
8.	(6 Maret 2015) Rehab Sekolah Masih Terhambat	2	2	2
9.	(7 Maret 2015) Program Tersendat, Persiapan Ujian Terusik	1	1	2
10.	(8 Maret 2015) Kedepankan Kepentingan Rakyat Jakarta	2	2	2
11.	(10 Maret 2015) Hak Publik Untuk Tahu dan Ikut Andil Perangi Penyelewengan	2	2	2
12.	(10 Maret 2015) ICW Temukan 454 Paket Kegiatan Mencurigakan	2	2	2
13.	(11 Maret 2015) Indikasi Penggelembungan Anggaran Ditemukan	2	2	2
14.	(12 Maret 2015) Beberapa Mata Anggaran Dikoreksi	2	2	2
15.	(13 Maret 2015) Manfaatkan Tenggat Tujuh Hari	2	2	2
16.	(16 Maret 2015) Kasus UPS “Menyetrum” Begal Anggaran di Jakarta	2	2	1
17.	(17 Maret 2015) Oknum PNS Diyakini Susupkan Anggaran	2	2	1
18.	(18 Maret 2015) Kisruh UPS	4	4	4
19.	(18 Maret 2015) Rapat Tertunda, Waktu Kian Sempit	2	2	2
20.	(19 Maret 2015) Langkah Maju Pembahasan Anggaran	1	2	1

21.	(19 Maret 2015) Energi Untuk Mengawal Anggaran Publik	2	2	2
22.	(20 Maret 2015) Kepercayaan Publik Terhadap Gubernur Lebih Besar	3	3	3
23.	(20 Maret 2015) Tim Anggaran Kejar Target	2	2	2
24.	(20 Maret 2015) Guru Terpaksa Talangi Operasional	2	2	2
25.	(23 Maret 2015) Tim Anggaran Siapkan Pergub	2	2	1
26.	(24 Maret 2015) Mediasi Buntu, APBD Mengacu Tahun 2014	2	2	2
27.	(25 Maret 2015) Dewan Lanjutkan Hak Angket	2	2	2
28.	(25 Maret 2015) Kesempatan Terakhir pun Kandas	1	2	1
29.	(26 Maret 2015) Pesan dibalik Kisruh APBD	2	2	2
30.	(27 Maret 2015) ICW Laporkan Kasus UPS 2014 ke KPK	3	3	2
31.	(28 Maret 2015) Basuki : Sejak Lama Anggaran DKI Dicuri	3	2	2
32.	(30 Maret 2015) APBD DKI Diharapkan Selesai Dua Pekan Lagi	2	2	2
33.	(31 Maret 2015) AU – ZS Diduga Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	2	2	2
34.	(31 Maret 2015) DKI Jamin Bantuan ke Wilayah Sekitar	2	2	2

$$CR1 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.29}{34 + 34}$$

$$= \frac{58}{68} = 0,8529$$

$$CR2 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.27}{34 + 34}$$

$$= \frac{54}{68} = 0,7951$$

Unit Analisis 5. Penggambaran Gubernur DKI Jakarta (Ahok)

No.	Tanggal / Berita	Peneliti	N1	N2
1.	(1 Maret 2015) Basuki Tidak Bisa Dimakzulkan Jika Benar	1	1	1
2.	(2 Maret 2015) Dugaan Anggaran Menguat	4	1	4
3.	(3 Maret 2015) Anggaran Untuk Pemindai di Sekolah Rp 3 Miliar	1	1	1
4.	(4 Maret 2015) Evaluasi APBD DKI Sudah Tuntas	3	3	3
5.	(4 Maret 2015) Anggaran Dinas Pendidikan Paling Rawan	1	1	1
6.	(5 Maret 2015) Mendagri Segera tetapkan APBD DKI	1	1	3
7.	(6 Maret 2015) Badai Kisruh Belum Berlalu	2	2	2
8.	(6 Maret 2015) Rehab Sekolah Masih Terhambat	1	4	1
9.	(7 Maret 2015) Program Tersendat, Persiapan Ujian Terusik	1	1	1
10.	(8 Maret 2015) Kedepankan Kepentingan Rakyat Jakarta	2	2	3
11.	(10 Maret 2015) Hak Publik Untuk Tahu dan Ikut Andil Perangi Penyelewengan	1	1	1
12.	(10 Maret 2015) ICW Temukan 454 Paket Kegiatan Mencurigakan	4	4	4
13.	(11 Maret 2015) Indikasi Penggelembungan Anggaran Ditemukan	3	3	3
14.	(12 Maret 2015) Beberapa Mata Anggaran Dikoreksi	4	4	4
15.	(13 Maret 2015) Manfaatkan Tenggat Tujuh Hari	1	1	1
16.	(16 Maret 2015) Kasus UPS “Menyetrum” Begal Anggaran di Jakarta	1	1	3
17.	(17 Maret 2015) Oknum PNS Diyakini Susupkan Anggaran	1	1	1
18.	(18 Maret 2015) Kisruh UPS	4	4	4
19.	(18 Maret 2015) Rapat Tertunda, Waktu Kian Sempit	1	1	3
20.	(19 Maret 2015) Langkah Maju Pembahasan Anggaran	4	3	4

21.	(19 Maret 2015) Energi Untuk Mengawal Anggaran Publik	1	1	1
22.	(20 Maret 2015) Kepercayaan Publik Terhadap Gubernur Lebih Besar	1	1	1
23.	(20 Maret 2015) Tim Anggaran Kejar Target	1	1	3
24.	(20 Maret 2015) Guru Terpaksa Talangi Operasional	4	4	4
25.	(23 Maret 2015) Tim Anggaran Siapkan Pergub	1	1	1
26.	(24 Maret 2015) Mediasi Buntu, APBD Mengacu Tahun 2014	3	3	3
27.	(25 Maret 2015) Dewa Lanjutkan Hak Angket	3	3	3
28.	(25 Maret 2015) Kesempatan Terakhir pun Kandas	1	3	1
29.	(26 Maret 2015) Pesan dibalik Kisruh APBD	4	4	3
30.	(27 Maret 2015) ICW Laporkan Kasus UPS 2014 ke KPK	1	1	1
31.	(28 Maret 2015) Basuki : Sejak Lama Anggaran DKI Dicuri	1	1	3
32.	(30 Maret 2015) APBD DKI Diharapkan Selesai Dua Pekan Lagi	4	4	4
33.	(31 Maret 2015) AU – ZS Diduga Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	1	1	1
34.	(31 Maret 2015) DKI Jamin Bantuan ke Wilayah Sekitar	1	1	3

$$CR1 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.30}{34 + 34}$$

$$= \frac{60}{68} = 0,8823$$

$$CR2 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.26}{34 + 34}$$

$$= \frac{52}{68} = 0,7647$$

Unit Analisis 6. Penggambaran DPRD DKI Jakarta

No.	Tanggal / Berita	Peneliti	N1	N2
1.	(1 Maret 2015) Basuki Tidak Bisa Dimakzulkan Jika Benar	2	2	2
2.	(2 Maret 2015) Dugaan Anggaran Menguat	2	2	2
3.	(3 Maret 2015) Anggaran Untuk Pemindai di Sekolah Rp 3 Miliar	4	4	4
4.	(4 Maret 2015) Evaluasi APBD DKI Sudah Tuntas	2	2	2
5.	(4 Maret 2015) Anggaran Dinas Pendidikan Paling Rawan	2	2	3
6.	(5 Maret 2015) Mendagri Segera tetapkan APBD DKI	3	3	3
7.	(6 Maret 2015) Badai Kisruh Belum Berlalu	1	1	1
8.	(6 Maret 2015) Rehab Sekolah Masih Terhambat	2	2	2
9.	(7 Maret 2015) Program Tersendat, Persiapan Ujian Terusik	3	3	3
10.	(8 Maret 2015) Kedepankan Kepentingan Rakyat Jakarta	1	1	1
11.	(10 Maret 2015) Hak Publik Untuk Tahu dan Ikut Andil Perangi Penyelewengan	2	2	2
12.	(10 Maret 2015) ICW Temukan 454 Paket Kegiatan Mencurigakan	2	2	3
13.	(11 Maret 2015) Indikasi Penggelembungan Anggaran Ditemukan	3	3	3
14.	(12 Maret 2015) Beberapa Mata Anggaran Dikoreksi	4	4	4
15.	(13 Maret 2015) Manfaatkan Tenggat Tujuh Hari	2	1	2
16.	(16 Maret 2015) Kasus UPS “Menyetrum” Begal Anggaran di Jakarta	2	4	4
17.	(17 Maret 2015) Oknum PNS Diyakini Susupkan Anggaran	4	4	4
18.	(18 Maret 2015) Kisruh UPS	4	4	4
19.	(18 Maret 2015) Rapat Tertunda, Waktu Kian Sempit	4	4	4
20.	(19 Maret 2015) Langkah Maju Pembahasan Anggaran	4	4	4

21.	(19 Maret 2015) Energi Untuk Mengawal Anggaran Publik	2	3	2
22.	(20 Maret 2015) Kepercayaan Publik Terhadap Gubernur Lebih Besar	2	2	2
23.	(20 Maret 2015) Tim Anggaran Kejar Target	1	1	3
24.	(20 Maret 2015) Guru Terpaksa Talangi Operasional	4	4	4
25.	(23 Maret 2015) Tim Anggaran Siapkan Pergub	4	4	4
26.	(24 Maret 2015) Mediasi Buntu, APBD Mengacu Tahun 2014	3	3	3
27.	(25 Maret 2015) Dewa Lanjutkan Hak Angket	1	1	3
28.	(25 Maret 2015) Kesempatan Terakhir pun Kandas	2	3	2
29.	(26 Maret 2015) Pesan dibalik Kisruh APBD	2	2	2
30.	(27 Maret 2015) ICW Laporkan Kasus UPS 2014 ke KPK	2	2	2
31.	(28 Maret 2015) Basuki : Sejak Lama Anggaran DKI Dicuri	2	2	3
32.	(30 Maret 2015) APBD DKI Diharapkan Selesai Dua Pekan Lagi	4	4	4
33.	(31 Maret 2015) AU – ZS Diduga Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	2	3	2
34.	(31 Maret 2015) DKI Jamin Bantuan ke Wilayah Sekitar	4	4	4

$$CR1 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.29}{34 + 34}$$

$$= \frac{58}{68} = 0,8529$$

$$CR2 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.28}{34 + 34}$$

$$= \frac{56}{68} = 0,8235$$

Unit Analisis 7. Penggambaran Dana Siluman

No.	Tanggal / Berita	Peneliti	N1	N2
1.	(1 Maret 2015) Basuki Tidak Bisa Dimakzulkan Jika Benar	2	2	3
2.	(2 Maret 2015) Dugaan Anggaran Menguat	2	2	2
3.	(3 Maret 2015) Anggaran Untuk Pemindai di Sekolah Rp 3 Miliar	2	2	4
4.	(4 Maret 2015) Evaluasi APBD DKI Sudah Tuntas	4	3	2
5.	(4 Maret 2015) Anggaran Dinas Pendidikan Paling Rawan	2	2	2
6.	(5 Maret 2015) Mendagri Segera tetapkan APBD DKI	2	2	2
7.	(6 Maret 2015) Badai Kisruh Belum Berlalu	2	2	2
8.	(6 Maret 2015) Rehab Sekolah Masih Terhambat	4	2	2
9.	(7 Maret 2015) Program Tersendat, Persiapan Ujian Terusik	2	2	2
10.	(8 Maret 2015) Kedepankan Kepentingan Rakyat Jakarta	2	2	2
11.	(10 Maret 2015) Hak Publik Untuk Tahu dan Ikut Andil Perangi Penyelewengan	2	2	2
12.	(10 Maret 2015) ICW Temukan 454 Paket Kegiatan Mencurigakan	2	2	2
13.	(11 Maret 2015) Indikasi Penggelembungan Anggaran Ditemukan	2	2	2
14.	(12 Maret 2015) Beberapa Mata Anggaran Dikoreksi	3	3	2
15.	(13 Maret 2015) Manfaatkan Tenggat Tujuh Hari	4	3	4
16.	(16 Maret 2015) Kasus UPS “Menyetrum” Begal Anggaran di Jakarta	2	4	2
17.	(17 Maret 2015) Oknum PNS Diyakini Susupkan Anggaran	2	2	2
18.	(18 Maret 2015) Kisruh UPS	2	4	2
19.	(18 Maret 2015) Rapat Tertunda, Waktu Kian Sempit	4	2	4
20.	(19 Maret 2015) Langkah Maju Pembahasan Anggaran	4	4	4

21.	(19 Maret 2015) Energi Untuk Mengawal Anggaran Publik	2	2	2
22.	(20 Maret 2015) Kepercayaan Publik Terhadap Gubernur Lebih Besar	2	2	2
23.	(20 Maret 2015) Tim Anggaran Kejar Target	4	3	2
24.	(20 Maret 2015) Guru Terpaksa Talangi Operasional	4	4	4
25.	(23 Maret 2015) Tim Anggaran Siapkan Pergub	4	3	4
26.	(24 Maret 2015) Mediasi Buntu, APBD Mengacu Tahun 2014	2	2	2
27.	(25 Maret 2015) Dewa Lanjutkan Hak Angket	2	2	4
28.	(25 Maret 2015) Kesempatan Terakhir pun Kandas	2	2	2
29.	(26 Maret 2015) Pesan dibalik Kisruh APBD	2	2	2
30.	(27 Maret 2015) ICW Laporkan Kasus UPS 2014 ke KPK	2	2	2
31.	(28 Maret 2015) Basuki : Sejak Lama Anggaran DKI Dicuri	2	2	2
32.	(30 Maret 2015) APBD DKI Diharapkan Selesai Dua Pekan Lagi	4	3	4
33.	(31 Maret 2015) AU – ZS Diduga Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	2	2	2
34.	(31 Maret 2015) DKI Jamin Bantuan ke Wilayah Sekitar	4	4	4

$$CR1 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.25}{34 + 34}$$

$$= \frac{50}{68} = 0,7352$$

$$CR2 = \frac{2.M}{N1 + N2}$$

$$= \frac{2.28}{34 + 34}$$

$$= \frac{56}{68} = 0,8235$$

KISRUH APBD DKI

Basuki Tak Bisa Dimakzulkan jika Benar

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, jika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama benar bahwa ada penyusupan "dana siluman" dalam APBD DKI Jakarta, Basuki tak bisa dijatuhkan oleh DPRD DKI yang saat ini menggulirkan hak angket, penyelidikan.

Atas dasar itu, Jusuf Kalla juga mendukung langkah Gubernur DKI yang membawa laporan dan dokumen dugaan dana siluman dalam APBD DKI Jakarta sejak tahun 2012 hingga 2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Biar saja begitu (berlangsung proses hukumnya) sehingga orang akan jelas, mana yang salah dan yang benar. Kasus DPRD ibu kota Jakarta bagus dan bisa menjadi contoh untuk semua DPRD di mana pun. Kalau berlebihan (menganggarkan), ya, masuk ke pengadilan saja. Jadi, saya dukung (langkah ke KPK) itu," ujar Kalla saat ditanya mengenai kemelut seputar APBD DKI Jakarta, di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (28/2).

Saat ditanya kemungkinan Gubernur Basuki akan dimakzulkan terkait hak angket yang diajukan DPRD DKI, Kalla menjawab, jika Basuki benar, dia tidak bisa dijatuhkan oleh DPRD.

"Terkecuali Ahok-nya salah. Karena menjatuhkan itu harus

lewat pengadilan. Nah, pengadilan itu, kan, juga harus jelas, kalau memang benar harga UPS (alat catu daya listrik cadangan) itu ketinggian, atau apa pun namanya, berarti Ahok, ya, benar. Tetapi, kalau memang tidak ada (dana siluman), ya, Ahok bisa salah," ujar Kalla menyebut panggilan akrab Basuki.

Komunikasi politik

Presiden Joko Widodo dalam kesempatan terpisah mengatakan, kisruh politik di DKI Jakarta saat ini muncul karena ada persoalan komunikasi politik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.

"Sebetulnya, asal dua-duanya mau bertemu, berkomunikasi, mencari solusi, mencari jalan keluar, pasti ada," kata Presiden, yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, di Jakarta.

Menurut Jokowi, masalah anggaran yang menjadi salah satu akar persoalan itu tak perlu terjadi jika ada kesepakatan dalam hal prioritas penganggaran.

"Mana yang prioritas, apakah sekolah-sekolah yang rusak atau UPS? Penting mana? Kan, masih banyak sekolah yang rusak dan perlu diperbaiki," ujarnya.

"Yang kedua, apakah itu usulan sekolah atau bukan, ditanyakan kepada dinas juga, mereka

mengusulkan atau tidak," lanjutnya.

Basuki libatkan BPKP

Gubernur Basuki juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut menginvestigasi dugaan anggaran siluman dalam APBD DKI Jakarta tahun 2014. Ia menengarai, kemunculan dana tidak jelas itu tak hanya berasal dari oknum di DPRD DKI Jakarta, tetapi juga jajaran di bawahnya.

Menurut Basuki, anggaran tidak jelas untuk UPS pada APBD DKI Jakarta 2014 kembali muncul dalam Rancangan APBD 2015 dengan nilai mencapai Rp 12,1 triliun. Di antara berbagai anggaran tak jelas itu, pengadaan UPS paling mencolok karena memakan biaya cukup besar.

Indikasi korupsi pada pengadaan UPS tahun 2014 telah tercium oleh KPK. Berdasarkan data yang Basuki miliki, ada modus yang sama dalam pengadaan UPS, yakni tender senilai Rp 6 miliar, tetapi pagunnya Rp 5,8 miliar. "Saya memperkirakan pihak yang memasok alat ini satu orang, hanya dia menggunakan nama perusahaan yang berbeda-beda," ujarnya.

Selain membidik oknum di DPRD, Basuki juga membidik

(Bersambung ke hal 15 kol 3-4)

(Sambungan dari halaman D)

jajaran di bawahnya, salah satunya dinas pendidikan. Menurut dia, masih ada orang-orang di kalangan suku dinas pendidikan yang nakal.

Dari penjelasan Lasro Marbun, mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta (tahun 2014), pada APBD 2014, anggaran pendidikan dipangkas hingga Rp 4,3 triliun. Namun, hingga anggaran disahkan, masih ditemukan 55 paket yang seharusnya tidak masuk dalam anggaran dan tetap lolos.

Bukan untuk memakzulkan

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Muhamad Sanusi, mengatakan, yang dipersoalkan Dewan saat ini adalah dokumen APBD 2015 yang tidak sah karena bukan hasil pembahasan dengan

Laporan Gubernur kepada KPK atas dugaan anggaran siluman pada APBD 2014, lanjutnya, tidak berhubungan dengan keabsahan dokumen APBD 2015 yang diserahkan eksekutif kepada Kementerian Dalam Negeri.

"Kalau memang ada anggota Dewan yang terlibat (dalam dugaan dana siluman APBD 2014), silakan periksa saja. Kami semua patuh pada hukum. Tetapi, itu tidak ada urusannya dengan APBD 2015 yang belum sah karena belum ada penetapan dari Kementerian Dalam Negeri," tutur Sanusi.

Dia bahkan balik menuding adanya "anggaran siluman" senilai Rp 20 triliun dalam APBD 2015. Dana itu, menurut Sanusi, adalah belanja tidak langsung untuk gaji pegawai, tunjangan, serta belanja telepon, air, listrik, dan internet, yang tidak dibahas bersama dengan Dewan.

"Di komisi saya, misalnya, ada program pemeliharaan Jalan Suprpto Rp 50 miliar tanpa rincian panjang jalan atau aspal yang dibutuhkan. Ada juga program pembangunan pipa air bersih Jatiluhur-Jakarta Rp 50 miliar," ujar Sanusi.

KISRUH APBD DKI

Dugaan Anggaran Siluman Menguat

JAKARTA, KOMPAS — Dugaan adanya anggaran siluman dalam APBD DKI Jakarta tahun 2014 dan Rancangan APBD tahun 2015 menguat. Perusahaan pemenang lelang tak cukup meyakinkan, sementara instansi pengguna menyatakan tak pernah mengajukan usulan anggaran.



Mereka Bersatu dalam Semangat Anti Korupsi

HAL 25

Kantor CV Bintang Mulia Wisesa, perusahaan pemenang tender pengadaan alat pasokan daya listrik bebas gangguan (*uninterruptible power supply/UPS*) senilai Rp 5,8 miliar untuk SMA Negeri 27 Jakarta pada 2014, misalnya, ternyata adalah tempat perbaikan alat penyejuk ruangan (AC). "Saya tidak tahu-menahu soal pengadaan UPS karena saya *ngurusin* bengkel saja. Kalau soal UPS yang *megang* anak saya," ujar Zainuri (60), ayah dari Indah Lestari, pemilik CV Bintang Mulia Wisesa, yang beralamat di Kebon Bawang, Jakarta Utara, Minggu (1/3).

Zainuri menambahkan, anak ketiganya itu memiliki kantor lain di Jakarta Pusat. Dia mengaku tak tahu soal pengadaan UPS yang dikerjakan putrinya.



Warga mendiskusikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta Barat Tahunan. Pemerintah provinsi antara lain Gubernur DKI dan DPRD DKI dalam persiapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. Foto: Nur Hafid/Agensi 8. (Klik untuk memperbesar)

Sejumlah instansi yang tercatat sebagai pengguna anggaran dalam Rancangan APBD 2015 versi DPRD DKI Jakarta juga tak tahu-menahu soal usulan pengadaan UPS senilai Rp 4,2 miliar itu. Dalam draf APBD 2015, tercatat 64 kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat mendapat jatah anggaran pengadaan UPS.

Sejumlah camat bahkan terkejut dan baru saja mengetahuinya. Camat Tambora, Jakarta Barat, Mursidin, mengatakan, pihaknya tidak pernah mengusulkan pengadaan alat yang berfungsi sebagai catu daya alternatif itu. Apalagi, di kantor Kecamatan Tambora hanya ada empat unit komputer. Pengadaan UPS dengan anggaran sebesar itu dianggap kurang bermanfaat.

Dugaan Anggaran Siluman Menguat

(Sambungan dari halaman 1)

"Kami tidak pernah tanda tangani usulan pengadaan UPS. Usulan itu pun tidak muncul di musyawarah rencana pembangunan kecamatan," katanya.

Dana senilai Rp 4,2 miliar, menurut Mursidin, lebih baik digunakan untuk pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti penanganan genangan dan banjir, normalisasi saluran air, serta penambalan jalan rusak.

Hal senada diungkapkan Camat Cengkareng, Jakarta Barat, Ali Maulana Hakim. Menurut Ali, tidak pernah ada usulan UPS melalui forum musrenbang ataupun inisiatif dari kecamatan.

Pengadaan UPS pun tidak termasuk program prioritas karena hanya ada sekitar 10 komputer di kantor kecamatan. Bahkan, pegawai pun lebih banyak menggunakan laptop yang masih bisa dipakai saat listrik padam.

"Memang itu cukup penting, tetapi bukan prioritas karena di tempat kami jarang mati listrik," ujar Ali.

Khusus untuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), menurut Ali, pelayanan masih bisa dioptimalkan dengan laptop. Karena menggunakan daya baterai, data di laptop cenderung lebih mudah diamankan saat listrik padam. Dana Rp 4,2 miliar lebih baik untuk penanganan banjir mengingat wilayah Cengkareng ter-

masuk rawan banjir.

Ada juga sejumlah mata anggaran lain yang dinilai tak perlu. Sejumlah kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Utara, misalnya, mendapat alokasi dana untuk pengadaan audio-visual masing-masing Rp 810 juta. Kecamatan Penjaringan salah satunya.

Menurut Wakil Camat Penjaringan Abdul Khalit, pihaknya tidak pernah mengusulkan alat itu. Khalit bahkan tidak mengerti seperti apa alat yang dimaksud, bagaimana bentuknya dan kegunaannya.

Rp 12,1 triliun

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, secara total

ada Rp 12,1 triliun anggaran yang tiba-tiba muncul dalam RABPD 2015. Dia menduga ada oknum yang memasukkannya sebelum draf disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Fahmi Zulfikar menyatakan, terkait pengadaan UPS pada 2014, sebaiknya ditanyakan kepada pengguna. "Tanya saja mereka butuh atau tidak. Soal harganya, silakan cek di pasaran, apa wajar atau tidak," ujarnya.

Menurut Fahmi, bisa jadi anggaran diusulkan DPRD, tetapi DPRD bukan pengguna. "Jika dianggap tak perlu, dinas atau suku dinas tidak perlu mengadakannya. Tidak perlu lelang juga," ujarnya. (MKN/DEA/JAL)

KISRUH APBD DKI

Anggaran untuk Pemindai di Sekolah Rp 3 Miliar

JAKARTA, KOMPAS — Dalam rincian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 versi DPRD DKI Jakarta termuat sejumlah usulan anggaran yang tidak jelas. Dalam rancangan itu antara lain ada program pengadaan alat pemindai dan pencetak masing-masing Rp 3 miliar untuk 40 sekolah di Jakarta Selatan. Salah satu sekolah yang ditulis mengajukan pengadaan kedua alat itu adalah SMP Negeri 73 Tebet, Jakarta Selatan.

"Saat ini kondisi SMPN 73 memprihatinkan karena bangunan sekolah mangkrak lebih dari satu tahun. Saya tidak mengajukan anggaran pengadaan barang. Saya hanya meminta pembangunan sekolah dilanjutkan agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman," kata Kepala Sekolah SMPN 73 Tebet Sukirman, Senin (2/3).

Terkait dugaan penyimpangan APBD tahun 2014, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun menambahkan, memang ada pengadaan 49 unit alat pemasok daya listrik bebas gangguan (UPS). Sebanyak 25 unit untuk Jakarta Barat dan 24 unit untuk Jakarta Pusat. "Sumbernya dari daftar pengisian anggaran di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat dalam APBD Perubahan 2014," tuturnya.

Selama dua pekan terakhir, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah memeriksa kasus UPS tersebut. Pemeriksaan dilakukan terhadap kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, panitia hasil pekerjaan, dan pengurus lelang. Lasro selaku kepala dinas pendidikan saat UPS dianggarkan juga tidak luput dari pemeriksaan.

Pengadaan UPS di tahun 2014, menurut Lasro, muncul dari tingkat suku dinas tanpa ada tanda tangan atau persetujuan dirinya, dan pada RAPBD 2015 hal itu terulang kembali. Jika dalam pemeriksaan BPKP dan Inspektorat ditemukan pejabat DKI yang melanggar aturan, lanjut Lasro, sanksi tegas akan dijatuhkan.

Tidak boleh menerima

Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi mengatakan, dirinya sudah mendengar soal UPS dalam RAPBD DKI 2015 yang katanya, akan dibagikan kepada camat dan lurah. "Saya instruksikan kepada para camat dan lurah untuk tidak menerima barang dan jasa yang tidak mereka usulkan. Ini agar mereka terhindar dari sangkaan terlibat korupsi," katanya.



Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat Sudarman menjelaskan, dalam Rencana Kegiatan Anggaran 2015, program tersebut tidak diusulkan.

Cabut dukungan

Kemarin, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat menginstruksikan semua anggota Fraksi Nasdem di DPRD DKI mencabut dukungan dan mengundurkan diri dari kepanitiaan hak angket. "Alasannya, tujuan dari hak angket adalah untuk investigasi permasalahan strategis. Manakala pimpinan pusat menyaksikan bahwa gubernur sudah melapor kepada KPK terkait APBD, Nasdem memutuskan langkah itu saja yang diteruskan," kata Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Bestari Barus.

Namun, Fraksi Gerindra tak

menyelesaikan polemik APBD DKI Jakarta. "Akibatnya, publik dirugikan karena pembangunan terhambat dan upah PNS di DKI Jakarta tersendat," ujarnya.

Namun, Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku sudah bertemu Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat dan DPRD DKI. Ia menjanjikan hari ini, Selasa, akan ada musyawarah antara tim keuangan daerah di Kemendagri dengan Gubernur/Wagub/Sekda dan Ketua DPRD DKI.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait mengapresiasi langkah Basuki. Basuki telah membuat tradisi baru dalam berpolitik. Maruarar yakin, dalam waktu dekat DPP PDI-P akan mengambil sikap atas persoalan ini.

(ONG/MKN/FRO/WIN/DNA/ EGI/JUM/SUT/APA/HRS/B09)

(Sambungan dari halaman 1)



CV Wisanggeni di Kota Magelang, Jawa Tengah, yang disebut-sebut sebagai pemenang tender pengadaan UPS untuk SMA Negeri 5 Jakarta, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, selaku konsultan teknik.

Pegawai CV Wisanggeni, Sunarso, mengatakan, pihaknya tak pernah ikut tender UPS dan menduga ada kesamaan nama dengan perusahaan lain peserta tender.

Selain pengadaan UPS, ada program seperti e-SMS untuk semua SD negeri di Kecamatan Palmerah, Kebon Jeruk, Kembangan, dan Grogol senilai Rp 5 miliar. Ada pula program *e-smart teacher education* yang anggarannya dialokasikan Rp 4 miliar.

Kepala Sub-Bagian Tata Usaha mau ikut mencabut angket. "Kami sudah mengatakan akan menjalankan angket. Kami akan kaji dulu sebelum bersikap," kata Ketua Komisi D dari Fraksi Gerindra Muhammad Sanusi.

Terkait rencana Partai Nasdem membatalkan angket, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menilai tepat. "Angket muncul karena DPRD menuduh kami memalsukan APBD, padahal saya bilang mereka (DPRD) yang memalsukannya dengan memasukkan anggaran Rp 12,1 triliun yang tak pantas," ujarnya.

Lambat bertindak

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan, Mendagri dinilai lambat dan tidak menggunakan otoritas yang dimilikinya dalam

KISRUH ANGGARAN

Evaluasi APBD DKI Sudah Tuntas

BANDUNG, KOMPAS — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta jangan sampai terbengkalai hanya karena kisruh saat ini. Tjahjo mengatakan, masalah itu harus segera diselesaikan dengan cara mengesahkan Rancangan APBD.

"Jangan sampai APBD DKI Jakarta terbengkalai. Harus dilakukan pengesahan secepatnya karena ini anggaran untuk masyarakat. Antara Gubernur dan DPRD perlu ada musyawarah. Jangan akibat masalah ini mengganggu proses pembangunan ataupun belanja aparatur," ujar Tjahjo, Selasa (3/3), sesuai upacara tingkat nasional peringatan HUT Ke-65 Satuan Polisi Pamong Praja dan HUT Ke-53 Satuan Perlindungan Masyarakat, di Lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat.

Menurut Mendagri, pihaknya tak akan mencampuri proses politik dan hukum terkait kisruh

APBD DKI ini. "Biarlah aspek hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi dan proses politik lewat hak angket di DPRD berjalan. Namun, jangan sampai aspek hukum dan politik itu mengorbankan aspek administrasi APBD," ujarnya.

Kemendagri mengoreksi

Di Jakarta, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengatakan, proses evaluasi APBD DKI telah selesai. Dalam evaluasi itu, Kemendagri mengoreksi sejumlah pos anggaran di APBD. Ada yang diminta untuk dihapus sama sekali, ada pula yang besarnya diminta untuk dirasionalkan.

Demikian disampaikan Reydonnyzar sesuai bertemu Panitia Angket DPRD DKI, Selasa. Koreksi dilakukan karena, antara lain, pos anggaran bertentangan dengan undang-undang, tidak untuk kepentingan umum, tidak efektif, tidak efisien, dan tidak

wajar. Ia menyebutkan, pos anggaran yang dikoreksi mencapai miliaran rupiah, antara lain terkait belanja operasional wali kota di DKI.

Kemendagri meminta alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur diperbesar. Alokasi anggaran pendidikan harus minimal 20 persen, kesehatan 10 persen, dan infrastruktur 30 persen.

Namun, Reydonnyzar menolak menjelaskan detail total anggaran dan berapa banyak pos anggaran di APBD DKI yang dikoreksi. Alasannya, hasil koreksi itu akan dibahas dalam pertemuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI pada Rabu ini dan Kamis besok.

"Pertemuan itu sekaligus akan menjadi ruang bagi DPRD menyampaikan permasalahannya terkait APBD dan ruang bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengklarifikasi. Dalam pertemuan dua hari itu, kami berharap solusi bisa dicapai su-

paya APBD DKI Jakarta bisa segera disahkan," lanjutnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Selasa, meminta maaf kepada warga Jakarta atas "tontonan politik" terkait penetapan APBD 2015 tersebut. Namun, ia menegaskan tak akan mundur untuk memperjuangkan penghapusan Rp 12,1 triliun "anggaran siluman" dalam Rancangan APBD 2015.

Sementara itu, DPRD DKI menunjuk pengacara untuk mewakili DPRD secara institusi melapor kepada penegak hukum. DPRD berencana melaporkan Basuki ke Badan Reserse Kriminal Polri karena dinilai mencemarkan nama baik dan memalsukan dokumen APBD.

(APA/SEM/MKN/DNA/FRO)



Lihat Video Terkait "DPRD DKI Laporkan Ahok ke Bareskrim" di kompasprint.com/vod/ahokdilaporkandprd
BACA JUGA HAL 26

KISRUH APBD

Anggaran Dinas Pendidikan Paling Rawan

JAKARTA, KOMPAS — Forum Indonesia untuk Transparansi dan Anggaran menilai, pos anggaran APBD yang paling rawan didelembungkan adalah anggaran Dinas Pendidikan.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi dan Anggaran (Fitra) Apung Widadi, Selasa (3/3) siang, menjelaskan, pada APBD 2015, Pemprov DKI diketahui mengajukan anggaran Dinas Pendidikan (Disdik) sekitar Rp 3 triliun. Dalam draf versi DPRD, anggaran Disdik ini menjadi Rp 8,1 triliun.

Menurut Apung, dana siluman juga muncul dalam satuan kerja perangkat daerah lainnya. "Namun, jumlahnya di bawah Rp 1 triliun, atau tidak sebanyak dana siluman yang muncul dalam anggaran Disdik," ujarnya.

Apung menambahkan, anggaran Disdik paling rawan didelembungkan karena memiliki porsi paling besar dalam alokasi APBD, yakni sebesar 20 persen. Komponen anggaran berupa pengadaan barang macam printer, scanner, dan alat catu daya listrik cadangan (UPS) bahkan sudah muncul dalam APBD 2013 dan 2014.

"Hal itu mengindikasikan praktik penyelewengan anggaran sudah terjadi sejak lama," ujar Apung. Sekretaris Jenderal Fitra Yeni Sucipto mengatakan, uji publik diperlukan untuk meninjau dugaan dana siluman yang muncul dalam APBD 2015.

Selasa malam, sejumlah pakar hukum menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta. Salah satu tokoh yang hadir, Zainal Arifin

69
Jangan sampai karena tidak suka dengan gaya komunikasi ini, lalu ada yang berpikir untuk memakzulkan dia.

Yuddy Chrisnandi

Mochtar, menilai, langkah Basuki memotong usulan anggaran Rp 12,1 triliun dalam draf APBD tahun 2015 sebagai langkah yang benar.

"Substansinya adalah mengamankan keuangan daerah dari kebocoran. Jika DPRD (DKI Jakarta) merasa versinya benar, tinggal buktikan saja, toh, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang anggota legislatif membahas anggaran hingga satuan ketiga (level teknis)," kata Zainal, yang juga pakar hukum Universitas Gadjah Mada itu.

Selain Zainal, hadir pula pakar hukum tata negara Refly Harun, Saldi Isra, dan Denny Indrayana. Pertemuan berlangsung tertutup pada pukul 17.00-20.30. Refly, Saldi, dan Denny enggan berkomentar terkait isi pertemuan tersebut.

Zainal menambahkan, kisruh pembahasan anggaran seperti yang terjadi di Jakarta ini harus segera diselesaikan.

Kisruh APBD DKI Jakarta menyebabkan pelayanan publik terancam lumpuh. Anggaran Kartu Jakarta Sehat 2015 sebesar Rp 1,3 triliun dan Kartu Jakarta Pintar sebesar Rp 2,2 triliun

diperkirakan terlambat cair sehingga menghambat pelayanan publik. Percepatan pembangunan gedung-gedung sekolah juga dikhawatirkan sulit dilakukan.

Mencairkan tunjangan

Adapun Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menambatkan, saat ini pihaknya fokus mencairkan sebagian tunjangan kinerja daerah (TKD) yang belum diterima pegawai negeri sipil. Dana itu diambilkan dari anggaran mendahului sesuai Peraturan Gubernur Nomor 211 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan APBD 2015.

"Gaji pegawai sudah dialokasikan untuk satu tahun. TKD bulan Januari dibayarkan 50 persen dulu agar pegawai tidak kesulitan membiayai hidup sehari-hari," katanya.

Di tempat terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi meminta dinamika politik di DPRD DKI tidak sampai mengarah kepada pemakzulan Gubernur DKI. Pasalnya, jika itu terjadi, akan mengganggu jalannya pemerintahan DKI.

"Saya memberi dukungan moral kepada Gubernur DKI Jakarta supaya tetap bisa menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik dengan baik," ujarnya.

Meski demikian, di sisi lain Yuddy meminta Basuki untuk lebih simpatik dan tidak emosional dalam memberikan pernyataan. "Gaya komunikasi harus diperbaiki. Namun, jangan sampai karena tidak suka dengan gaya komunikasi ini, lalu ada yang berpikir untuk memakzulkan dia," katanya.

(MKN/DNA/FRO/APA)

Mendagri Segera Tetapkan APBD DKI

Polisi Mulai Memeriksa Pejabat DKI Terkait Pengadaan UPS

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Dalam Negeri memastikan penetapan APBD DKI Jakarta paling lambat 8 Maret 2015. Pembangunan diharapkan segera terlaksana dan pelayanan publik tak terganggu kekisruhan seputar APBD tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo, Rabu (4/3), menyampaikan, target penetapan APBD DKI Jakarta sesuai dengan kerangka kerja adalah 8 Maret 2015. "Target kami 8 Maret harus disetujui, apa pun yang terjadi. Kami menghargai proses politik

yang ditempuh DPRD DKI dengan angket serta proses hukum yang ditempuh Gubernur DKI ke KPK," kata Tjahjoe dalam rapat evaluasi atas Rancangan APBD DKI Jakarta 2015 di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Tjahjoe menambahkan, Ke-

mendagri telah menerima dan mengevaluasi draf APBD yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI. Pihaknya juga telah beberapa kali bertemu dengan DPRD DKI. Namun, belum ada titik temu soal substansi APBD.

"Kemendagri hanya ingin melaksanakan tugas administrasi keuangan. Semua daerah sama, hanya DKI agak terhambat, belum selesai secara administrasi karena beda pemahaman. Namun, APBD jangan sampai tersandera karena akan membuat marah warga DKI," tutur Tjahjoe. Sesuai kewenangan yang di-

atur dalam Pasal 314 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Mendagri bisa membatalkan semua atau sebagian isi APBD jika hasil evaluasi Kemendagri tidak ditindaklanjuti Gubernur dan DPRD dalam waktu tujuh hari.

Apabila Mendagri memutuskan membatalkan semua isi APBD 2015, yang berlaku adalah APBD 2014.

"Jika tidak tercapai kesepakatan, tentu harus ada keputusan



Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahjoe Purnama memberikan keterangan pers soal APBD DKI Jakarta saat pertemuan dengan tim Kementerian Dalam Negeri, 4 Maret Kemendagri, Jakarta, Rabu (4/3).

(Bersambung ke hal 15 kol 1-7)

Mendagri Segera Tetapkan APBD DKI

(Sambungan dari halaman 15)

politik. Namun, penggunaan kewenangan itu menjadi solusi terakhir supaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di DKI Jakarta tak terhambat," ujar Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moersek di sela-sela proses mediasi Pemprov dan DPRD DKI di Kemendagri.

Reydonnyzar menambahkan, proses evaluasi APBD oleh Kemendagri dibatasi waktu 15 hari, menurut dia, saat ini tinggal tersisa sepekan untuk menuntaskan evaluasi tersebut.

Proses mediasi yang digelar semendagri dilaksanakan dua hari, yakni Rabu dan Kamis ini. Pada mediasi hari pertama, tim Kemendagri terlebih dahulu bertemu Gubernur DKI Basuki Tjahjoe Purnama, Wakil Gubernur

DKI Djarot Saiful Hidayat, dan jajaran Pemprov DKI Jakarta. Siang harinya, giliran DPRD DKI Jakarta yang bertemu tim Kemendagri.

Proses mediasi hari pertama itu berlangsung tertutup. Pada proses mediasi hari ini, Kemendagri akan mempertemukan langsung kedua pihak, yaitu Gubernur dan DPRD DKI Jakarta.

"E-budgeting"

Seusai rapat mediasi itu, Gubernur Basuki menyampaikan terima kasih kepada Kemendagri yang menanggapi positif pemakaian sistem penganggaran elektronik (*e-budgeting*) untuk APBD DKI Jakarta mulai tahun ini. Sistem itu dinilai efektif mencegah kebocoran anggaran, sekaligus menjabarkan penggunaannya lebih jelas dan terukur.

Basuki menyatakan tidak akan

mundur untuk memperjuangkan penghapusan Rp 12,1 triliun "anggaran siluman" dalam RAPBD 2015 versi DPRD. Menurut dia, pola menyusun mata anggaran yang tak perlu terus berulang sejak 2012.

Pengajar dan aktivis anti korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, berpendapat, terobosan *e-budgeting* merupakan langkah maju dalam upaya mengamankan keuangan daerah atau negara. Pola serupa seharusnya ditempuh pemerintah pusat dan daerah untuk mengefektifkan penggunaan anggaran.

Tidak beralasan

Dalam diskusi kenegaraan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu, anggota DPD, AM Fatwa, berpendapat, hak angket yang digunakan DPRD DKI saat

ini tidak beralasan.

"Saya melihat Gubernur DKI masih mendapat dukungan dari warga Jakarta, bahkan saat ini dukungan kian besar. Hak angket itu dilakukan jika pemerintah tidak lagi mendapat dukungan warganya. Jadi, saya kira hak angket ini tidak beralasan," kata Fatwa.

Menurut Fatwa, jika komunikasi tak berhasil mencapai titik temu, ia mengusulkan pelaksanaan uji publik.

Hal yang sama dikatakan pakar hukum tata negara Refly Harun yang juga hadir dalam diskusi tersebut.

"Soal hak angket, itu kan untuk melakukan penyelidikan atas kebijakan pemerintah yang strategis dan dianggap berdampak luas kepada masyarakat. Kita kembali kepada Gubernur DKI Jakarta, apakah dia membuat kebijakan

yang merugikan? Kan tidak? Jadi tidak layak jika hal seperti ini diselesaikan dengan angket," tutur Refly.

Fatwa dan Refly mengatakan, Indonesia butuh orang berani seperti Basuki. Mereka juga melihat tak ada tendensi soal uang ataupun jabatan dari apa yang dilakukan Basuki.

Sebaliknya, DPRD DKI menyatakan, panitia angket akan tetap bekerja menyelidiki dokumen APBD yang diserahkan Gubernur. Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana, kerja panitia angket akan selesai dalam waktu beberapa hari ke depan.

"Kami sudah menemukan fakta hukumnya, yaitu (Gubernur) melanggar etika dan norma, melanggar stabilitas politik, menghina, memfitnah, dan memalsukan APBD," ujar Lunggana.

DPRD DKI, melalui pengacara Razman Arif Nasution, juga menegaskan akan melaporkan Gubernur DKI kepada Polri dan KPK karena dianggap melanggar sejumlah hal. Selain soal pelanggaran etika, Basuki akan dilaporkan kepada Polri karena dinilai mencemarkan nama baik dan memalsukan dokumen APBD. Basuki juga dituduh akan menyuap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Pejabat diperiksa

Kepolisian Daerah Metro Jaya hingga Rabu malam masih memeriksa enam pejabat di lingkungan Pemprov DKI terkait pengadaan alat pemasok daya listrik bebas gangguan (UPS) di Dinas Pendidikan DKI tahun 2014.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ko-

misaris Besar Mudjiono mengatakan, tim penyidik Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi telah memeriksa AU, pejabat di Seksi Prasarana dan Sarana Kota Jakarta Selatan.

Selain AU, polisi juga meminta keterangan dari 2 kepala sekolah di Jakarta Barat, serta 1 pegawai di Suku Dinas Pengadaan Barang dan Sarana Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisar Besar Martinus Sitomp, menjelaskan, polisi melakukan penyelidikan soal ini setelah memantau pemberitaan terkait kisruh APBD di media massa dan mendapat laporan khusus dari seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya.

(MKN/APA/REN/WIN/RTS/099)



Didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yuswandi A Tumenggung (kedua kiri), Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Beydonnyzar Moenck (kanan) menjawab pertanyaan wartawan sesuai rapat Fasilitasi, Mediasi, dan Klarifikasi Mengenai E-Procurement Rancangan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (5/3). Rapat mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta itu berakhir tanpa titik temu.

RAPBD DKI 2015

Badai Kisruh Belum Berlalu

Alih-alih mencapai titik temu, proses mediasi antara Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta terkait Rancangan APBD tahun 2015 di Ruang Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Kamis (5/3), malah buntu. Rapat berakhir dengan drama yang jauh dari harapan warga ibu kota Jakarta.

Pertemuan itu panas sejak awal. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikukuh ada usulan siluman Rp 12,1 triliun dalam Rancangan APBD (RAPBD) versi DPRD. Dia menyatakan, RAPBD yang disampaikan Pemprov DKI ke Kemendagri adalah hasil pembahasan bersama dengan DPRD DKI.

DPRD DKI menegakkan, RAPBD yang dilayangkan Basuki ke Kemendagri tidak sesuai hasil pembahasan yang ditetapkan dalam rapat paripurna pada 27 Januari 2015.

Proses mediasi yang dimulai pukul 09.30 menyedot perhatian publik. Ruang Sasana Bhakti Praja telah dipenuhi puluhan wartawan. Hadir pula lebih dari 20 anggota DPRD dan 75 pejabat eselon I-II Pemprov DKI. "Mediasi ini tertutup, silakan keluar!" ujar petugas kepada para wartawan.

Usut siluman

Dalam video yang direkam Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov DKI Jakarta, ketegangan terjadi sekitar 6 menit terakhir dalam kurang lebih dua jam mediasi. Saat itu, Sekretaris

Jenderal Kemendagri Yuswandi A Tumenggung mempersilakan Basuki menyampaikan sambutan penutup.

"Saya minta SKPD untuk tidak meng-*input* (mata anggaran) yang bukan hasil pembahasan. Saya mau tanya, apakah ini sesuai pembahasan atau tidak. Coba tolong angkat tangan," tanya Basuki kepada pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang hadir di ruang tersebut.

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Abraham Lunggana alias Lalung memotong pembicaraan, "Ini, kan, setelah Rakap Kampulin (SKPD) kemarin, seakan ini hasil pembahasan. Ini sesuai peraturan apa tidak?"

"Ini sesuai peraturan!" balas Basuki dengan nada tinggi. "Apakah Anda membahas UPS (*uninterruptible power supply*) Rp 4,2 miliar per kelurahan di Jakarta Barat, jawab!" lanjut Basuki sambil menunjuk ke Wali Kota Jakarta Barat Anas Elendri.

Anas lalu berdiri mencoba menjawab pertanyaan Basuki. Namun, sejumlah anggota DPRD berteriak dengan nada tinggi. "Pak Gubernur, saya kira Rakap bisa menambal emosi. Ja-

ngan teriak-teriak Pak Gub," kata seorang peserta. Peserta lain menimpali, "Itapak, gubernur apa preman."

Mengakhiri ricuh, Yuswandi memilih menutup mediasi. Sejumlah anggota dan pimpinan DPRD menyatakan rapat usai karena gubernur emosional. Namun, Basuki menyatakan ia tak emosi. Ia ingin persoalan menjadi jelas dengan menuntun asal-usul anggaran siluman. Basuki menginstruksikan rekaman video diunggah ke Youtube agar publik bisa melihat situasinya.

Mendagri harus aktif

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Beydonnyzar Moenck menilai, keributan itu bagian dari dinamika hubungan kedua lembaga. "Itu soal komunikasi semata. Ada perbedaan pandangan," katanya.

Kemendagri akan tetap berupaya mendorong dan memfasilitasi kedua belah pihak.

Mediasi dipimpin Yuswandi karena Mendagri Tjahjo Kumolo harus ke Makassar, Sulawesi Selatan, untuk menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Sulawesi.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan, seharusnya Mendagri memprioritaskan mediasi soal RAPBD DKI Jakarta daripada ke Sulawesi. "Masalah yang dihadapi di DKI Jakarta lebih mendesak untuk diselesaikan oleh Mendagri," ujarnya. (MKN, FRU, APA, DNA, JAL)

INFRASTRUKTUR

Rehab Sekolah Masih Terhambat

JAKARTA, KOMPAS — Program rehab di sejumlah sekolah yang masih dalam proses rehab bangunan di Jakarta Timur masih terhenti sejak Januari hingga awal Maret ini. Sekolah yang telah selesai direhab pun kini belum dapat digunakan, salah satunya SD Negeri 6 Malakajaya.

Rehab di SMP Negeri 252 Pondok Kelapa, SMP Negeri 97 Utan Kayu, dan SD Negeri 5 Pondok Kelapa, misalnya, sudah hampir tiga bulan ini tak berjalan. Tampak bangunan kedua sekolah baru setengah jadi, belum ditutup oleh tembok ataupun dinding penyekat.

SD Negeri 6 Malakajaya yang telah selesai dibangun sudah hampir tiga bulan ini tidak dapat ditempati para siswa. Pagar sekolah itu digembok, sedangkan para siswa hanya dapat bertahan menumpang belajar di SD Negeri 4 Malakajaya pada sore hari.

Kepala SD Negeri 6 Malakajaya Lilis Lisnawati, Kamis (5/3), mengatakan, selama belajar menumpang di sekolah lain, pihak sekolah tidak dapat menyelenggarakan latihan soal ujian nasional bagi 36 siswa kelas VI.

"Kami sangat berharap dapat kembali masuk ke sekolah kami sendiri. Para siswa dapat kembali sekolah dengan nyaman," kata Lilis.

Total selama dua tahun sebanyak 242 siswa SD Negeri 6

genera menyerahkan kunci SD Negeri 6 Malakajaya ke Dinas Pendidikan.

"Kontraktor akan serahkan kunci secepatnya sehingga gedung sekolah dapat segera digunakan para siswa dan guru, kata Sarjoko.

Sekolah-sekolah yang masih dalam proses rehab, lanjut Sarjoko, memang belum dapat dilanjutkan pembangunannya. Total di Jakarta Timur terdapat 11 sekolah rehab lanjutan, dan 1 sekolah rehab total pada 2015 ini.

Sementara di seluruh wilayah DKI Jakarta terdapat 55 gedung sekolah rehab lanjutan, dan 41 gedung sekolah rehab total pada 2015 ini.

Menurut Sarjoko, seluruh gedung sekolah yang rehab lanjutan tidak dibiarkan berhenti begitu saja. Dokumen persyaratan untuk melanjutkan pembangunan sekolah-sekolah itu tengah diproses di Unit Layanan Pengadaan (ULP).

"Untuk melanjutkan pembangunan ini harus melalui kaji ulang KAK atau Kerangka Acuan Kerja di ULP sehingga dapat segera dilanjutkan proses lelang," ujar Sarjoko.

Proses kaji ulang KAK tersebut, menurut Sarjoko, dapat mendahului APBD DKI yang sampai saat ini belum disahkan DPRD DKI.

KISRUH APBD DKI

Program Tersendat, Persiapan Ujian Terusik

JAKARTA, KOMPAS — Kisruh Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta yang melibatkan legislatif dan eksekutif mulai berimbas pada program strategis. Bahkan, persiapan ujian akhir di sekolah menengah atas pun terganggu.

Program-program yang dimaksud adalah pembebasan lahan Waduk Marunda yang mangkrak sejak dua tahun terakhir. Sekretaris Kota Jakarta Utara Jumaedi mengatakan, program pembebasan lahan itu diharapkan bisa secepatnya tuntas.

"Sudah dua tahun pembebasan lahan tertunda. Kami berharap tahun ini bisa segera selesai

dari 20 hektar lahan yang belum dibebaskan," ujarnya.

Selain waduk, normalisasi saluran juga tersendat. Sebagai wilayah yang paling terdampak banjir, Jakarta Utara memprioritaskan program ini. Apalagi, sebagian besar saluran air berada dalam kondisi buruk dan tidak bisa mengalirkan air.

Terhambatnya anggaran juga menyebabkan operasionalisasi di RSUD Koja terganggu. Biaya listrik, air, dan telepon belum diselesaikan. Ini disebabkan pembayaran menunggu cairnya anggaran APBD.

Meski begitu, Direktur RSUD Koja Theryoto mengungkapkan,

hal itu tidak mengganggu pelayanan yang dilakukan pihak rumah sakit. Sebab, pihak-pihak terkait memberikan toleransi terhadap keterlambatan anggaran seperti tahun sebelumnya. "Biaya operasional, pembelian dan perbaikan alat itu, memang perlu subsidi dari Pemprov. Ya, kami tetap mengusahakan agar pasien terus terlayani," katanya.

Kepala sekolah dipanggil

Di Jakarta Barat, 11 kepala sekolah penerima alat catu daya listrik cadangan (UPS) dipanggil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta. Kepala SMAN 112 Ja-

karta Saryono mengatakan, dirinya diminta keterangan tertulis tentang asal-muasal UPS.

Pertanyaan yang diajukan BPKP antara lain siapa yang mengusulkan UPS, bagaimana cara mendapatkan alat tersebut, dan apakah ada surat serah terima barang. Pertanyaan tertulis itu dijawab dalam waktu sekitar satu jam. "Saya sudah dua kali memberikan keterangan. Pertama di inspektorat, kedua di BPKP," ujar Saryono, Jumat.

Adapun beberapa sekolah penerima UPS di Jakarta Barat mengeluhkan proses pemeriksaan di inspektorat, BPKP, dan Bareskrim Polda Metro Jaya. Kepala



Ahok Melawan "Groupthink" DPRD Inwanto

HAL 6

SMAN 16 Jakarta Cedarkuine menuturkan, proses pemeriksaan mengganggu persiapan ujian akhir SMA. Waktu dan konsentrasi untuk menyiapkan ujian jadi terbelah.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul mengungkapkan, sejak penyelidikan dimulai 28 Januari lalu, sudah 15 orang diperiksa. Tim penyidik juga minta dokumen-dokumen

(Bersambung ke hal 15 kol 5-7)

Program Tersendat, Persiapan Ujian Terusik

(Sambungan dari halaman 1)

terkait pengadaan UPS tersebut.

Sitompul menuturkan, dari keterangan saksi-saksi dan penelitian terhadap dokumen serta barang jadinya (unit UPS), tim penyidik dari Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyimpulkan ada indikasi ketidakseimbangan dalam penggunaan dana atau pembelian barang dengan kebutuhan itu. "Analoginya, yang dibutuhkan adalah barang yang bisa mendukung operasi dua komputer, tetapi yang dibeli barang untuk mendukung pengoperasian 50 komputer," ujarnya.

Tim bekerja

Kemarin, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota mengatakan, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) sudah mulai memperbaiki beberapa hal dalam APBD 2015 sebelum dibahas lagi dengan Badan Anggaran DPRD DKI. Namun, dia menegaskan agar TAPD tidak berkompromi satu sen pun terhadap dana yang tidak jelas.

"Kalau DPRD masih menolak,

kami akan menyusun sendiri dengan jumlah nominal seperti APBD Perubahan 2014. Kami akan ajukan peraturan gubernur ke Kemendagri. Mereka yang akan menyeleksi secara langsung, sesuai atau tidak. Begitu sudah disetujui Kemendagri, semua akan berjalan seperti biasa," ujar Basuki.

Jika ketidaksepakatan semacam ini terus terjadi sampai masa jabatan Gubernur Basuki berakhir tahun 2017, akan ditempuh langkah serupa. Program prioritas tetap disesuaikan dengan kebutuhan pada tahun tersebut. Hanya pagu anggaran saja yang sama dengan APBD Perubahan 2014, yakni Rp 72,9 triliun.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 110 Ayat (9). Pada 13 Maret nanti, Mendagri akan mengumumkan hasil evaluasi APBD 2015, apakah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika dinyatakan sesuai, APBD 2015 bisa ditetapkan sebagai peraturan daerah dan peraturan gubernur (Pasal 110 Ayat 6). Apabila APBD 2015 dinyatakan bertentangan dengan aturan yang ber-

laku, gubernur dan DPRD memiliki waktu paling lama tujuh hari kerja untuk menyempurnakannya (Ayat 7).

Apabila hasil evaluasi Kemendagri tidak ditindaklanjuti gubernur dan DPRD, Mendagri akan membatalkan peraturan daerah dan peraturan gubernur sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun lalu (Ayat 8).

Basuki mengatakan, sudah tidak perlu lagi ada mediasi. Dia sudah tidak mau berkompromi untuk memasukkan dana tidak jelas. "Saya cuma mau minta maaf kepada warga DKI. Silakan warga DKI menilai saya. Kalau menganggap saya tidak santun, tidak sopan, dan mau berkompromi, apakah warga bisa ikhlaskan Rp 12,1 triliun. Tetapi kalau tidak ikhlas, harus bisa menerima saya konflik (dengan DPRD)," katanya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi saat berkunjung ke Balai Kota mengharapkan dinamika politik di DKI Jakarta tidak mengganggu tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

(RTS, JAL, DEA/DNA)

KISRUH APBD

Kedepankan Kepentingan Rakyat Jakarta

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta diminta segera menemukan solusi kebuntuan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. Eksekutif dan legislatif diminta duduk bersama dan mengedepankan kepentingan rakyat.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yenny Sucipto mengatakan, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD diharapkan menyudahi akrobat politik yang berlarut-larut ini. Ia berharap Gubernur tidak gegabah dengan mengajukan nominal APBD Perubahan 2014 jika pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI kembali buntu. "Kalau memakai APBD Perubahan 2014, usulan prioritas tahun ini tidak bisa dilaksanakan," ujar Yenny dalam acara diskusi bertema "Deadlock Ahok" di Jakarta, Sabtu (7/3).

Usulan prioritas yang tidak bisa dijalankan itu di antaranya pembangunan angkutan massal cepat (MRT) serta normalisasi kali, waduk, dan saluran. Yenny menambahkan, penggunaan APBD tahun sebelumnya juga merugikan dari sisi pertumbuhan ekonomi Jakarta. Hal ini karena target pendapatan daerah harus mengikuti target tahun sebelumnya.

"Pemprov dan DPRD harus menemukan solusi mengefektifkan APBD 2015. Dugaan anggaran siluman Rp 12,1 triliun harus dihapuskan. Jika memang ada dugaan korupsi pada tahun sebelumnya, hukum harus ditegakkan," kata Yenny.

Draf bersama

Menurut Mohammad Sanusi, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, DPRD mempertanyakan RAPBD yang diserahkan Gubernur kepada Kemendagri bukan yang sudah disetujui di Banggar. Gubernur justru mengajukan dokumen lain. "Kami tak mau ada kekuasaan berlebihan. Di mana fungsi penyeimbang jika APBD diisi dan diserahkan sendiri oleh eksekutif?" kata Sanusi.

Ia juga mengatakan, hak angket terus berjalan untuk menyelidiki kesalahan yang dilakukan Gubernur. Sanusi juga menyoroti penggunaan *e-budgeting* yang dinilai belum kompatibel. Yang di-input di *e-budgeting* seharusnya hasil pengesahan antara eksekutif dan legislatif.

Pengamat ekonomi kebijakan publik Ichsanudin Noorsy berpendapat, hak angket seharusnya digunakan secara intelektual

(Bersambung ke hal 15 kol 5-7)

Kedepankan Kepentingan Rakyat Jakarta

(Sambungan dari halaman 1)

untuk menguliti kebijakan Gubernur. Ia menyoroti perencanaan anggaran yang buruk dan serapan anggaran pun rendah.

Sebelumnya, Gubernur Basuki mengatakan, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) sudah memperbaiki beberapa hal dalam RAPBD 2015 sebelum dibahas lagi dengan Banggar. Ia menegaskan, TAPD tidak berkompromi terhadap dana tidak jelas.

"Kalau DPRD masih menolak, kami akan menyusun sendiri dengan jumlah nominal seperti APBD Perubahan 2014. Kami akan ajukan peraturan gubernur kepada Kemendagri. Mereka yang akan menyeleksi secara langsung. Begitu sudah disetujui Kemendagri, semua akan berjalan seperti biasa," ujar Basuki.

Siap diperiksa

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana, yang biasa dipanggil Lulung, mengatakan siap diperiksa polisi terkait

pengadaan alat catu daya listrik cadangan (UPS). Namun, ia belum menyiapkan dokumen yang diperlukan. Ia siap dimintai keterangan dan patuh pada aturan yang berlaku.

Terkait kicauan di Twitter yang bernada sindiran kepadanya, Lulung tidak terlalu memmasalahkannya. Ia tidak memiliki akun dan jarang menggunakan sosial media. "Itu, kan, pesanan dari orang yang kontra sama saya. Saya apresiasi dan terima kasih menjadi terkenal," ujar Lulung.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisariss Besar Martinus Sitompul kemarin mengatakan, kasus dugaan korupsi pengadaan UPS di 49 sekolah di Jakarta

ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Polisi memeriksa 15 saksi, tetapi belum ada penetapan tersangka.

Salah satu pejabat di Seksi Prasarana dan Sarana Kota Jakarta Selatan, AU, yang diperiksa tim penyidik Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi pun masih berstatus sebagai saksi.

Enam instansi yang dinilai bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Komisi Pendidikan dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI, Kemendagri, Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI, serta pengusaha.

(DEA/WIN/B09/FRO)

Pembetulan

Dalam berita berjudul "Kongres PD Berpeluang Dipercepat" di halaman 5, Sabtu (7/3), terdapat kesalahan. Di dalam berita disebutkan "... yang terbukti efektif mempertahankan perolehan suara 7 persen pada Pemilu 2014." Seharusnya, "... hingga PD memperoleh 10,19 persen suara di Pemilu 2014." Dengan demikian, kesalahan kami perbaiki. Terima kasih.

Redaksi

RISRUH APBD DKI

Hak Publik untuk Tahu dan Ikut Andil Perangi Penyelewengan

Pada akhir pekan di penghujung Februari lalu, Anum Najib tertarik pada topik yang sangat diperbincangkan di sebuah chat group Facebook. Dari grup itu, ia mendapat informasi tentang keirah RAPBD DKI Jakarta tahun 2015. Kala itu, draft RAPBD DKI Jakarta versi DPRD dan Pemerintah Provinsi sudah tersebar di banyak media serta mulai diperkembangkan publik.

"Saya lihat yang versi (Pemerintah Provinsi) DKI lebih rapi berupa PDF file, yang (versi) DPRD berupa excel file. Bagi kami, data scientist, melihat data langsung serang, tertarik, dan berpikir ini bisa diekstrak," kata Anum, yang kini bermukim di Singapura, saat dihubungi via telepon. Babu (43) lalu berawal dari ketertarikan itu, Anum dan sesama data scientist Publii Fikri Aulia dan Iqbal Achmad Saetia, serta beberapa orang yang memiliki latar belakang keilmuan serta keterampilan serupa, berinisiatif memilah RAPBD versi DPRD dan DKI agar mudah dibaca publik.

Berkat mereka, masyarakat luas kini bisa mengakses kedua versi RAPBD di rapbd-dki.kawalapbd.org. Mengikuti panjan di situs itu, warga tinggal memasukkan kata kunci kegiatan/mata anggaran yang ingin diteliti dan dibandingkan.

Tidak ada motif lain yang melatarbelakangi Anum dan kawan-kawannya selain ingin membuka mata publik terhadap data atau dokumen yang menyiratkan kepentingan bersama. Di tengah kesibukannya, Anum memanfaatkan waktu luang di akhir pekan untuk menyempurnakan rapbd-dki.kawalapbd.org. "Ini gawe bersama, kalau pernah seluruh Indonesia. Sengaja di upload di Facebook biar kalau yang lain sedang kongas, bisa membantu menyempurnakan data ini, dibuat visualisasinya, agar publik makin gampang mengaksesnya," tambah Anum.

Tidak bisa intervensi
Jika Anum menggebu ingin membantu masyarakat tahu "dalaman" RAPBD, Henry S Wibyaningih dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia bidang sosialisasi dan advokasi justru mengingatkan perlunya memahami kedudukan data RAPBD itu. Henry mengatakan, KIP tidak berhak menyatak RAPBD DKI Jakarta tahun 2015 adalah dokumen publik atau bukan.

R-APBD 2015 VERSI DPRD DKI JAKARTA DAN PEMPROV DKI JAKARTA

- Ada 1.709 mata anggaran yang tidak ada di R-APBD 2015 versi Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta, tapi ada di R-APBD versi DPRD. Nilai Rp 10.515.494.304,717.
- Ada 5.036 mata anggaran yang nilainya berkurang di R-APBD 2015 versi DPRD. Lada perbedaan nilai antara APBD yang diajukan Pemprov dengan APBD setelah perubahan dari DPRD: senilai Rp 1.351.028.345,116.
- Sejumlah mata anggaran yang tidak ada di R-APBD 2015 versi Pemprov DKI Jakarta, tetapi terdapat di versi DPRD:
 - Pemadaan UPS SMPN 17, senilai Rp 2 miliar
 - Pemadaan jasa, senilai Rp 8 miliar
 - Pemadaan papan cat, Sude Olahraga dan Pemuda Jakarta Barat, senilai Rp 200 juta
 - Pemadaan alat "scanner" dan printer ID SMPN 104, Sude Pendidikan Jakarta, senilai Rp 3 miliar
 - Pemadaan buku brigadi Akad "Nekad Cera Rakyat", Dine Pendidikan, senilai Rp 100 triliun

Seluruh mata anggaran yang nilainya berbeda antara R-APBD 2015 versi Pemprov dan DPRD

MATA ANGGARAN	SAPD	HAJE PEMBAYARAN (RUPIAH)	VERSI PEMPROV DKI (RUPIAH)	PERBEDAAN (RUPIAH)
Penyusunan kerucukan jalan serta kelengkapan dan jalan-jalan strategis di Kota Jakarta Barat	Sudin Elna Marga Jakarta Barat	30.000.000.000	54.999.994.206	4.999.994.206
Pembinaan, Pengembangan, dan Penguasaan Kelautan dan Perikanan Kepulauan Seribu	Sudin Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kepulauan Seribu	1.760.000.000	1.827.998.991	2.067.998.991
Penyenggaraan dan partisipasi kegiatan olahraga di Jakarta Utara	Sudin Olahraga dan Pemuda Jakarta Utara	1.000.000.000	1.999.999.912	999.999.912
Koordinasi pembinaan, monitoring, evaluasi, dan penyusunan kebijakan urusan kesehatan	Biro Kesejahteraan Sosial	650.000.000	479.302.000	170.808.000
Pemadaan sarana perputakaan dan Arsip Jakarta Selatan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Jakarta Selatan	1.710.000.000	1.596.659.220	113.340.780
Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan daerah	Batalai Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	800.000.000	283.227.250	516.772.750

Tips Memanfaatkan Laman KawalAPBD.org untuk Mengalip RAPBD

- Untuk melihat R-APBD 2015 versi Pemprov DKI Jakarta atasan versi DPRD DKI Jakarta, kunjungi <http://rapbd-dki.kawalapbd.org/> bisa dibuka.
- Klik "Pantau APBD" dan akan muncul dengan kolom seperti "Mata SAPD", "Nama Kegiatan", "Basis Pembahasan", "Salah dengan DPRD", dan "Flag".

- Jika ingin melihat mata anggaran yang hanya ada di versi DPRD dan Pemprov DKI, klik bagian "flag" bagian "flag".
- Jika ingin melihat mata anggaran yang berbeda antara versi DPRD dan Pemprov DKI, klik bagian "flag" bagian "flag".

Sumber: Ulfah Kompas/IKIP/PTI, data diolah dari laman <http://kawalapbd.org>

"Selama musnah rancangan, yang menentukan ribasi atau tidak sebuah dokumen adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang ada di setiap instansi, termasuk pemerintah provinsi dan DPRD," kata Henry, Senin (9/3).

Prosedurnya, tambah Henry, PPID memiliki hak untuk uji koneksi terhadap dokumen tersebut. Dari hasil uji koneksi dan selama tidak tersangkut pada Pasal 17 Ayat (a) hingga (j) pada Bab V tentang Informasi yang Diaksesikan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, baru bisa diturunkan dokumen terbuka untuk publik.

KIP tidak bisa intervensi terhadap sebuah dokumen yang belum diupload. Namun, berbeda jika dokumen yang sudah diupload dan diupload, tidak diupload. KIP, masyarakat, misalnya, bisa meminta laporan keaslian resmi dari pelaksanaan program APBD DKI tahun 2014 ke badan publik yang bersangkutan.

Budi Santoso, anggota Ombudsman Republik Indonesia

(OR) bagian penyelesaian laporan, pengaduan, pengaduan, ORH tidak mungkin ikut campur dalam kekiruhan RAPBD DKI. Berbeda jika ada pengaduan masyarakat karena terganggunya layanan publik akibat kekiruhan itu.

Diritu daerah lain
Ade Irawan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Jumat (6/3), mengatakan, keiruh RAPBD DKI 2015 dilatarbelakangi adanya kepentingan DPRD yang tidak dikecualikan Pemprov DKI.

Menurut Ade, dugaan penambahan mata anggaran atau dana siluman, yang disebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama senilai Rp 12,1 triliun, merupakan indikasi adanya penyalahgunaan anggaran.

Dalam berita Kompas, Sabtu (7/3), Mohammad Samud, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, mengatakan, DPRD membantah tuduhan dana siluman. Ia justru mempertanyakan RAPBD yang diserahkan Gubernur kepada Kementrian Dalam Negeri bukan yang sudah disetujui di Baragor. "Di mana fungsi penyeimbang jika APBD diisi dan diserahkan sendiri oleh eksekutif?" katanya.

Namun, kembali ke indikasi penyelewengan anggaran, ICW menemukan kasus serupa terjadi di banyak daerah lain di Indonesia. Modurnya, penyelewengan dilakukan mulai dari proses perencanaan, implementasi, hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Contoh dugaan praktik ransopok anggaran yang kini terungkap pada Metro Jaya adalah APBD DKI 2014. Di situ ada mata anggaran pengadaan penyimpanan listrik calangan (*uninterruptible power supply* (UPS) senilai Rp 6 miliar per unit. Padahal, normalnya Rp 1,5 miliar per unit. Selain itu, Ade mencotohkan, di salah satu daerah di Indonesia, sejumlah anggota DPRD menerima keuntungan berupa fee dari perusahaan pemert tender sebelum RAPBD disahkan. Akibatnya, perusahaan tertentu berulang menjadi pemenang tender.

Namun, tentu saja oknum anggota Dewan tidak bekerja sendiri. Seperti disebut dalam pemberitaan Kompas, Minggu (8/3), dalam pengadaan UPS di DKI tahun 2014, misalnya, ada

enam instansi yang dinilai bertanggung jawab, yaitu Dinas Pendidikan DKI, Komisi Pendidikan dan Badan Anggaran DPRD, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI, Kementerian Dalam Negeri, Unit Layanan Pengadaan Baragor dan Jasa DKI, serta pengasah.

Menurut Ade, langkah Basuki untuk menghentikan praktik penyelewengan anggaran dengan menengkan e-Procuring sudah tepat. "Siapa Basuki yang menolak negosiasi kepentingan DPRD harusnya dikuti pemimpin daerah lain," katanya.

Untuk menghentikan keiruh RAPBD DKI Jakarta 2015, salah satunya adalah melaksanakan proses mediasi dengan Kementrian yang berperan sebagai mediator. Masyarakat juga bisa terus ikut mengawasi proses mediasi. Apalagi, setelah ada kesepakatan seperti yang dilakukan Anum dan kawan-kawannya.

Budi Santoso mengatakan, apa pun yang terjadi di Jakarta kini pasti menjadi contoh bagi daerah lain. Terlaksananya pemertan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme tak terlepas dari peran para eksekutif, legislatif, dan warga yang berani menghentikan kekiruhan baragor itu.

GENDY PIWAWI
NASTITTE, NEJI TRIANA

APBD DKI 2014
ICW Temukan 454 Paket Kegiatan Mencurigakan

JAKARTA, KOMPAS - Indonesia Corruption Watch menemukan adanya dugaan penyimpangan anggaran sarana prasarana pendidikan DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Realisasi pengadaan barang yang diduga bermasalah itu terdiri dari 454 paket kegiatan dengan potensi kerugian Rp 1,2 triliun.

Simpangan anggaran terjadi antara lain dalam pengadaan alat penyimpan daya listrik (*uninterruptible power supply* (UPS)). Sepanjang 2014 terdapat 51 paket realisasi pengadaan UPS. Pengadaan itu terdiri dari 49 paket untuk sekolah menengah atas dan kejuruan dengan anggaran Rp 6 miliar per paket; 1 paket untuk Badan Perputakaan dan Arsip Daerah dengan anggaran Rp 6 miliar per paket; dan 1 paket untuk RSUD Cengkering dengan anggaran Rp 1,7 miliar.

Setelah diselidiki, anggaran Rp 6 miliar per paket tak semuanya digunakan membeli UPS. Anggaran Rp 3,1 miliar digunakan untuk pengadaan instalasi listrik, dan Rp 968 juta digunakan untuk membeli rak besi. Sementara dua komponen anggaran lainnya,

adalah honorarium tim pengadaan barang dan jasa serta belanja dokumen dan administrasi tender, tak dibayarkan. Adapun pembelian UPS Rp 1,9 miliar.

"Hal itu menunjukkan pengadaan UPS tidak melalui proses tender sebagaimana mestinya," kata Program Manager Monitoring Analisa Anggaran ICW Firdaus Ilyas.

Menurut Firdaus, dibandingkan skandal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lain, skandal anggaran DKI Jakarta merupakan yang terbesar. "Hal itu disebabkan jumlah anggarannya juga terbesar, yakni 3-4 kali lipat provinsi lain," katanya.

Firdaus menjelaskan, skandal itu tak hanya menyeret satuan kerja perangkat daerah, tetapi juga melibatkan eksekutif, DPRD, dan pihak ketiga pelaksana kegiatan.

Anggota DPRD diperiksa
Terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan UPS, polisi memeriksa 21 saksi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komarsa Besar Martinus Sintompul mengatakan, polisi akan memeriksa anggota DPRD DKI terkait kasus ini.

"Kasus ini merupakan APBD perubahan, yang terlibat dalam pembekalan pengadaan barang itu akan dilakukan pemeriksaan,"

pada penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan.

"Maksimal batas evaluasi oleh Kementrian memang 15 hari atau jatuh pada 13 Maret 2015. Namun, kalau sudah selesai sebelum itu, ya segera kami serahkan kembali ke DKI Jakarta. Sekarang ini prosesnya sudah hampir final," ujarnya.

Jika ditetapkan sebagai perda, nilai APBD 2015 sama dengan yang disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada 27 Januari sebesar Rp 73,08 triliun. Program yang disetujui pun sesuai dengan yang diajukan eksekutif atau setidaknya hanya sedikit penyimpangan.

Jika sampai diterbitkan pengumuman, artinya Pemprov DKI Jakarta harus mencajak pada perubahan APBD 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Banyak program harus disesuaikan dengan paket anggaran.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, meski ada penyesuaian, prioritas program tahun 2015 tetap seputar bidang transportasi, pendidikan, dan penanganan banjir. Dia mengindikasikan kemungkinan tunggakan kinerja daerah dinamis bagi PNS harus disesuaikan, bahkan dihapuskan.

GAPA/PRATI/BAU/DKA/USA/BOI/BOI

RAPBD

Indikasi Penggelembungan Anggaran Ditemukan

JAKARTA, KOMPAS — Tim evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun 2015 dari Kementerian Dalam Negeri menemukan indikasi penggelembungan anggaran di dokumen RAPBD yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Indikasi penggelembungan anggaran yang disinyalir Gubernur permainan DPRD DKI Jakarta muncul dalam RAPBD yang disampaikan Gubernur. Namun, bisa saja Gubernur tidak tahu soal ini karena pembahasan RAPBD tidak semuanya langsung dengan Gubernur, tetapi dengan stafnya," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (10/3).

Tjahjo menolak menyebutkan mata anggaran yang terindikasi digelembungkan itu. Namun, diindikasikan besarnya lebih dari Rp 12 triliun. "Kami koreksi mata anggaran itu, minimal diberi catatan," tambahnya.

Dengan adanya temuan itu, dia menduga penyelundupan anggaran tidak hanya dilakukan oknum di DPRD, tetapi juga oknum di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Pembahasan (RAPBD DKI Jakarta), kan, berdua (pemerintah dan DPRD), jadi kemungkinan oknum yang bermain

ada di dua tempat," katanya.

Tjahjo mendukung upaya penyelidikan dugaan korupsi dalam APBD DKI Jakarta tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014, oleh kepolisian. Kepolisian diharapkan bisa mengurai oknum-oknum yang memainkan APBD.

"Kejadian di DKI Jakarta ini sekaligus membuka mata agar tidak hanya DKI Jakarta, tetapi pemerintah daerah lainnya untuk lebih hati-hati saat menyusun anggaran," ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, pihaknya berupaya untuk sesegera mungkin menyelesaikan evaluasi RAPBD DKI Jakarta. Batas waktu yang diberikan sesuai undang-undang jatuh pada 13 Maret 2015. Namun, pihaknya berupaya menyelesaikan sebelum batas waktu itu. Hal itu dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan pembangunan di DKI Jakarta tidak terhambat.

Periksa pemenang lelang

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah pihak terkait dugaan korupsi pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS) di Jakarta. Salah satu yang diperiksa adalah para direktur pemenang tender pengadaan UPS.



Indikasi penggelembungan anggaran yang disinyalir Gubernur permainan DPRD DKI Jakarta muncul dalam RAPBD.

Tjahjo Kumolo

Selasa kemarin, polisi menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat direktur perusahaan pemenang lelang. Namun, hingga kemarin siang baru satu orang yang datang memenuhi panggilan penyidik. "Lainnya masih kita tunggu," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul.

Martinus menambahkan, semua pihak yang terlibat dalam penganggaran dan pengadaan UPS bakal diperiksa, termasuk pihak DPRD DKI Jakarta. Kasus dugaan korupsi ini telah ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan, tetapi polisi belum mengungkap siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. "Tersangka belum ada,"

kata Martinus.

Meski demikian, Martinus mengatakan, polisi sudah mengantongi calon tersangka. Diduga terjadi korupsi dalam pengadaan UPS di sejumlah sekolah di DKI senilai Rp 5,8 miliar per unit. Harga itu dinilai tidak wajar.

Posyandu pun terimbas

Kisruh penetapan RAPBD DKI Jakarta berimbas hingga ke program pelayanan ke masyarakat, seperti posyandu, pengasapan nyamuk, dan sosialisasi kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan itu, puskesmas kecamatan meminjam dana talangan dari Badan Layanan Umum Daerah dan memanfaatkan dana swadaya masyarakat.

Tini (55), penggerak posyandu di RW 010 Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Senin (9/3), mengatakan, porsi makanan bayi di posyandu dikurangi akibat anggaran APBD yang disalurkan melalui kelurahan belum cair.

Para pekerja kebersihan di kawasan Monumen Nasional, seperti Fatima (31), harus berutang lebih dari Rp 1,5 juta untuk menutup biaya hidup selama dua bulan lebih. "Itu baru utang di sekitar rumah. Ada lagi utang di tempat kerja," ujar ibu tiga anak itu, Senin (9/3) lalu.

(APA/RAY/DEA/ART)

APBD DKI

Beberapa Mata Anggaran Dikoreksi

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah mengeluarkan keputusan tentang Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun 2015. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta memiliki waktu tujuh hari untuk menyesuaikan RAPBD DKI Jakarta 2015 sesuai hasil evaluasi Kemendagri.

"Saya juga sudah menandatangani Keputusan Mendagri tentang hasil evaluasi itu sehingga Kepmendagri bisa segera disampaikan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta," ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (11/3).

Mendagri mengoreksi sejumlah mata anggaran. Salah satunya, belanja pendidikan. Meski besarnya sudah di atas 20 persen dari total anggaran sebesar Rp 67,5 triliun, ada penurunan alokasi anggaran pendidikan tahun 2015 dibandingkan 2014. Hal itu membuat Kemendagri menilai besaran belanja pendidikan tahun 2015 seharusnya bisa ditingkatkan.

Belanja pendidikan pada RAPBD 2015 sebesar Rp 14,5 triliun atau 21,62 persen dari total anggaran. Sementara pada APBD 2014, persentasenya mencapai 25,31 persen dari total anggaran.

Kemudian, belanja pegawai yang besarnya hampir 25 persen dari total anggaran dinilai tidak wajar dan tidak rasional. Mendagri membandingkan dengan belanja untuk penanganan banjir yang seharusnya lebih diprioritaskan, yang hanya Rp 5,3 triliun.

Tjahjo menyatakan, hasil evaluasi itu dikirimkan ke Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta untuk dimintakan klarifikasi. Jika dalam waktu tujuh hari tidak ada kesepakatan antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta, maka Kemendagri bakal memutuskan untuk memberlakukan kembali APBD 2014 untuk membiayai birokrasi dan pembangunan di DKI Jakarta.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono mengatakan, pada Kamis ini pihaknya akan bersurat kepada Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta untuk membahas hasil evaluasi Kemendagri. Kedua pihak memiliki waktu tujuh hari untuk membahas APBD 2015 sebelum diserahkan kembali ke Kemendagri.

"Ada sejumlah catatan dari Kemendagri, salah satunya porsi pendidikan yang harus diperbesar. Menurut catatan mereka, porsinya baru 21 persen, sedangkan catatan kami 25 persen. Ada selisih 4 persen karena rehabilitasi gedung sekolah kami masukkan ke Dinas Perumahan," ujar Heru.

Ada sejumlah mata anggaran yang harus dikurangi, seperti belanja alat tulis kantor dan tunjangan kinerja daerah. Tunjangan transportasi pun bakal diadakan.

Optimistis

Heru optimistis APBD 2015 akan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Artinya, nilai APBD yang akan dipakai sebesar Rp 73,08 triliun seperti yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada 27 Januari.

Di Gedung DPRD DKI Jakarta, panitia angket memanggil konsultan *e-budgeting* untuk dimintai keterangan seputar sistem itu. Seorang konsultan asal Surabaya, Gagat Wahono, menjelaskan, dirinya sebatas menangani pembuatan sistem, tidak berurusan dengan hal-hal substansial, seperti nilai anggaran dan peruntukannya. "Saya hanya menjaga sistem. Yang punya kewenangan soal kegiatan itu Bappeda. Kalau ada masalah dengan sistem, baru tanya ke saya," ujarnya.

Meskipun data APBD 2015 ada di server, lanjut Gagat, dia tidak merasa memiliki kepentingan untuk melihat data itu. Dia dan tim pembuat sistem *e-budgeting* yang berjumlah empat orang hanya bertugas menyambungkan data ke dalam sistem. Nilai APBD DKI yang sangat besar, begitu juga dengan jumlah SKPD yang mencapai ratusan orang, memerlukan memori yang besar.

"Sistem ini sudah selesai tahun 2014. Kalau sudah sampai tahap cetak, mereka (SKPD) sudah bisa sendiri. Peran saya pun sangat kecil," kata Gagat.

Anggota panitia angket yang berjumlah 10 orang bertubi-tubi melayangkan pertanyaan kepada Gagat, tetapi tidak menyentuh soal sistem *e-budgeting*. Mereka lebih banyak bertanya soal surat tugas, kontrak kerja, lembaga tempat konsultan bernaung, dan besarnya upah yang diterima konsultan.

(FRO/RTS/RAY/APA/WHY/ONG)



JITET



APBD DKI

Manfaatkan Tenggat Tujuh Hari

JAKARTA, KOMPAS – Tenggat tujuh hari untuk membahas hasil evaluasi APBD DKI Jakarta 2015 harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh eksekutif dan legislatif. Nasib ribuan pegawai dan program pembangunan yang disusun dipertaruhkan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tetap akan meminta DPRD DKI Jakarta untuk menetapkan APBD 2015 sebagai peraturan daerah. Nilainya seperti yang telah disahkan, yaitu Rp 73,08 triliun. Namun, dia juga telah siap apabila DPRD menolak pembahasan, dan eksekutif harus kembali memakai pagu anggaran APBD 2014 sebesar Rp 72,9 triliun.

"Tentu kami akan ketemu. Tetapi, jangan memaksa memasukkan dana tidak jelas," katanya,

Kamis (12/3).

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, eksekutif telah mengirimkan surat kepada Dewan untuk meminta jadwal pembahasan. Kini tinggal menanti niat baik Dewan untuk menyelesaikan kisruh soal APBD 2015. Sesuai perintah dari Kementerian Dalam Negeri, eksekutif akan mengurangi dan menyesuaikan besarnya dana untuk beberapa mata anggaran.

Kemarin panitia angket DPRD DKI Jakarta juga memanggil tim anggaran pemerintah daerah untuk ditanyai soal pembahasan APBD 2015. Panitia angket menyimpulkan tim anggaran melanggar aturan tata cara pembahasan dan tidak membahas APBD 2015 secara detail.

Beberapa suku dinas merasa

keberatan jika harus menggunakan APBD 2014. Kepala Sudin Tata Air Jakarta Timur Yazied Bustomi mengungkapkan, saat ini semua pekerjaan sudah tertunda. Pada Rancangan APBD 2015, total anggaran untuk Sudin Tata Air Jaktim sebesar Rp 280 miliar, sedangkan APBD 2014 lebih sedikit hanya Rp 216 miliar.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap 130 orang terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan UPS di sejumlah sekolah di Jakarta. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Martinus Sintompul mengatakan, dari jumlah tersebut yang dipanggil sudah 35 orang, tetapi yang memenuhi panggilan baru 21 orang.

(FRO/MDN/RTS/RAY)

QDUGAAN KORUPSI

Kasus UPS "Menyetrum" Begal Anggaran di Jakarta

Perangkat *uninterruptible power supply* atau UPS yang biasanya tersembunyi di ruangan terkunci atau di bawah meja kerja tiba-tiba menjadi sorotan tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh negeri. Hal itu terjadi setelah kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat pemasok daya bebas gangguan tersebut menyetrum sejumlah pihak di kalangan legislatif dan eksekutif di DKI Jakarta.

Terkuatnya kasus ini bermula dari persetujuan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan anggota DPRD DKI Jakarta mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015. Persetujuan itu berujung pada pengajuan hak angket oleh anggota Dewan.

Basuki kemudian mengungkap dugaan praktik tak wajar dalam pengadaan sejumlah barang. Seperti diberitakan di *Kompas*, Selasa (3/3), ada dugaan penyimpangan APBD tahun 2014, yaitu pengadaan 49 UPS untuk 49 sekolah di Jakarta. Kucuran anggaran pengadaan UPS ada yang mencapai Rp 5,8 miliar untuk satu seko-

lah. Di RAPBD tahun 2015, pengadaan UPS dianggarkan kembali dan menelan dana masing-masing Rp 3 miliar untuk 40 sekolah.

Polda Metro Jaya menangani kasus dugaan korupsi pengadaan UPS dan sudah meningkatkan statusnya menjadi penyidikan. Calon tersangka pun sudah dikantongi oleh para penyidik. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, seluruh pihak yang terlibat dalam penganggaran, pelelangan, dan pengadaan UPS, termasuk Dewan maupun pihak eksekutif, bakal diperiksa.

Angka fantastis

Dari penelusuran di salah satu sekolah, kapasitas UPS yang tertulis mencapai 120 kVA. Kapasitas tersebut, menurut Suharlim Tedjokusumo, Direktur PT Konexindo, sebuah perusahaan yang di antaranya bergerak dalam bidang UPS, terlalu besar untuk sebuah sekolah. UPS-UPS seharga miliaran rupiah itu lebih cocok untuk menopang sebuah pusat data (*data center*) atau infrastruktur kritis lain.

"Harga UPS itu bisa dilihat

dari kapasitasnya, berapa kVA. Perlu dibedakan apa yang harus di-back-up oleh UPS itu. Biasanya kan hanya komputer agar sejumlah data penting tidak hilang. Jadi tidak harus semua di-back up, seperti lampu, atau AC, atau segala macam itu tidak perlu," kata Suharlim.

Suharlim menjelaskan, kegunaan UPS itu yang utama adalah untuk memberikan daya cadangan saat terjadi pemutusan daya utama selama sekitar 15 menit sebelum berpindah ke tenaga genset.

Sebagai perbandingan, ujar Suharlim, saat ini UPS berkapasitas 20 kVA berkualitas bagus harganya tidak lebih dari 10.000 dollar AS atau sekitar Rp 130 juta. "Kalau UPS satu fase dengan kapasitas 20 kVA itu paling harganya di bawah 10.000 dollar AS. Katakanlah sekolah mau tiga fase, tinggal kali tiga, masih di bawah 30.000 dollar AS," kata Suharlim.

Suharlim menjelaskan, harga tersebut bisa lebih mahal jika misalnya pemakai UPS tersebut ingin agar tenaga cadangan itu bisa menyuplai daya hingga lebih dari 15 menit. "Katakanlah sampai satu atau dua jam, ya

harus ditambah baterai, tentu itu lebih mahal," katanya.

Namun, karena fungsinya yang hanya sebagai tenaga cadangan sebelum menghidupkan genset, tidak dibutuhkan cadangan untuk waktu yang terlalu lama. "Jadi, UPS itu bukan untuk memberikan daya sampai dua hari. UPS memberi daya sementara selama sekitar 15 menit," ujarnya.

Sekolah sebenarnya bisa menggunakan perangkat UPS individu yang fungsinya sama, memberikan tenaga cadangan pada komputer saat listrik PLN mati. Selain fungsinya yang sama, harga per UPS pun relatif murah. "Sekitar 100 dollar AS (Rp 1,3 juta) sudah dapat satu UPS," kata Suharlim.

Katakanlah sebuah sekolah memiliki 100 komputer, maka biaya yang diperlukan untuk pengadaan UPS itu tidak sampai Rp 150 juta. Di pasaran, sangat banyak ditawarkan UPS-UPS dengan harga relatif murah di bawah sekitar Rp 1 juta per unit.

Setara Fairbanks

Jika dikalkulasikan, total biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan UPS bagi sekolah-se-



JITET

kolah di Jakarta pada tahun 2014 mencapai lebih dari Rp 300 miliar. Dana yang cukup besar, bahkan setara dengan dana pengadaan alat cadangan listrik bagi sebuah kota.

Sekadar perbandingan, UPS terbesar di dunia yang berada di Fairbanks, Alaska, Amerika Serikat, saat dibangun pada 2003, mampu memberikan cadangan daya sebesar 40 megawatt. Daya itu cukup untuk 12.000 warga selama sekitar 7 menit atau 26

megawatt untuk 15 menit.

Dikutip dari situs Energy Information Administration, lembaga Pemerintah AS, unit UPS tersebut dibangun oleh ABB, sebuah perusahaan Swiss, terdiri dari 13.760 sel baterai NiCad (nikel-kadmium). Biaya untuk membangunnya sebesar 35 juta dollar AS pada 2003 atau dengan kurs rupiah pada waktu itu nilainya setara Rp 299 miliar.

Unit baterai untuk daya tersebut ditempatkan di suatu

tempat seluas lebih dari lapangan sepak bola dengan berat mencapai lebih dari 1.200 ton, dinamai *battery energy storage system* (BESS). Seperti dikutip dari Telegraph, unit baterai itu cukup menghidupkan generator diesel untuk memulihkan daya di kota.

Kota Fairbanks, kota terbesar kedua di Alaska, membutuhkan tenaga cadangan besar karena kondisi alam dan geografisnya. Dengan suhu bisa mencapai titik terendah minus 52 derajat celsius pada musim dingin, listrik harus tetap hidup di tempat itu atau infrastruktur kritis.

Menurut Telegraph, tanpa listrik memadai, seluruh pipa air di kawasan itu akan membeku dalam tempo tak lebih dari dua jam. Cadangan daya yang mahal tersebut dibutuhkan karena itu menyangkut persoalan hidup dan mati warganya.

Kembali ke UPS di Jakarta, patut ditanyakan data atau infrastruktur kritis apa di SMA-SMA itu yang perlu dilindungi UPS miliaran rupiah? Publik pun ingin segera tahu siapa "begal" anggaran yang bakal ke-sestrum kasus korupsi UPS?

(PRASETYO EKO P)

APBD DKI JAKARTA

Oknum PNS Diyakini Susupkan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meyakini ada oknum pegawai negeri sipil yang memasukkan sejumlah anggaran yang dinilai tak perlu ke dalam Rancangan APBD DKI 2015. Ada pos-pos anggaran senilai total Rp 2 triliun yang lolos dan masuk draf APBD yang dikirim Pemerintah Provinsi DKI ke Kementerian Dalam Negeri.

"Terlihat, kok, (siapa yang memasukkan dalam APBD 2015), kami sudah tahu, maka saya stafkan. Ada eselon 4, eselon 3, dan mungkin ada eselon 2 terlibat," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Senin (16/3).

Temuan itu terungkap dari hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas Rancangan APBD 2015 yang disampaikan tim evaluasi Kemendagri ke Pemprov DKI, Rabu (11/3) lalu. Ada sekitar Rp 2 triliun yang lolos "sensor" dan masuk rancangan versi Pemprov DKI. Angka itu diduga bagian dari Rp 12,1 triliun anggaran siluman yang dinilai tidak perlu.

Basuki menambahkan, selain dari hasil evaluasi Kemendagri, ketidaksinkronan anggaran antara versi Pemprov DKI dan DPRD DKI juga terlihat dari situs kawalapbd.org yang dibangun Ainin Najib, pembangun situs kawalpemilu.org dalam pemilu presiden tahun lalu. Dalam situs itu,

nas perumahan ke wali kota. Ada 52 paket pos yang dialihkan dari satu SKPD ke SKPD lain.

Selain pengalihan, ada nomenklatur yang harus diperbaiki karena dinilai tak tepat, seperti operasional wali kota, dinas, suku dinas, dan kecamatan. Kata "operasional" akan diganti menjadi peningkatan kualitas layanan umum pemerintahan. Jumlahnya ada 986 nomenklatur dengan nama-nama yang tak tepat.

Saefullah menambahkan, tim evaluasi Kemendagri juga mengusulkan efisiensi anggaran sehingga ada penambahan dan pengurangan anggaran pada sejumlah nomenklatur.

Kemendagri menilai, tunjangan PNS sebesar Rp 16,5 triliun atau sekitar 24,5 persen total APBD DKI dinilai tidak wajar dan tidak rasional dari segi proporsi anggaran. Namun, Pemprov DKI berencana mempertahankannya karena terkait dengan reformasi birokrasi yang ditempuh sejak awal tahun ini.

“

Kami akan melihat apakah seluruh APBD yang disusun SKPD benar-benar hasil

siden tahun lalu. Dalam situs itu, ada selisih Rp 10,5 triliun di antara kedua versi tersebut.

Menurut Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Lasro Marbun, pihaknya akan meneliti lebih lanjut keterlibatan PNS dalam perencanaan APBD 2015. "Kami akan melihat apakah seluruh APBD yang disusun SKPD (satu kerja perangkat daerah) benar-benar hasil pembahasan atau tidak, atau jangan-jangan ada yang nakal dan memasukkan anggaran," ujarnya.

Perbaiki rancangan

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menambahkan, sesuai hasil evaluasi Kemendagri, ada sejumlah poin dalam rancangan APBD 2015 yang harus diperbaiki. Perbaikan itu, antara lain, pengalihan anggaran seperti pembangunan gedung sekolah dari dinas perumahan ke dinas pendidikan, pembangunan puskesmas dari dinas perumahan ke dinas kesehatan, serta kantor kerurahan dan kecamatan dari di-

benar-benar hasil pembahasan atau tidak.

Lasro Marbun

"Jika dibandingkan banyak daerah lain yang mengalokasikan anggaran hingga lebih dari 50 persen (dari total APBD) untuk belanja pegawai, porsi 24,5 persen di DKI itu relatif kecil dan tak ada aturan yang dilanggar (dengan besaran itu). Terlebih, kami menghemat anggaran triliunan rupiah dengan menghapus banyak pos yang sebelumnya menjadi sumber penghasilan pejabat, seperti honor, fee proyek, dan biaya pengendalian teknis," papar Saefullah.

Menurut dia, Pemprov DKI berencana menyelesaikan revisi dan membahasnya bersama DPRD setidaknya hingga Kamis (19/3). Terkait itu, DPRD berencana menggelar pertemuan dengan tim anggaran pemerintah daerah pada Selasa (17/3) ini.

(MKN)

CATATAN **iptek****Kisruh UPS**Oleh **AW SUBARKAH**

Ribut-ribut dana siluman dalam anggaran DKI Jakarta, adakah distributor penjual perangkat penyulang daya sementara—dikenal dengan *uninterruptible power supply*—seharga Rp 6 miliar?

Kalau ingin memesan rancangan khusus sistem UPS seharga itu, tentu bukanlah hal mustahil. Namun, apa urgensinya UPS buat sekolah menengah?

Perangkat penyokong daya ini dibutuhkan hanya sekitar 15 menit, yaitu saat pemasok utama dari PLN terputus mendadak. Dengan kecepatan sepersekian detik, daya PLN yang mati segera tergantikan oleh daya dari UPS.

Hanya rangkaian elektronis yang mampu menyulang secepat itu. Daya cadangan seperti generator listrik masih membutuhkan hitungan waktu menitan untuk mencapai kondisi stabil, dengan tegangan dan frekuensi sama dengan listrik PLN. Itulah fungsi krusial pada UPS: dalam waktu singkat memberi kesempatan menyelamatkan data atau menghidupkan genset cadangan.

Sungguh sulit membayangkan pemenuhan kebutuhan sekolah dengan UPS Rp 6 miliar. Padahal, dengan dana Rp 150 juta, sudah bisa didapatkan UPS 30 kVA. Artinya, gedung sekolah itu memiliki daya listrik sedikitnya 30 kVA atau sekitar 27.000 watt, yang dengan daya setengahnya saja sekolah sudah bisa menghidupi 100 komputer meja.

Jelas tidak ada tuntutan kebutuhan listrik tanpa putus selama 24 jam, apalagi sebagian besar aktivitas berlangsung pagi sampai sore. Sangat berbeda dengan kepentingan lembaga terkait pusat data, seperti bank, bandara, mal, pabrik, atau rumah sakit.

Semakin ironis, harga komputer sekolah pasti jauh lebih murah dari harga UPS. Padahal, para siswa belajar menguasai pemakaian komputer, bukan penggunaan UPS yang relatif sederhana. Sekali kehilangan hasil pekerjaan juga bukan sesuatu yang buruk. Maka, pengadaan perangkat pendukung yang super mahal itu, kalau benar ada, adalah sikap konsumtif yang amat berlebihan.

"Kenapa tak memilih panel surya kalau prinsipnya menyediakan daya tanpa putus. Dengan anggaran Rp 5,7 miliar—Rp 5,8 miliar, tiap sekolah bisa mendapat listrik tenaga surya berkapasitas 400.000 watt. Daya ini sudah berlebihan dan sisanya bisa dijual ke PLN," kata Bambang Sumaryo Hadi, praktisi sel surya.

Prinsip dasar kerja, baik UPS maupun panel surya yang tegangannya diubah menjadi bolak-balik PLN sebenarnya sangat mirip. Pada keduanya terdapat *inverter*, yaitu rangkaian elek-

tronik yang berfungsi mengubah arus searah (DC) menjadi bolak-balik (AC) sinusoidal, seperti sifat gelombang listrik PLN.

Saat ini, Bambang Sumaryo telah berhasil membangun sel surya di rumahnya sebesar 6.300 VA atau sekitar 6.000 watt dengan biaya Rp 100 juta. "Uang total Rp 12,1 triliun ini bisa membuat 1 GW panel surya dan melistriki 200.000 rumah dengan kapasitas masing-masing 5.000 VA. Bayangkan, saat ini rumah dengan listrik 2.300 VA sudah besar," katanya.

Teknologi *inverter* pada panel surya juga sudah sangat maju, selain mampu menghasilkan gelombang listrik *pure sine*, juga bisa sinkron dengan gelombang sinus pada listrik PLN. Dengan kondisi ini, listrik dari panel bisa disubstitusikan ke jaringan PLN. Melalui meteran khusus ekspor-impor yang dikeluarkan PLN, bisa diketahui jumlah aliran arusnya.

Dengan panel sel surya, apalagi aktivitas umumnya saat Matahari bersinar, sekolah bisa lebih produktif. Di Jakarta, dengan kondisi listrik PLN relatif stabil, listrik PLN cukup menjadi cadangan, terutama malam hari. Untuk memanfaatkan listrik panel surya saat malam, gunakan saja *storage* seperti aki. Aki besar berkapasitas 100 Ah (Ampere-jam) bisa menyimpan daya 100 watt selama 12 jam dan jika ingin daya lebih besar, tinggal mengalikan.

Jadi, apa perlunya UPS di sekolah menengah? Silakan menyimpulkan.

APBD DKI JAKARTA**Rapat Tertunda, Waktu Kian Sempit**

JAKARTA, KOMPAS — Rapat bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta tentang APBD tahun 2015, Selasa (17/3), tertunda karena urusan berkas yang dianggap belum tuntas. Pemimpin rapat pun memutuskan untuk menunda pembahasan.

Padahal, tanggal pembahasan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas rancangan APBD DKI Jakarta tinggal menghitung hari. Hasil evaluasi dikirim ke Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta pada Rabu (11/3) untuk klarifikasi.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, jika dalam tujuh hari tidak ada kesepakatan antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta, Kemendagri bakal memutuskan untuk memberlakukan kembali APBD 2014 untuk membiayai birokrasi dan pembangunan DKI Jakarta.

Pemimpin rapat sekaligus Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, Pemprov DKI yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah belum siap dengan berkas rancangan APBD versi Pemprov DKI sehingga diputuskan me-

nunda rapat. Pihaknya berharap Pemprov DKI menyerahkan draf rancangan APBD yang dilayangkan ke Kemendagri.

"Saya minta Pak Sekda (untuk menyerahkan drafnya), apakah ada yang dilarang atau tidak oleh DPRD. Tidak ada niat menghambat. Ini masalah komunikasi saja dan eksekutif belum siap. Bismillah, APBD DKI 2015 akan terealisasi," kata Prasetyo.

Saefullah mengatakan, dirinya tidak masalah dengan permintaan tersebut. Namun, draf rancangan yang diminta DPRD sebenarnya telah diunggah ke situs beritajakarta.com. Sebelumnya juga telah disampaikan Kemendagri ke DPRD DKI Jakarta. "Tak masalah. Hari ini juga kami kirim *print out* yang diminta DPRD," kata Saefullah.

Saefullah menambahkan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah tidak memperlakukan permintaan itu dan akan fokus pada perbaikan atas evaluasi Kemendagri. Semua catatan telah diperbaiki sesuai rekomendasi serta beberapa hal yang dipertahankan dalam APBD 2015.

Sejumlah mata anggaran mendapat sorotan tim evaluasi Kemendagri, antara lain adanya ma-

ta anggaran serupa yang tercetak di dua satuan kerja perangkat daerah, seperti pembangunan gedung sekolah di dinas perumahan dan dinas pendidikan, pembangunan puskesmas di dinas perumahan dan dinas kesehatan, serta kantor kelurahan dan kecamatan di dinas perumahan dan wali kota.

Kemendagri juga menilai anggaran untuk tunjangan pegawai negeri sipil Rp 16,5 triliun atau sekitar 24,5 persen total APBD DKI tidak wajar dan tidak rasional dari sisi proporsi anggaran. Namun, Pemprov DKI berencana mempertahankannya. Kebijakan ini merupakan dampak penghapusan mata anggaran honorarium dan biaya pengawasan teknis yang nilainya triliunan rupiah.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tidak risau dengan situasi itu. Jika DPRD tak juga sepakat dengan rancangan APBD 2015, pihaknya akan mengajukan peraturan gubernur (pergub) tentang APBD ke Kemendagri Jumat pekan ini. Jika pergub disetujui, Pemprov DKI akan mengacu besaran APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. (MKN)

Langkah Maju Pembahasan Anggaran

Polda Metro Periksa 63 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi★PS

JAKARTA, KOMPAS — Pertemuan Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan agenda pembahasan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas Rancangan APBD tahun 2015, Rabu (18/3), menargetkan pembahasan tuntas sebelum tanggal, Jumat (20/3).

Hasil dari rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta menjadi langkah maju yang selama ini dinitakan. Sejumlah anggota Banggar berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa bekerja dengan anggaran yang berkekuatan hukum berupa peraturan daerah (perda). Produk ini lebih baik ketimbang peraturan gubernur (pergub) yang memiliki keterbatasan, antara lain dalam hal pembelanjaan anggaran.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Bestari Baru mengatakan, fraksinya menginginkan pembahasan hasil evaluasi Kemendagri bisa segera selesai sehingga proses penetapan peraturan daerah mengenai APBD 2015 bisa rampung sesuai tenggat waktu. "Perda lebih strategis bagi warga Jakarta karena merupakan produk bersama DPRD-Pemprov DKI," ujarnya.

Pemprov DKI terancam mengundurkan pergub jika dalam tujuh hari tidak ada kesepakatan antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta.

Kemendagri bakal memutuskan untuk memberlakukan kembali APBD 2014 untuk membiayai birokrasi dan pembangunan DKI Jakarta.

Rapat pembahasan Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta pada Rabu siang berlangsung lebih dari tiga jam dengan dua sesi, yakni penyampaian hasil perbaikan dan tanggapan.

Rapat dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Setelah diawali penyampaian Sekretaris Daerah DKI Saefullah atas perbaikan Rancangan APBD, sejumlah anggota Badan Anggaran DPRD menyampaikan kritik dan masukan pada rapat Rabu siang. Beberapa kritik di antaranya soal plafon anggaran untuk bidang pendidikan, peruntukan mata anggaran operasional wali kota, pengalihan anggaran antarsatuan kerja perangkat daerah, serta penambahan dan pengurangan anggaran.

Menurut Prasetyo, polemik yang terjadi beberapa pekan ter-

akhir mengenai APBD 2015 merupakan dinamika yang wajar terkait pembahasan keuangan daerah.

Perbaikan

Pada rapat itu, Saefullah menyampaikan sejumlah perbaikan atas catatan Kemendagri. Pada bidang pemerintahan, misalnya, ada sembilan pengalihan kegiatan dari satu dinas ke dinas lain, perbaikan nomenklatur pada 946 mata anggaran, serta 105 kegiatan yang dijelaskan tanpa perubahan nominal dan nama anggaran.

Secara keseluruhan, lanjut Saefullah, ada 108 program yang dialihkan, antara lain dari dinas perumahan ke dinas pendidikan, dinas kesehatan, serta kelurahan dan kecamatan. Selain itu, ada perbaikan pada 1.521 perbaikan program, penjelasan pada 758 kegiatan, pengurangan 218 kegiatan, penambahan 60 kegiatan, serta perbaikan 597 kegiatan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati menambahkan, ada 45 poin evaluasi yang disampaikan Kemendagri. Poin-poin itu meliputi pengalihan kegiatan, perbaikan nomenklatur, penjelasan kegiatan, serta efisiensi berikut dampaknya berupa penambahan anggaran. Kemendagri memberikan koridor bahwa anggaran hasil evaluasi harus ditambahkan ke program lain yang perlu, bukan menam-

bah mata anggaran baru.

Sejumlah anggota mengkritisi evaluasi tersebut. Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Rois HS mengatakan, TAPD seharusnya tidak mentah-mentah mengalihkan program, seperti pembangunan gedung sekolah dari dinas perumahan ke dinas pendidikan, hanya karena rekomendasi. Padahal, pemisahan anggaran dilakukan karena pertimbangan kompetensi serta faktor sumber daya manusia.

Belum ada tersangka

Sampai Rabu kemarin, Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS) di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dalam menyidik kasus itu, Polda disupervisi Badan Reserse Kriminal Polri.

"Belum, belum ada satu orang pun ditetapkan sebagai tersangka. Masih ada sejumlah saksi yang belum diperiksa," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul, kemarin.

Menurut dia, sejauh ini baru 63 orang saksi yang menjalani pemeriksaan. (DEA/RTS/MKN)



Lihat Video Terkait "Penyidikan Kasus Korupsi APBD DKI" di kompasprint.com/vod/kasusapbdki

Energi untuk Mengawal Anggaran Publik ★

Energi Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta soal terkuras untuk urusan anggaran tiga bulan terakhir. Dua lektor yang berimplikasi berat dua kubu yang berperang. Satu di Jalan Medan Merdeka Selatan, satu lagi di Jalan Kebon Sirih. Sampai Rabu (18/3), dua hari menjelang tenggat penetapan APBD tahun 2015, "perang" itu belum usai.

Benih polemik sebenarnya telah muncul pada pertengahan Januari 2015. Ketika itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ada oknum DPRD dan atau pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta yang memusukkan anggaran senilai Rp 8,8 triliun. Ada sederet mata anggaran yang menurut dia tak masuk akal. Misalnya, biaya sosialisasi surat keputusan gubernur Rp 46 miliar dalam rancangan APBD 2015.

Selhari-dua hari setelah melontarkan temuan, Basuki menjelaskan bahwa dana itu adalah pokok pikiran (usulan DPRD) yang dimasukkan ke dalam beberapa pos anggaran melalui banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Namun, seperti berulang dia sampaikan, Basuki tak ingin lagi satu sen pun dana APBD DKI Jakarta yang disalurkan melalui berbagai cara, seperti yang "mentradisi" selama ini. Saat itu pula dia mencoretnya.

Akan tetapi, upaya penyusunan mata anggaran tak berhenti di situ. Pada sejumlah proses pembahasan, nama-nama aneh muncul dalam rancangan

APBD. Pada pekan awal Februari 2015, Basuki kembali mengungkap adanya anggaran yang menurut dia tak patut, berpotensi fiktif, sekaligus jadi proyek "bagi-bagi" anggaran melalui proyek siluman.

Ada ribuan mata anggaran yang diketahui masuk ke pos-pos SKPD. Total nilainya tak tanggung-tanggung, Rp 12,1 triliun, hampir 16,5 persen dari total APBD 2015 yang mencapai Rp 73 triliun. Padahal, Pemprov DKI telah berusaha membenangi APBD dari peluang munculnya titipan-titipan dengan teknologi informasi, yakni sistem penganggaran elektronik (*e-budgeting*). Sebuah sistem yang diadopsi Basuki bersama Gubernur Joko Widodo sejak tahun 2013.

Awalnya terkesan janggal. Bagaimana bisa sistem yang diciptakan bisa mendeteksi setiap masukan (*input*) berikut nama peng-*input*, lokasi, dan waktu, dapat diterobos begitu saja. Apalagi, ada ribuan mata anggaran tersebut di banyak SKPD dengan nama yang sebagian di antaranya tak rasional.

Salah satu yang berulang disampaikan Basuki, barangkali karena jumlahnya banyak dan nominalnya besar, adalah pengadaan alat pencadangan listrik atau *uninterruptible power supply* (UPS). Dana pengadaan satu



anggaran-anggaran itu muncul. Basuki menduga ada oknum anggota DPRD atau SKPD bermain-main dengan memotong dana dari pos-pos yang telah dianggarkan, lalu membagikannya ke banyak mata anggaran baru. Satu per satu bukti disampaikan Basuki dengan berulang-melayangkan tuduhan ke oknum DPRD.

Situasi itu menyulitkan polemik. Sejumlah anggota DPRD menilai tuduhan Basuki tak berdasar. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menganggap cara Basuki tak elok sebagai kepala daerah. Selain kalimat yang dianggap menyingsing, Basuki dianggap mengabaikan peran DPRD sebagai institusi yang terlibat dalam proses penetapan APBD.

Berhari-hari waktu berlalu. Seteru soal keuangan Ibu Kota belum juga usai. Kini, waktu menghitung mundur. Jika sampai Jumat (20/3) DPRD dan Pemprov DKI tak juga sepakat soal APBD 2015, Pemprov DKI berpeluang kembali ke APBD 2014 untuk membiayai birokrasi dan pembangunan DKI Jakarta.

Energi besar telah terkuras untuk menetapkan APBD, tak hanya dari kalangan eksekutif dan legislatif, tetapi juga warga ibu kota Jakarta. Kini publik menunggu realisasi program dan pembangunan disertai komitmen anti korupsi.

(MUKHAMAD KURNIAWAN)

unit UPS saja Rp 4,2 miliar hingga Rp 5,8 miliar. "Ini gila!" kata Basuki berang.

Sudah sejak lama Basuki mengidamkan bisa menggunakan *e-budgeting* secara utuh. Apalagi, lembaga audit negara menduga ada triliunan rupiah anggaran siluman muncul dalam APBD DKI Jakarta setiap tahun. Dengan perangkat dan sistem itu, penyimpangan bisa dicegah lebih dini. Anggaran pun dapat dialokasikan lebih bertanggung jawab karena memuat rincian hingga harga satuan. Semua kebutuhan barang dan jasa bisa dihitung dan dipantau lebih mudah.

Akan tetapi, penyeleweng selalu mencari celah. Saat rancangan APBD berproses, ang-

KISRUH APBD

Guru Terpaksa Talangi Operasional

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kepala sekolah dan guru terpaksa menalangi dana operasional sekolah serta upah guru dan karyawan honorer karena dana bantuan operasional sekolah belum juga cair hingga Kamis. Hal ini sebagai dampak dari kisruh APBD DKI.

Kepala SMPN 39 Jakarta Misto mengatakan, dana yang dibutuhkan untuk membayar upah guru dan karyawan honorer mencapai Rp 30 juta per bulan. "Mau tidak mau kami harus bertangung untuk bisa menutupi upah pekerja honorer. Kalau enggak begitu, nanti mereka enggak mau kerja, bisa lebih repot lagi kita," katanya, Kamis (19/3).

Selain upah pekerja honorer, pihak sekolah juga harus menanggung biaya listrik, alat tulis, dan biaya operasional lainnya.

Selain itu, PNS di sekolah sudah menerima tunjangan kinerja daerah (TKD). "Tetapi, yang dibayarkan baru TKD untuk Januari. Untuk Februari belum dibayarkan," kata Wakil Kepala

SMP 64 Jakarta, Suci.

Kasubbag TU Iwong

Sementara itu, sejumlah jabatan kepala subbagian tata usaha (kasubbag TU) di sekolah masih kosong pasca lelang jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta awal tahun ini. Sejumlah PNS yang ditugasi pada jabatan itu belum terlihat dan belum mengonfirmasi perihal pekerjaan mereka ke pihak sekolah.

Kasubbag TU merupakan jabatan struktural yang berwenang mengurus administrasi sekolah. Jabatan ini setara eselon IV b.

Kepala SMPN 47 Jakarta Sutrisno, Kamis, mengatakan, dirinya pernah mendengar ada nama orang yang akan menduduki jabatan sebagai kasubbag TU di sekolahnya. Namun, belum pernah sekalipun orang itu melangkah ke gerbang sekolah ini.

Sutrisno mengatakan, jabatan kasubbag TU di sekolah ini kosong sejak dua tahun terakhir. Pejabat terakhir pensiun dan sejak itu belum ada penggantinya.

Kepala SMPN 39 Jakarta Misto mengatakan, dua orang pernah datang ke sekolah ini untuk menanyakan lokasi sekolah. Mereka mengatakan hendak mengisi jabatan kasubbag TU.

"Yang satu orang sudah mengatakan mundur karena lokasi sekolah terlalu jauh dari tempat tinggal di Bekasi. Sementara satu orang lainnya bahkan belum pernah menginjakkan kaki ke sekolah ini. Baru satu kali menelepon untuk tanya lokasi sekolah," katanya. SMPN 39 Jakarta terletak di Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat.

Menurut Misto, dirinya pernah menyampaikan masalah ini ke bagian Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan DKI, tetapi belum ada solusi atas masalah ini.

Wakil Kepala SMPN 64 Djoko Sunyoto mengatakan, sejak Januari, pejabat kasubbag TU di sekolah ini dinyatakan lulus ujian lelang jabatan dan diberi tempat tugas di sekolah lain. "Tetapi, kasubbag TU pengganti belum ada," kata Djoko. (ART)

Tim Anggaran Kejar Tenggat

Hari Ini Batas Akhir Perbaikan Rancangan APBD DKI

JAKARTA, KOMPAS — Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengejar tenggat penyerahan Rancangan APBD 2015 ke Kementerian Dalam Negeri, Senin (23/3). Diharapkan, perbaikan segera rampung dan APBD dapat ditetapkan melalui peraturan daerah.

Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta menyatakan dukungannya meski sebagian di antaranya tetap mengulirkan hak angket.

Puluhan pejabat dan staf terlibat dalam proses perbaikan draf APBD DKI Jakarta tahun 2015. Mereka dikumpulkan di Ruang Pola Gedung Blok G Kompleks Balai Kota Jakarta, Kamis (19/3), untuk memperbaiki sejumlah mata anggaran yang menjadi catatan tim evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Mereka juga merevisi kekurangan berdasarkan hasil pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta sehari sebelumnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Djaroet Saiful Hidayat

sempat ke Ruang Pola untuk memberikan pengarahan. Hadir pula sejumlah anggota Badan Anggaran DPRD DKI yang diundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melihat langsung proses memasukkan mata anggaran dengan sistem penganggaran elektronik (*e-budgeting*).

TAPD mengejar batas waktu perbaikan pada Jumat (20/3), tujuh hari setelah hasil evaluasi diterima dari Kemendagri, agar bisa disampaikan Senin pekan depan. Menurut Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, timnya akan bekerja siang malam untuk menyelesaikan revisi.

Sesuai hasil evaluasi Kemendagri, secara keseluruhan ada 108

perubahan dalam RAPBD yang dialihkan dari satu dinas ke dinas lain. Juga ada perbaikan nomenklatur pada 1.521 mata kegiatan, penjelasan pada 758 kegiatan, pengurangan 218 kegiatan, penambahan 60 kegiatan, dan perbaikan pada 597 kegiatan.

Terkait hal itu, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dan sejumlah anggota bersikap mendukung penyelesaian revisi agar bisa ditetapkan menjadi APBD 2015. Sebab, jika terlambat atau melampaui batas, Pemprov DKI berpeluang menggunakan APBD 2014 yang ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Ketua Fraksi PDI-P Jhonny Simanjuntak, Wakil Ketua Fraksi Demokrat Ahmad Nawawi, dan Ketua Fraksi Nasdem Bestari Barus, secara terpisah, mengatakan harapan agar rancangan dapat segera ditetapkan menjadi Perda APBD DKI Jakarta 2015. Keberadaannya dinilai strategis untuk menopang program pemerintah dan pembangunan ibu kota Jakarta tahun 2015. Apalagi, sebagian kegiatan tersendat.

Namun, hak angket juga terus bergulir. Menurut anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDI-P Syahril, pembahasan APBD 2015 berbeda urusan dengan hak angket yang diusung DPRD. "APBD harus ditetapkan karena menyangkut hajat warga Jakarta. Sementara angket digulirkan terkait prosedur yang diduga melanggar Pemprov DKI," ujarnya.

Ketua Panitia Angket DPRD DKI Jakarta Mohamad Sangaji menambahkan, proses angket terus bergulir dan kini memasuki fase akhir. Pihaknya berencana memanggil ahli pemerintahan daerah dan tata negara. Setelah itu, baru digelar paripurna yang diperkirakan 23-25 Maret 2015.

Basuki optimistis APBD 2015 rampung, disetujui DPRD, dan bisa ditetapkan menjadi perda. Namun, tanpa perda pun, dia tidak risau jika harus menggunakan peraturan gubernur dan besaran APBD 2014.

Buka akses

Terkait APBD, TAPD DKI Jakarta membuka akses sistem

e-budgeting bagi DPRD untuk mengawasi APBD. Menurut Basuki, pemberian akses itu sekaligus membuka ruang bagi anggota DPRD untuk mengawasi apakah ada yang salah terkait anggaran daerah. Namun, kewenangan memasukkan mata anggaran tetap hanya di eksekutif.

DPRD juga dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran, mulai dari tingkat terendah, yakni proses musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi. Proses itu kini berlangsung untuk RAPBD 2016 dengan sistem yang serupa dengan *e-budgeting* agar alur urusan program atau kegiatan terpantau.

Prasetyo menyambut baik inisiatif Basuki membuka akses *e-budgeting* bagi anggota DPRD. Dia menilai hal itu sebagai titik baik melibatkan anggota DPRD dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan anggaran daerah. Dia berharap hubungan eksekutif-legislatif berjalan baik sehingga tak lagi merugikan masyarakat. (MKN/FRO/RTS/ART)

ANGGARAN SILUMAN

Kepercayaan Publik terhadap Gubernur Lebih Besar

JAKARTA, KOMPAS — Kisruh pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta antara eksekutif dan legislatif menyita perhatian 59,8 persen warga Ibu Kota. Tingkat kepercayaan publik terhadap Gubernur DKI 5,8 kali lebih besar dibandingkan terhadap DPRD.

Demikian hasil survei lembaga nirlaba Populi Center terkait isu anggaran siluman di mata warga Jakarta. Survei yang dilakukan pada 11-15 Maret itu melibatkan 1.000 responden yang dipilih acak bertingkat. Survei digelar di

Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Tingkat kesalahan (*margin of error*) kurang lebih 3,09 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Ketua Populi Center Nico Harjanto, Kamis (19/3), mengatakan, survei ini bertujuan mendapatkan gambaran mengenai pemahaman masyarakat terkait kisruh APBD. "Hampir 60 persen warga mengikuti isu yang sudah berlangsung selama dua bulan ini. Ini menunjukkan tingginya ke-

tertarikan dan pentingnya masalah itu bagi warga," ujar Nico.

Dari total responden, 25,5 persen tidak mengikuti isu tersebut. Sementara 14,7 persen tidak tahu. Adapun 42,6 persen responden lebih memercayai informasi dari Gubernur DKI daripada DPRD. Hanya 7,4 persen yang percaya DPRD. Sisanya, sebanyak 50 persen, tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei ini tidak menggali lebih dalam alasan warga lebih memihak gubernur. Namun, kinerja DPRD yang rendah, seperti te-

latnya penyusunan alat kelengkapan dewan, lambannya pembahasan APBD, dan rencana memasukkan anggaran sosialisasi surat keputusan gubernur, memperburuk citra DPRD di masyarakat.

Sementara itu, menurut Niki Ayu, peneliti Populi Centre, 70,4 persen warga puas terhadap kinerja Gubernur DKI terutama program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Warga berharap dugaan praktik anggaran siluman dilaporkan dan diproses hukum di

Kejaksaan, Polri, atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian, kisruh itu tak hanya jadi manuver politik, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi.

DPRD juga diminta membuktikan tuduhan mereka tidak melakukan praktik menyusun mata anggaran siluman ataupun menggelembungkan anggaran untuk program dan proyek tidak jelas. "Hasil survei juga menunjukkan hanya 1,6 persen warga yang mendukung hak angket oleh DPRD," ujar Nico. (DEA)



Tim Anggaran Siapkan Pergub

Pemprov DKI Jamin Layanan Publik

JAKARTA, KOMPAS – Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta menyiapkan rancangan peraturan gubernur menyusul buntutnya pembahasan peraturan daerah tentang APBD tahun 2015 dengan DPRD DKI Jakarta. Dengan produk hukum itu, pemerintah menjamin bergulirnya program pembangunan serta layanan publik.

Hingga batas akhir pembahasan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas rancangan APBD DKI 2015, Jumat (20/3) pukul 24.00, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD DKI gagal menyetujui rancangan menjadi peraturan daerah.

Menurut Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Ahmad Nawawi, delapan dari sembilan fraksi menolak membahas hasil evaluasi karena menganggap draf yang dikirim TAPD ke Kemendagri bukan hasil pembahasan bersama DPRD.

"Kecuali Nasdem, fraksi lain menyerahkan (persoalan APBD) ke Gubernur untuk menyiapkan peraturan gubernur (pergub). Dari sisi waktu jelas tak mungkin (membahas rancangan APBD ini)

Balai Kota Jakarta, Minggu (22/3).

Basuki mengatakan, seluruh kebutuhan dana untuk pelayanan publik dan kegiatan rutin aman. Dengan pergub, besaran APBD 2015 akan mengacu pada pagu APBD 2014, yakni Rp 72,9 triliun. "Hanya beda Rp 180 miliar (dari nilai RAPBD 2015), dan kami bisa kurangi beberapa kegiatan yang tidak mendesak," ujarnya.

Tunggu keputusan

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan pimpinan DPRD DKI secara resmi tentang finalisasi hasil pembahasan terhadap evaluasi APBD 2015.

merintahan Daerah yang berisi penggunaan pagu APBD 2014," paparnya.

Setelah keputusan resmi dari DPRD diserahkan kepada Mendagri, jika ternyata APBD 2015 harus berbentuk pergub, masih ada proses yang harus dijalani untuk penyesuaian anggaran. Menurut Reydonnyzar, berdasarkan aturan, perlu waktu 30 hari kerja sampai pergub disahkan Mendagri.

"Namun, kami akan bekerja cepat. Nanti kami akan evaluasi, asistensi, dan supervisi kepada eksekutif karena mereka belum berpengalaman (membuat APBD dalam format pergub). Dalam rapat maraton, kami akan membuat dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Perlu waktu 6-9 hari," tuturnya.

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai, banyak kerugian jika APBD menggu-

"Bisa terjadi duplikasi anggaran pengadaan yang aneh-aneh, seperti UPS. Penyerapan anggaran bisa jadi semakin rendah, hanya 70-75 persen. Pertumbuhan

karena tinggal tiga jam menjelang pukul 24.00. Selain itu, drafnya bukan hasil pembahasan dan kini sedang dipersoalkan panitia angket," kata Nawawi, yang juga anggota panitia angket.

Rancangan peraturan gubernur (pergub) dijadwalkan diserahkan ke Kemendagri Senin (23/3) ini. Namun, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyatakan akan menunggu sikap DPRD hingga Senin siang. "Siapa tahu DPRD berubah sikap. Kami butuh tanda tangan pimpinan, satu fraksi, dan 13 anggota Badan Anggaran untuk menetapkan perda," ujar Basuki di

"Batas waktunya Jumat, 20 Maret. Karena terbentur Sabtu dan Minggu, kami tunggu keputusan tertulis dari DPRD DKI Jakarta hari Senin nanti," katanya, Minggu.

Reydonnyzar mengatakan, dirinya belum berani menyatakan apakah APBD DKI 2015 dituangkan dalam perda atau pergub sebelum memegang surat keputusan pimpinan Dewan.

"Setelah kami terima suratnya, Mendagri akan menerbitkan radiogram kepada Gubernur DKI Jakarta untuk memberlakukan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe-

ekonomi juga tidak akan mencapai target 6,3 persen," kata Sekretaris Jenderal Fitra Yenny Sujipto.

Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi berharap agar segera ada kejelasan terkait anggaran yang akan digunakan. Hal itu dibutuhkan untuk bisa merealisasikan program-program prioritas pada tahun 2015 ini.

Menurut Rustam, pada dasarnya, baik mengacu pada pagu anggaran 2014 maupun 2015, pelaksanaan program tidak terlalu berpengaruh. Pasalnya, selisih anggaran tidak terlalu besar.

(FRO/MKN/JAL)

ANGGARAN DKI

Mediasi Buntu, APBD Mengacu Tahun 2014

JAKARTA, KOMPAS — Proses mediasi polemik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta di Kantor Wakil Presiden menemui jalan buntu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempersilakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengesahkan APBD 2015 lewat peraturan gubernur dengan menggunakan pagu tahun 2014.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan, mekanisme ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. "Kami memutuskan APBD DKI menggunakan pergub," kata Prasetio di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (23/3).

Pembahasan APBD DKI, kata Prasetio, terkait dengan persoalan politik, hukum, dan administrasi. Rapat pimpinan pada

Jumat pekan lalu tidak bisa memutuskan karena rancangan yang dikirim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak lengkap. Pada Senin siang, rapat pimpinan memutuskan menyerahkan kembali draf APBD untuk ditetapkan dengan pergub.

Proses pembahasan APBD tersebut memasuki batas akhir Senin kemarin. Semua dokumen APBD 2015 harus diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Namun, kesempatan terakhir menyelesaikan polemik tersebut tak bisa dioptimalkan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sampai turun tangan mempertemukan semua pihak terkait untuk menyelesaikan kisruh APBD DKI. Hadir dalam pertemuan di Kantor Wakil Presiden, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ketua DPRD

DKI Prasetio didampingi Wakil Ketua DPRD Triwisaksana, Ferrial Sofyan, M Taufik, dan Abraham Lunggana.

Wapres menyangkan hubungan yang memicu ketegangan antara Gubernur dan DPRD DKI. "Tidak boleh terus-menerus seperti ini. Jika terus menggunakan pergub, artinya tidak ada kemajuan di Jakarta," kata Kalla.

Namun, Kalla meminta semua pihak kembali membangun komunikasi yang baik. Tim anggaran DPRD dan Pemrov DKI harus mementingkan kepentingan rakyat. Masalah yang muncul antara gubernur dan pimpinan DPRD harus dipisahkan.

Tjahjo Kumolo mengatakan, hal ini merupakan pilihan buruk yang terpaksa diambil saat ini. Ia mengakui, masalah di DKI ini merupakan yang pertama kali terjadi di Indonesia.

"Tim anggaran Pemprov DKI dapat memasukkan program-program baru pada pembahasan APBD Perubahan tahun 2015," kata Tjahjo seraya mengingatkan, hal-hal prioritas adalah alokasi anggaran untuk kesehatan, pendidikan, rumah susun, dan infrastruktur.

Senin pagi, Basuki mengundang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta untuk menjelaskan pemaknaan peraturan gubernur sebagai landasan hukumnya. "Hari ini kami ajukan rancangan pergub ke Kemendagri," ujarnya.

(NDY/JAL/MKN/FRO/HAR)



Lihat Video Terkait
"Jusuf Kalla
Panggil Ahok"
di kompasprint.com/video/waprespangillahok



Dewan Lanjutkan Hak Angket

Kasus DKI Jadi Contoh Positif Sisi Pengawasan Anggaran Publik

JAKARTA, KOMPAS — Panitia angket DPRD DKI Jakarta berencana mengundang sejumlah ahli, Rabu (24/3) hingga Jumat (27/3), untuk menggali informasi terkait kisruh APBD tahun 2015. Sejumlah anggota dan unsur pimpinan DPRD memandangi angket tidak terkait langsung dengan penetapan APBD yang sifatnya administratif.

Ketua Panitia Angket DPRD DKI Jakarta Mohamad Sangaji mengatakan, pihaknya berencana mengundang ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin dan Margarito Kamis, serta ahli komunikasi Tjipta Lesmana. Mereka diundang untuk dimintai pandangan terkait proses penyusunan APBD DKI tahun 2015.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, rapat pimpin-

an memutuskan menolak pembahasan hasil revisi APBD atas evaluasi Kementerian Dalam Negeri, antara lain karena materinya bukan hasil pembahasan. Mereka menyerahkannya ke Gubernur DKI Jakarta agar melegalkannya dengan peraturan gubernur (pergub).

Menurut Prasetyo, angket tak terkait langsung dengan proses penetapan APBD. Sebelumnya, rapat pimpinan telah menyepa-

kati penggunaan hak angket, dan karena itu akan diselesaikan.

Terkait penggunaan pergub, selain melayangkan rancangan pergub tentang APBD 2015, Pemprov DKI juga mengundang sejumlah ahli untuk menentukan langkah. Pemprov DKI juga menyiapkan tim supervisi untuk mengatasi masalah hukum.

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono, pihaknya akan membentuk tim supervisi untuk memastikan pencairan anggaran tidak melanggar hukum. Tim bisa dari Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan, ataupun Polri.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(TAPD) akan menyesuaikan pagu belanja karena besarnya harus Rp 63 triliun yang mengacu pada perubahan APBD 2014. Padahal, tahun ini Pemprov DKI mengajukan anggaran belanja daerah sebesar Rp 67,4 triliun.

Jadi contoh

Analisis dan praktisi penyelenggara pemerintahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Deddy Bratakusumah, berpendapat, kisruh APBD antara DPRD dan Pemprov DKI bisa menjadi contoh positif dari sisi pengawasan anggaran publik. APBD seharusnya bisa diawasi bersama, ditetapkan secara terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Menurut Deddy, Basuki memulau proses yang selama ini

menjadi celah untuk memasukan anggaran siluman. "Permainan anggaran jamak terjadi di banyak daerah, tetapi tak mencaut karena DPRD dan kepala daerah sama-sama tahu. Publik yang dirugikan karena anggaran tak tepat sasaran," ujarnya.

Gagalnya penetapan APBD dengan peraturan daerah, lanjut Deddy, berdampak pada pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ada kegiatan yang terpaksa dikurangi atau dialihkan karena perubahan pagu.

Pemprov DKI diminta memprioritaskan program-program yang terkait langsung dengan publik, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum. (MKN)

UPAYA MEDIASI

Kesempatan Terakhir Pun Kandas

Senin (23/3) lalu seharusnya menjadi hari istimewa untuk mengakhiri polemik panjang APBD DKI Jakarta 2015. Namun, harapan itu tidak tercapai. DPRD DKI dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tetap tak menyepakati pembahasan APBD 2015.

Konsekuensinya, Pemprov DKI pada tahun anggaran 2015 ini menggunakan pagu anggaran tahun 2014. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menyalahkan hal ini. Mediasi yang ia lakukan dengan melobi sejumlah pimpinan partai politik ternyata belum mampu menyelesaikan masalah.

Meski demikian, Kalla tidak ingin perseteruan elite di DKI Jakarta berlanjut. Sebab, rakyat yang akan dirugikan.

Kalla melihat ada ketidakharmonisan antara Gubernur DKI dan pimpinan DPRD yang dipicu komunikasi yang buruk. Senin lalu, Wakil Presiden menggelar mediasi sebagai upaya mencairkan kebekuan komunikasi tersebut.

Kalla meminta Basuki untuk memperbaiki cara bertuturnya. Boleh tegas, tetapi Basuki diharap lebih sopan dan tidak menggunakan kata-kata kasar.

Basuki menerima masukan Kalla yang ia anggap sebagai petuah orangtua kepada anaknya. Dia berjanji akan memperbaiki cara bertutur ke publik agar lebih santun. "Saya kira yang disampaikan Pak JK itu benar. Jadi Pak Wapres sampaikan alangkah baiknya semua seperti satu keluarga, masa mau berantem terus?" kata Basuki.

Kalla menyampaikan hal itu di Kantor Wakil Presiden ketika menggelar pertemuan tertutup dengan Ba-

suki dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada pukul 15.15. Kurang dari satu jam, pertemuan itu usai.

Pukul 16.30, giliran rombongan pimpinan DPRD DKI tiba di tempat yang sama. Sebelum bertemu Wapres, pimpinan DPRD DKI lebih dulu membuat keputusan politik untuk tidak menandatangani APBD 2015. Mereka menyerahkan ke Gubernur DKI agar membuat peraturan gubernur (pergub) soal APBD.

Pilihan "buruk" terpaksa diambil agar jalannya pemerintahan tetap berlangsung. Menurut Kalla, penggunaan pagu APBD tahun 2014 adalah sebuah pilihan sulit. "Seharusnya ini tak boleh terjadi, persoalan pribadi tak boleh mengganggu kepentingan rakyat," kata Kalla.

Menjelang magrib, pertemuan Kalla dengan pimpinan DPRD usai. Berkali-kali Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyoroti gaya bertutur Basuki yang ia nilai kasar. Hal itu membuat harga diri pimpinan DPRD terusik. Prasetyo merasa ucapan Basuki telah melecehkan para wakil rakyat.

Menurut Prasetyo, selama proses pembahasan APBD, nama baik pimpinan DPRD tercoreng karena dituduh maling, penipu, dan berbagai tuduhan kotor lain. Padahal, jika Basuki tak setuju dengan usulan Dewan, sebaiknya dihapus saja usulan Dewan. "Tidak perlu teriak di media. Kami ini punya keluarga," kata Prasetyo.

Polemik panjang APBD di DKI baru pertama terjadi di Indonesia. Mendagri tak ingin hal itu terjadi di wilayah lain. Menurut Tjahjo, Pemprov dan DPRD DKI satu kesatuan dalam tatanan pemerintah daerah. Namun, sepertinya hal ini terganjal masalah komunikasi yang buruk. (ANDY RIZA HIDAYAT)



JITET

WAWANCARA KHUSUS

Pesan di Balik Kisruh APBD

Polemik antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta terkait APBD tahun 2015 belum usai. Eksekutif tengah bersiap melaksanakan anggaran dengan peraturan gubernur sebagai dasar hukum. Sementara legislatif terus menggulirkan angket. Kekisruhan ini tak hanya berdampak buruk pada kinerja birokrasi, tetapi juga pada warga ibu kota Jakarta.

Hingga akhir triwulan I-2015, penyerapan anggaran diperkirakan baru 3 persen, antara lain untuk gaji pegawai. Padahal, idealnya 10 persen, lalu 20 persen pada triwulan kedua. Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat melihat ada hikmah di balik kisruh anggaran tiga bulan terakhir. Berikut petikan wawancara dengan Djarot di Balai Kota Jakarta, Rabu (25/3). *Berapa lama peraturan gubernur tentang APBD selesai?*

Tim Kementerian Dalam Negeri sedang lembur. Paling tidak seminggu. Setelah itu langsung bisa dipakai. Kami tidak ingin berlama-lama. Harus ada APBD supaya pelayanan masyarakat dan pembangunan tak terhenti. Harus ada kepastian hukum dan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) bisa segera mengeksekusi program. Lelang sudah jalan prosesnya. SPK (surat perintah kerja) menyusul.

Bagaimana peran Anda dalam situasi ini sebagai kader partai sekaligus wakil gubernur?

Kita harus membangun budaya pemerintahan yang baik. Jangan sampai antara kepala daerah dan wakilnya bertikai di tengah jalan, apalagi sampai pisah. Keduanya adalah satu. Hubungan dengan mitra juga harus dibangun dengan baik. Wakil gubernur harus mendukung kebijakan gubernur. Posisi saya, dulu diajukan dan dilantik oleh gubernur atas persetujuan ketua umum (PDI-P) karena saya kader partai.

Saya tak ingin di posisi yang terus-menerus pro-kontra karena tidak produktif. Korbannya tak hanya birokrasi di Pemprov

DKI, tetapi juga publik. *Bagaimana proses penetapan APBD selama ini?*

Saya masuk Desember 2014 saat APBD hampir selesai karena proses dimulai sejak Maret 2014. Namun, saat itu ada "turbulensi" sehingga penetapannya terlambat. Tetapi, kejadian itu memberikan hikmah. Saya baru tahu bahwa proses perencanaan dan penganggaran DKI Jakarta selama ini tidak sehat dan tidak baik. Kadang sesuai prosedur, tetapi substansinya belum. Idealnya, akhir Desember 2014 atau awal Januari 2015 sudah selesai.

Mestinya fokus. Ini kelemahan di birokrasi ataupun di depan. Ada kebiasaan buruk birokrasi dalam penyusunan APBD, yakni *copy paste*, mislkin inovasi, ambil anggaran tahun sebelumnya, lalu memasukkan ke anggaran sekarang.

Legislatif seharusnya rajin juga turun ke masyarakat dan terlibat dalam proses, mulai dari musrenbang tingkat kelurahan, ke kecamatan, kota, hingga provinsi. Dengan demikian, dia bisa cek, apakah aspirasi masyarakat atau konstituennya masuk atau tidak. Eksekutif juga harus demikian sehingga tidak saling menyalahkan. Ini demi menghindari anggaran (ter)duplikasi dan mubazir.

Apa pelajaran dari situasi tiga bulan ini?

Penetapan pergub (sebagai dasar APBD tahun ini) adalah berkah. Diharapkan, proses penganggaran lebih baik dan sehat. Kami konsentrasi ke tahun 2016. Kasus tahun 2015 sudah terjadi, dan mari kita kawal. Tahun depan harus lebih baik prosesnya. APBD DKI ini besar se-



Djarot Saiful Hidayat

KOMPAS/PRITOMBODO

kali. Jika dibiarkan terus seperti yang selama ini terjadi, banyak infrastruktur yang tak terbangun. Kini ada sekitar 40 persen bangunan sekolah yang butuh perbaikan, tetapi di sisi lain ada bangunan baru tetapi tidak berfungsi atau sebenarnya tak dibutuhkan masyarakat. Terminal Pulogebang bisa jadi contoh. Biaya pembangunannya ratusan miliar rupiah, tetapi sampai sekarang belum berfungsi.

Bagaimana pendapat Anda terkait e-budgeting?

E-budgeting itu hanya alat (*tool*) untuk evaluasi dan mengawasi anggaran. Selain pengawasan, alat ini diharapkan memperbaiki mutu isinya, sesuai prioritas atau tidak, tepat sasaran atau tidak, dan efektif atau tidak. Kita butuh alat itu karena mata anggaran di APBD DKI Jakarta mencapai puluhan ribu item. Teknologi memudahkan kita menuliskannya.

Bagaimana posisi DPRD?

DPRD jadi bagian integral dalam pemerintah daerah. DPRD perlu ambil hikmah agar proses penyusunan APBD 2016 lebih baik. Kita memulai babak baru dalam proses penganggaran. Dalam konteks hak *budgeting*, harusnya anggota DPRD tahu. UU dan peraturannya ada. Mereka mestinya ikut proses musrenbang yang kini sampai kecamatan. Tahun depan jangan lagi baru masuk di akhir proses pembahasan. Apalagi, sampai harus memaksa masuk sehingga merusak rencana semula. Ikuti proses dari bawah.

Tak mungkin pula memelototi ribuan lembar rancangan APBD di akhir sehingga tak maksimal pengawasannya. Kadang, yang melototi juga sekadar *ngecek* apakah usulannya masuk atau tidak. Ini barangkali juga jamak terjadi di daerah lain meski tak semua.

Apa inti dari pesan di balik kisruh APBD ini?

Saatnya birokrasi bisa berbenah. Demikian pula DPRD, untuk menanamkan cara yang baik. Bukan untuk kepentingan individu, kelompok, atau lembaga saja, melainkan untuk kebaikan seluruh warga ibu kota Jakarta. Bayangkan, RABPD DKI Jakarta termasuk yang paling lambat masuk ke Kemendagri lho. Padahal, DKI seharusnya bisa lebih awal karena tidak perlu menunggu pagu anggaran dari pusat, yakni DAU dan DAK. DKI bisa merencanakan pendapatan lebih awal dibandingkan daerah lain. (MKN/NAR)



Lihat Video Terkait "Wawancara Djarot Saiful Hidayat" di kompasprint.com/vod/wawancara.wagub





Indonesia Corruption Watch melaporkan adanya dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2012 hingga 2014 ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (26/3). Dua kardus besar berisi surat dan dokumen diserahkan ke lembaga anti korupsi itu untuk ditindaklanjuti.

DUGAAN KORUPSI

ICW Laporkan Kasus UPS 2014 ke KPK

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia Corruption Watch melaporkan sejumlah temuan terkait dugaan korupsi dana dari APBD DKI Jakarta tahun 2014 ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (26/3). Dari sejumlah kasus itu, negara diduga dirugikan Rp 277,9 miliar.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri menyebutkan, timnya menemukan indikasi korupsi pada pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS), mesin pemindai, pencetak, dan pengadaan enam judul buku untuk sejumlah sekolah. Semuanya dibiayai APBD DKI Jakarta tahun 2014.

Kerugian negara dari pengadaan UPS ditaksir Rp 186,4 miliar. Adapun dari pengadaan pemindai dan pencetak Rp 89,4 miliar, dan Rp 2,1 miliar pada pengadaan enam judul buku. Korupsi dilakukan melalui persekongkolan antara pejabat pembuat komitmen (PPK), distributor, peserta, dan pemenang le-

lang. Persekongkolan dilakukan pada proses penetapan harga, penawaran, dan penetapan pemenang lelang. Dalam penetapan harga, PPK menggunakan harga distributor yang justru menjadi pemasok bagi peserta dan pemenang lelang. Harga barang pun diduga digelembungkan tinggi sehingga menguntungkan distributor dan pemenang lelang.

Febri menambahkan, ICW memakai APBD tahun 2015 versi DPRD sebagai titik tolak investigasi beberapa kasus itu. Sebab, ada mata anggaran yang berulang di APBD 2014 dan APBD 2015 versi DPRD, antara lain pengadaan UPS, pemindai dan pencetak, serta pengadaan buku.

Febri mencontohkan pengadaan enam judul buku, yakni *Hikayat Ibu Kota, Perempuan, Dari Rezim ke Rezim, Jakarta Dulu Rawa Kini Menara, Menapak Kota Harapan*, dan *Delman menuju MRT*. Mata anggaran untuk mencetak buku-buku itu terda-

pat di APBD 2014 dengan total biaya Rp 3 miliar. Pengadaan enam judul buku ini ternyata terindikasi korupsi.

Mata anggaran serupa muncul kembali dalam APBD 2015 versi DPRD dengan tiga judul berbeda, yakni *Nekad demi Rakyat, Dari Belitung Menuju Istana*, dan *Tionghoa Keturunanku, Indonesia Negaraku*. Nilai anggaran untuk tiga judul buku itu Rp 30 miliar.

Persekongkolan antara PPK, distributor, serta peserta dan pemenang lelang terlihat jelas. Contohnya, PPK hanya menggunakan satu distributor, yakni PT FS, untuk menetapkan harga Rp 149.000 per buku. Padahal, berdasarkan investigasi ICW, harga wajar dalam pencetakan ini hanya Rp 45.000 per buku. Pemilik sekaligus direktur PT FS memiliki keterkaitan dengan PPK.

Persekongkolan juga terlihat pada pemilihan pemenang lelang. Peserta lelang yang telah lulus kualifikasi ternyata tidak hadir

dalam evaluasi harga. Tujuannya adalah memenangkan peserta yang menjadi pemenang lelang.

ICW menyerahkan laporan dugaan korupsi ke KPK beserta bukti berupa dokumen lelang, surat penawaran peserta lelang, dan kontrak pengadaan. ICW juga menyerahkan bukti dokumen APBD Jakarta 2015 versi DPRD, APBD dan APBDP Jakarta 2014.

Terkait dugaan korupsi APBD, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyerahkan hal itu kepada penegak hukum. Dia berharap para pelaku, baik oknum PNS, anggota DPRD, maupun rekanan yang terlibat, diproses secara hukum.

Dalam sejumlah kesempatan, Basuki menyebutkan, ada sekitar Rp 40 triliun anggaran yang diduga diselewengkan pada APBD 2012-2014. Modusnya adalah dengan mengusulkan kegiatan serta pengadaan barang dan jasa yang tak perlu. (MKN)

APBD DKI JAKARTA



Basuki: Sejak Lama Anggaran DKI Dicuri

JAKARTA, KOMPAS — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga, anggaran DKI Jakarta dicuri melalui kegiatan siluman sejak bertahun-tahun lalu. Pelaku menyisipkan mata anggaran dalam proses penyusunan APBD.

Kerja sama antara oknum eksekutif dan legislatif dalam menyisipkan anggaran dilakukan terutama pada saat-saat akhir APBD akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Dari dulu kami kecolongan," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Jumat (27/3).

Karena itu, kata Basuki, selain menerapkan sistem penganggaran elektronik (*e-budgeting*), pihaknya bekerja sama dengan Kemendagri menyisir mata anggaran yang tertuang dalam rancangan APBD DKI 2015. Penyisiran itu untuk memastikan anggaran tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu.

Pola korupsi APBD biasa dilakukan, antara lain, dengan menggelembungkan harga, menambah jumlah hari kerja proyek, serta menurunkan mutu pekerjaan atau barang. Dalam proyek pembangunan sekolah, misalnya, penggelembungan anggaran dilakukan dengan menambah hari kerja atau jumlah pekerja.

Pada proyek lain, yakni pembangunan lapangan olahraga, kualitas diusulkan dengan standar internasional yang membutuhkan biaya tinggi. Kenyataannya, lapangan dibangun dengan kualitas rendah.

Selain menerapkan sistem baru, Pemprov DKI juga mewajibkan setiap pejabat melaporkan harta kekayaan serta bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminimalisir korupsi.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri menambahkan, berdasarkan hasil investigasi timnya, modus penggelembungan harga terjadi di sejumlah proyek dalam APBD DKI 2014. Dari proyek pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS), mesin pemindai dan pencetak, serta enam judul buku saja, ditemukan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 277,9 miliar.

Serapan anggaran

Meskipun Basuki telah memastikan pelayanan publik tidak terganggu akibat pagu APBD 2015 mengacu pada APBD 2014, masalah serapan anggaran harus diperhatikan. Di Jakarta Barat, proyek pemindahan makam di Tempat Permakaman Umum (TPU) Kapuk Teko, Cengkareng, batal terealisasi karena APBD-P 2014 gagal terserap.

Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakbar Djauhar Arifin mengatakan, tahun lalu makam seluas 1 hektar yang terendam air itu sudah dikeringkan. Namun, pemindahan makam ke TPU Tegal Alur, Kalideres, urung dilakukan karena waktu untuk menyerap anggaran sangat mepet.

Akibatnya, pihaknya harus mengulang pekerjaan lagi dari awal. "Karena gonjang-ganjing APBD, kami belum tahu ada alokasi dana untuk itu atau tidak. Tetapi, kami tetap usulkan sebagai program prioritas tahun anggaran 2015," kata Djauhar.

Kini, areal TPU di Kampung Apung itu terendam air dan tanah setebal 2 meter dan ditumbuhi eceng gondok. Warga tidak bisa lagi memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam dan beternak lele. Sesuai Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030, makam tersebut diperuntukkan sebagai jalan raya. (MKN/DEA)

KEUANGAN DAERAH

APBD DKI Diharapkan Selesai Dua Pekan Lagi



JAKARTA, KOMPAS — Dalam dua pekan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan sudah memiliki APBD yang bisa digunakan untuk merealisasikan pembangunan. Pekan depan, eksekutif mulai memasukkan mata anggaran melalui sistem *e-budgeting*.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Minggu (29/3), mengatakan, proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) masih berlangsung.

"Tidak ada perubahan mendasar. Hanya ada beberapa penyesuaian karena anggarannya disesuaikan dengan pagu belanja APBD 2014," katanya.

Direncanakan, *input* (pemasukan) mata anggaran dilakukan pada 6-8 April. Diperkirakan, pada 10 April APBD 2015 sudah bisa disahkan Kementerian Dalam Negeri.

Dengan pagu belanja Rp 63,65 triliun sesuai APBD 2014, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memangkas Rp 3,8 triliun dari rencana belanja yang diajukan. Heru mengatakan, dana belanja di sejumlah dinas akan dipotong.

"Di Dinas Tata Air, misalnya, anggaran pembelian lahan dipotong Rp 500 miliar, dan anggaran pembangunan tanggul laut dipotong Rp 300 miliar. Anggaran pembelian lahan di Dinas Bina Marga; Dinas Pertambangan dan Pemakaman; serta Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan dipotong masing-masing Rp 500 miliar," ujar Heru.

Anggaran untuk rumah dan bangunan bersejarah di Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan juga dipotong Rp 500 miliar. Demikian pula anggaran untuk rehabilitasi gedung olahraga di Dinas Olahraga dan Pemuda dipotong Rp 300 miliar.

Realistis

Akhir pekan lalu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, penyesuaian APBD tahun ini diharapkan bisa benar-benar membuat anggaran daerah DKI Jakarta lebih realistis. "Anggaran yang ada benar-benar disesuaikan antara pendapatan dan belanjanya sehingga ekspektasinya tidak terlalu tinggi," katanya.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, anggaran yang tidak terserap pada APBD 2014 mencapai lebih dari 30 persen. Kemendagri memperkirakan APBD 2015 pun berpotensi menyisakan puluhan triliun rupiah apabila tidak dihitung dengan cermat.

Konflik berkepanjangan antara eksekutif dan legislatif soal APBD 2015 telah menyisakan Rp 3,8 triliun yang tidak bisa digunakan. Eksekutif juga tinggal memiliki waktu kurang dari sembilan bulan untuk menggunakan dana belanja daerah. Apabila pemanfaatannya tidak dilakukan dengan benar, sisa lebih penggunaan anggaran pada APBD 2015 ini bisa semakin besar.

Saefullah menekankan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah agar menghitung dengan cermat anggaran mereka. Dia juga meminta BPKAD untuk benar-benar memperhitungkan pendapatan dan belanja. (FRO)

KASUS UPS

AU-ZS Diduga Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

JAKARTA, KOMPAS — Badan Reserse Kriminal Polri menduga, dua mantan pejabat Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 25 paket *uninterruptible power supply* untuk 25 SMAN/SMK tahun anggaran 2014. Mereka diduga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk merekayasa lelang proyek. Kedua tersangka itu adalah AU dan ZS.

"Setelah gelar perkara selama beberapa hari terhadap kasus tindak pidana korupsi pengadaan UPS, ditetapkan dua tersangka. Keduanya akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan kembali," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, Senin (30/3).

Ia menjelaskan, dari gelar perkara itu, kala itu AU sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, sedangkan ZS sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.

Kedua tersangka ini, menurut dia, diduga bekerja sama dengan pihak ketiga yang menjadi distributor/penyedia barang dan jasa ini. Dari kerja sama itu, pemenang lelang pun direkayasa dan terjadi penggelembungan dana

Awalnya, kasus ini ditangani Polda Metro Jaya sebelum dilimpahkan ke Mabes Polri. Saksi yang akan diperiksa dalam kasus ini 130 orang. Sebanyak 85 calon saksi sudah dikirim surat pemanggilan.

Persiapan APBD 2016

Untuk menghindari kekacauan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemprov DKI Jakarta memulai proses penjarangan aspirasi untuk APBD 2016. Proses ini akan diawali dengan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di tingkat kota pada Selasa ini.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, kemarin, mengatakan, proses musrenbang berjalan seiring penyelesaian APBD 2015. "Fokus kami sekarang adalah menyelesaikan APBD 2015 dengan baik dan memulai proses APBD 2016. Besok kami undang seluruh pihak di tingkat kota untuk menjangkau apa yang dibutuhkan warga," katanya.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih menunggu kelanjutan proses penyusunan peraturan gubernur sebagai landasan APBD 2015 dari Kementerian Dalam Negeri. Saefullah mengatakan, draf Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara telah dikirim ke Mendagri.

lelang. Keduanya dijerat Pasal 2 dan Pasal 6 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

"Pemeriksaan akan terus dilanjutkan. Nanti anggota Dewan juga akan diminta keterangan. Diduga bisa jadi akan ada tersangka lain terkait kasus ini. Untuk itu, kami tunggu pemeriksaan kedua tersangka ini," ujar Rikwanto.

Kepala Subdirektorat V Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Komisaris Besar Muhammad Ikram mengatakan, kerugian negara terkait kasus ini masih dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DKI Jakarta. Hingga saat ini, ditaksir kerugian akibat penyelewengan kasus pengadaan UPS mencapai Rp 50 miliar.

"Tanggal 31 Maret-3 April, kami akan rapat dengan Kemendagri. Semoga pada 10 April sudah ada persetujuan dari Mendagri sehingga APBD 2015 bisa dicairkan segera," ujar Saefullah.

Dalam proses memasukkan mata anggaran, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memerintahkan Sekda mengundang anggota DPRD DKI Jakarta. Hal itu dilakukan agar proses penyusunan APBD terbuka meski landasan hukumnya pergub.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menambahkan, meskipun APBD diputuskan menggunakan pergub, pihaknya berharap pemerintah melibatkan DPRD dalam penyusunan APBD 2015. "Kami harus melaksanakan fungsi pengawasan," ujarnya. (PRO/MKN/IAN)

DANA HIBAH

DKI Jamin Bantuan ke Wilayah Sekitar

JAKARTA, KOMPAS — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjamin mencairkan bantuan keuangan bagi pemerintah daerah di sekitar Jakarta. Syaratnya, penerima mempertanggungjawabkan bantuan sebelumnya dan mengajukan proposal rinci tentang proyek yang dibangun tahun ini.

"(Pencairannya) Tidak masalah, berapa pun dana yang dibutuhkan untuk membantu (wilayah) sekitar diperbolehkan Kementerian Dalam Negeri sebab itu sesuai dengan KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara)," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Senin (30/3).

Basuki menyaratkan proposal disertai rincian detail teknisnya. Dia juga meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan tahun lalu. "Tidak apa bantuan tahun lalu belum dipakai dan disimpan buat tahun ini asal lapor ke kami," ujarnya.

Wali Kota Tangerang Arief R. Saniyah mengatakan, proposal dan desain rekayasa detail (*detail engineering design*) dari semua proyek terkait dana hibah ini sudah selesai dan dalam waktu dekat akan diserahkan kepada Gubernur DKI. Langkah itu mengikuti Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, pekan lalu.

"Kami mengajukan anggaran satu seperempat triliun rupiah. Akan tetapi, berapa pun yang disetujui, kami berterima kasih," kata Arief di Tangerang, Senin.

Adapun Wali Kota Tangerang Selatan mengajukan Rp 74,8 miliar untuk membangun Terminal Pondok Cabe dan membenahi infrastruktur pengairan.



Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail (Gaman) berkunjung ke Kantor Harian Kompas, Jakarta, dan diterima Pemimpin Redaksi Budiman Tanurejja, Senin (30/3). Menurut Nur Mahmudi, dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus diberikan dengan memahami konteks otonomi daerah.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengapresiasi kepastian turunnya dana hibah Pemprov DKI. "Jika memang Bekasi dapat Rp 300 miliar dari Jakarta, maka akan sangat membantu mengatasi persoalan di Bekasi," kata Rahmat.

Di Kota Bekasi, 70 persen hibah dari Pemprov DKI akan digunakan untuk pembangunan dan pelebaran jalan. Sementara 30 persen untuk proyek penanggulangan banjir.

Memahami otonomi

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan, pemberian hibah tersebut harus da-

lam konteks pemahaman terhadap otonomi daerah.

"Depok selalu disebut-sebut sebagai kota penyangga (Jakarta), padahal bukan. Depok adalah kota otonom. Meskipun ada interkoneksi (dengan Jakarta), kami tak bekerja untuk Jakarta. Kami bekerja sesuai tanggung jawab masing-masing," ujar Nur Mahmudi saat berkunjung ke Redaksi Kompas di Jakarta, Senin.

Mengenai kaitan dana hibah itu untuk penanganan banjir di Ibu Kota, Nur Mahmudi mengatakan, tanggung jawab penanganan banjir ada di pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum.

Menurut Nur Mahmudi, daripada pemerintah pusat membangun waduk baru seperti di wacanakan akhir-akhir ini, lebih baik dananya untuk merevitalisasi situ-situ yang sudah ada. "Di Depok sudah ada 151 hektar lahan situ, yang kalau dikeruk sedalam 5 meter saja, sudah mampu menampung 7,5 juta meter kubik air. Itu sudah akan membantu menahan air untuk tidak langsung mengalir ke Jakarta," papar Nur Mahmudi.

Menurut dia, proposal revitalisasi situ yang menghabiskan dana Rp 451 miliar itu sudah diajukan ke Kementerian PU. (LO/DH/MKN/PIN)

CURRICULUM VITAE



PERSONAL DETAIL

Nama : Bram Wasni Putra
Nama Panggilan : Bram
Umur : 21 tahun
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 24 November 1993
Golongan Darah : O
Alamat : Dladan Tamanan Banguntapan Bantul
Agama : Islam
Jenis Kelemin : Laki-laki
Nomor Telepon : 081328588816
Email : bramwasni@ gmail.com
bramwasni@yahoo.com

Pendididikan Terakhir

1. Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011 – 2015)



شهادة

الرقم: UIN.02/L.0/PM.03.2/01494/2015

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن :

الاسم : Bram Wasni Putra

تاريخ الميلاد : ٢٤ نوفمبر ١٩٩٣

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٦ ابريل ٢٠١٥ ،
وحصل على درجة :

٤٧	فهم المسموع
٥١	التركيب النحوية والتعبيرات الكتابية
٣١	فهم المقروء
٤٣٠	مجموع الدرجات

*هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ٢١ ابريل ٢٠١٥

الدكتور هشام زيني الماجستير

رقم التوظيف : ١٠٠٢ ١٩٩١.٣ ١٩٦٣١١.٩





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALLJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT
Jl. Marsda Adisucipto , Phone. (0274) 550727 Yogyakarta 55281

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No : UIN.02/L.4/PM.03.2/1751/2015

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Bram Wasni Putra**
Date of Birth : **November 24, 1993**
Sex : **Male**

took TOEC (Test of English Competence) held on **April 29, 2015** by Center for Language Development of Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	47
Structure & Written Expression	46
Reading Comprehension	43
Total Score	453

*Validity : 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, May 6, 2015

Dr. H. Ham Zaini, M.A.
19631109 199103 1 009

